

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN TAMAN
NASIONAL KAWASAN GUNUNG MERBABU**

(Studi pada Masyarakat di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Sosiologi



Oleh:

UMMU KHOER SALMA

2106026146

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG 2025

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara:

Nama : Ummu Khoer Salma

NIM : 2106026146

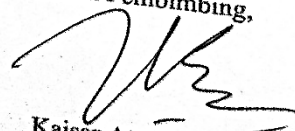
Judul Skripsi : Rasionalitas Masyarakat Terhadap Praktik Pengelolaan Taman Nasional Kawasan Gunung Merbabu (Studi pada Masyarakat di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2025

Dosen Pembimbing,



Kaiser Atmaja, M.A
NIDN. 2013078202

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
RESPON MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN TAMAN
NASIONAL KAWASAN GUNUNG MERBABU
(Studi Pada Masyarakat Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)

Disusun Oleh:

Ummu khoer salma

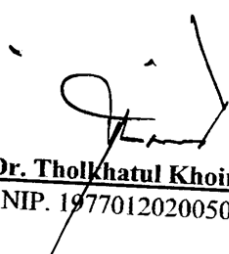
(2106026146)

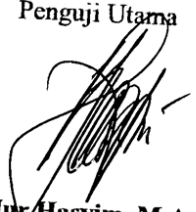
Telah dipertahankan didepan majelis penguji pada tanggal 23 Juni 2025 dan dinyatakan
LULUS.

Susunan Dewan Penguji,

Ketua Sidang

Kaisar Atmaja, M.A.
NIP. 198207132023211011

Sekretaris Sidang

Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 197701202005011005

Penguji Utama

Nur Hasyim, M.A.
NIP. 197303232023211007

Pembimbing

Kaisar Atmaja, M.A.
NIP. 198207132023211011

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini, saya Ummu Khoer Salma menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul *“Respon Masyarakat terhadap Praktik Pengelolaan Taman Nasional Kawasan Gunung Merbabu (Studi pada Masyarakat Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)”* merupakan hasil karya penulisan saya sendiri kecuali kutipan yang sudah saya cantumkan sumbernya. Sehingga di dalam skripsi saya tidak mengandung karya pihak lain yang saya gunakan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan lainnya. Selain itu skripsi ini juga belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada institusi pendidikan lainnya.

Apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur plagiarisme di dalam tulisan skripsi ini, maka saya siap bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi yang ada. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Sekian, dan terima kasih.

Semarang, 12 Juni 2025

Ummu Khoer Salma

NIM. 2106026146

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.....

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Respon Masyarakat terhadap Praktik Pengelolaan Taman Nasional Kawasan Gunung Merbabu (Studi pada Masyarakat di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)”** dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tanpa kendala yang sangat berarti. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan bagi umat muslim. Adapun penyusunan laporan ini merupakan syarat untuk menempuh gelar Sarjana Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pada kesempatan kali ini, penulis hendak mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas rahmat Allah SWT, karena dengan izin-Nya penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan lancar. Selain itu penulis juga mengucapkan banyak terimakasih, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari adanya kerjasama, bimbingan, serta dorongan dari beberapa pihak terkait. Maka dari itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Naili Ni'matul Illiyyun, M.A. selaku Kepala Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Kaisar Atmaja, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan nasehat, saran, masukan, arahan, motivasi, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta telah selalu sabar dalam membantu saya berproses menyusun skripsi hingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Nur Hasyim M.A. selaku wali dosen saya yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan,

dan meluangkan waktu, tenaga, pikiran selama perkuliahan berlangsung.

6. Seluruh Dosen dan segenap Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dalam belajar atau melakukan hal baru sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Studi Sarjana Sosiologi.
7. Terima kasih kepada keluarga saya yang tercinta, Ibu Nur Khanifah dan Bapak Solihun, kakak Muhammad Syakhirul Alim dan adik Muhammad Ikhsani Kamil, serta saudara-saudara di kampung halaman yang telah memberikan dukungan dalam materi maupun non material.
8. Terimakasih kepada Masyarakat Batur yang berkenan untuk diteliti dan memberikan data-data yang dibutuhkan peneliti untuk proses penyusunan skripsi.
9. Terima kasih kepada informan ibu Kristina Dewi S.Si, M.Sc, M.Eng, Mas Santoso, bapak Karsidi, bapak Suroso, ibu Darti, ibu Bekti, bapak Isman, bapak Wagimin, bapak Kasmin, ibu Sulasih, dan bapak Romadi selaku informan yang sudah bersedia memberikan informasi sehingga peneliti dapat memperoleh data dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada orang tua KKN Ibu Puanti dan Bapak Sugiono yang telah mendukung dan memberikan kasih sayang serta doa terbaik setiap saat.
11. Terima kasih kepada sahabat terbaik saya Kirana Sukma Anjelista yang telah menjadi teman bercerita dan menjadi sahabat senang maupun susah untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih teman - teman kuliah terbaik saya Ghina, Adel, Lucki , Windy, Anggita, Thasfia, Aghina, Isna, Matin serta teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Terima kasih untuk Oasis, Hazlett, Garret Kato, Hindia, dan S07 yang karyanya sudah menghibur saya dikala merasa membutuhkan hiburan saat skripsi ini dibuat.

Semarang, 12 Juni 2025

Ummu Khoer Salma

NIM. 2106026146

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh syukur *Alhamdulillah* *abbil'amin*, skripsi ini saya persembahkan untuk orang yang sangat berarti di hidup saya, kedua orang tua saya Ibu Nur Khanifah dan Bapak Solihun yang selalu mendoakan saya dan menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi saya. Terima kasih atas cinta kasih sayang, dukungan materil dan non materil, serta doa untuk yang selalu menyertai saya. Semoga ibu bapak selalu dilindungi oleh Allah SWT, dimudahkan dan dilancarkan dalam segala urusan, serta kebaikan selalu menyertai ibu dan bapak. Skripsi ini adalah wujud kecil dari cinta dan bakti saya untuk kalian.

Kepada almamater tercinta Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tempat saya belajar, bertumbuh, serta memperoleh pengetahuan dan pengalaman.

Semoga senantiasa berkembang menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan – lulusan kompeen, berbudi luhur, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.

MOTTO

“If you are depressed you are living in the past, if you are anxious you are living in the future, if you are at peace you are living in the present”

-Lao Tzu

QS. Ar-Ra'd: 28

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ
الْقُلُوبُ

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.”

ABSTRAK

Batur adalah desa di lereng Gunung Merbabu yang wilayahnya termasuk daerah *enclave* (perkampungan dalam hutan) di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Hutan di kawasan Gunung Merbabu dikelola oleh Taman Nasional. Masyarakat Desa Batur sudah sejak dahulu memanfaatkan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Regulasi pengelolaan Taman Nasional melakukan pembatasan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik pengelolaan Taman Nasional dan mengetahui respon masyarakat Batur terhadap praktik pengelolaan Taman Nasional.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, dengan teknik penentuan informan melalui metode *snowball*. Sementara itu teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Secara substantif analisis pada penelitian ini menggunakan Teori Pilihan Rasional dari James S. Coleman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan Taman Nasional berprinsip pada konservasi alam yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE. Pembatasan akses hutan dengan sistem zonasi, patroli perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi serta pemanfaatan sumber daya dilakukan oleh pengelola taman nasional yang bertujuan menjaga ekosistem. Adapun respon masyarakat Batur terhadap praktik pengelolaan taman nasional tercermin dalam upaya mereka mencari jalan tengah antara kebutuhan ekonomi, dan tuntutan konservasi ekologis. Dengan kata lain, tindakan masyarakat merupakan hasil kalkulasi pertimbangan rasional terhadap manfaat dan risiko, yang dilandasi oleh konteks sosial dan budaya setempat, bukan sekadar pilihan yang didasarkan pada logika ekonomi semata. Lebih lanjut masyarakat Batur merupakan aktor rasional yang mampu mengelola dilema antara konservasi dan pemanfaatan sumber daya secara baik. Mereka memiliki kemampuan menyeimbangkan kepentingan pragmatis dan pelestarian lingkungan berdasarkan norma adat. Masyarakat Batur juga tidak hanya bereaksi secara pasif terhadap kebijakan konservasi, melainkan juga memberi wacana strategi pengelolaan hutan yang partisipatif seperti PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Strategi ini mengakomodasi kepentingan ekologis dan sosial-ekonomi secara simultan.

Kata Kunci : Respon masyarakat, pengelolaan Taman Nasional, Desa Batur

ABSTRACT

Batur is a village on the slopes of Mount Merbabu, the area of which is part of the district enclave (forest village) in Getasan District, Semarang Regency. The forest in the Mount Merbabu area is managed by the National Park. The Batur Village community has long utilized forest resources to meet their living needs. The National Park management regulations limit community access to forest resources. Therefore, this study aims to understand the management practices of the National Park and to determine the response of the Batur community to the management practices of the National Park.

This research uses field research type (field research) with qualitative methods and descriptive approaches. Data collection in this study used observation, interview, and documentation techniques. The type of interview used was an unstructured interview, with the technique of determining informants through the method snowball. Meanwhile, the data analysis technique in this study was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Substantively, the analysis in this study used the Rational Choice Theory of James S. Coleman.

The results of the study indicate that the management practices of the National Park are based on the principles of nature conservation as regulated in Law No. 5 of 1990 concerning KSDAE. Restrictions on forest access with a zoning system, patrols for protection and security of conservation areas and utilization of resources are carried out by national park managers with the aim of maintaining the ecosystem. The response of the Batur community to the management practices of the national park is reflected in their efforts to find a middle ground between economic needs and the demands of ecological conservation. In other words, community actions are the result of rational calculations of benefits and risks, which are based on local social and cultural contexts, not just choices based on economic logic alone. Furthermore, the Batur community is a rational actor who is able to manage the dilemma between conservation and resource utilization well. They have the ability to balance pragmatic interests and environmental preservation based on customary norms. The Batur community also does not only react passively to conservation policies, but also provides discourse on participatory forest management strategies such as PHBM (Joint Forest Management with the Community). This strategy accommodates ecological and socio-economic interests simultaneously.

Keywords: *Community response, National Park management, Batur Village.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II	23
RESPON MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL DALAM TEORI PILIHAN RASIONAL JAMES S. COLEMAN.....	23
A. Definisi Konseptual	23
1. Respon Masyarakat.....	23
2. Praktik pengelolaan.....	24
3. Pengelolaan Beberapa Taman Nasional di Indonesia	27
B. Teori Pilihan Rasional James S. Coleman	29
1. Asumsi Dasar	29

2.	Konsep Kunci.....	31
1.	Perilaku Kolektif.....	33
2.	Norma	34
3.	Aktor korporat.....	35
C.	Implementasi Teori Pilihan Rasional James S. Coleman dalam penelitian.....	36
D.	Rasionalitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Perspektif Islam.....	40
BAB III.....		43
GAMBARAN UMUM DESA BATUR DAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU KABUPATEN SEMARANG		43
A.	Gambaran Umum Desa Batur	43
1.	Kondisi Geografis	43
2.	Kondisi Topografis	47
3.	Kondisi Demografis.....	49
B.	Gambaran Umum Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) Kabupaten Semarang	55
1.	Profil Taman Nasional Gunung Merbabu.....	55
2.	Isu strategis Taman Nasional Gunung Merbabu.....	56
3.	Kelembagaan Taman Nasional Gunung Merbabu	57
4.	Pembagian wilayah kerja	58
BAB IV		63
PRAKTIK PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU KABUPATEN SEMARANG		63
A.	Pengawetan ekosistem melalui sistem zonasi Taman Nasional	63
1.	Zona Inti.....	65
2.	Zona Rimba.....	65
3.	Zona Pemanfaatan.....	66
4.	Zona Tradisional	67
5.	Zona Rehabilitasi	68
6.	Zona Khusus	69
B.	Perlindungan sistem penyangga kehidupan	73
1.	Penyuluhan pentingnya konservasi ekosistem.....	73
2.	Kegiatan patroli rutin	76
C.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Wisata Alam.....	79
1.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air.....	80

2. Pemanfaatan Wisata Alam oleh Pihak Swasta.....	81
BAB V	85
RESPON MASYARAKAT DESA BATUR TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN	
TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU	85
A. Pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat Batur	85
1. Rumput untuk pakan ternak	86
2. Kayu bakar	87
3. Pemanfaatan air	90
B. Perasaan mengancam bagi kesejahteraan masyarakat	91
1. Gangguan Monyet Ekor Panjang (MEP)	91
2. Resistensi dan beradaptasi	94
3. Keberlanjutan ekosistem dan masyarakat	96
C. Mempertahankan nilai lokal dengan regulasi taman nasional masyarakat	98
1. Nilai lokal masyarakat Batur dan Regulasi Taman Nasional	98
2. Regulasi taman nasional	100
3. Strategi pengelolaan hutan kolaborasi dengan masyarakat	100
BAB VI.....	103
PENUTUP.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN.....	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1 perbandingan pengelolaan Taman Nasional di Indonesia.....	28
Tabel 2. Luas Desa Batur Kecamatan Getasan.....	44
Tabel 3. Jumlah penduduk Desa Batur perdusun	49
Tabel 4 Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur	50
Tabel 5. Jumlah penduduk Desa Batur berdasarkan pendidikan	52
Tabel 6. Jumlah penduduk Desa Batur berdasarkan pekerjaan	53
Tabel 7. Penduduk Berdasarkan Agama	54
Tabel 8. Keadaan rumah Desa Batur tahun 2018 - 2019.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Desa Batur	43
Gambar 2. Peta 19 dusun di Desa Batur.....	45
Gambar 3. Potensi pertanian di Desa Batur	46
Gambar 4. Kondisi topografis Desa Batur.....	48
Gambar 5. Peta topografis di Desa Batur.....	49
Gambar 6. Kantor Bali TNGMb Kab. Semarang	56
Gambar 7. Struktur Organisasi Balai TNGMb	57
Gambar 8. Peta Situasi Kawasan TNGMb	62
Gambar 9. Peta Zonasi TNGMb	64
Gambar 10. Zona pemanfaatan untuk pendakian, wisata alam, dan sumber air.	67
Gambar 11. Zona tradisional untuk rumput	68
Gambar 12. Peta Zonasi Kawasan TNGMb	69
Gambar 13. Papan peringatan di zona inti dan rimba.....	70
Gambar 14. Daerah Enclave Dusun Ngelelo Desa Batur	72
Gambar 15. Gambar Daerah Enclave Dusun Seloduwur dan Thekelan	72
Gambar 16. MMP yang sedang patroli sore di wisata alam	78
Gambar 17. Wisata Alam Kopeng Treetop	82
Gambar 18. Wisata Alam Spekta Merbabu	83
Gambar 19. Masyarakat memanfaatkan rumput untuk ternak.....	86
Gambar 20. Masyarakat akan memanfaatkan kayu bakar	88
Gambar 21. Pemanfaatan sumber air dari hutan	90
Gambar 22. Jaring agar monyet tidak masuk lahan.....	93
Gambar 23 Diskusi antar masyarakat.....	95
Gambar 24. Lokal tradisi Masyarakat Desa Batur	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, khususnya taman nasional, tidak pernah terlepas dari relasi yang kompleks antara upaya pelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Isu pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia telah menjadi tantangan multidimensional yang melibatkan aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan politik secara simultan. Kawasan konservasi, termasuk taman nasional, dibentuk atas dasar kebutuhan untuk melindungi keanekaragaman hayati, menjaga fungsi ekologis hutan, dan memastikan keberlangsungan sistem penyangga kehidupan dalam jangka panjang (KLHK, 2020). Namun, dalam praktiknya, kebijakan konservasi sering kali berbenturan dengan realitas sosial masyarakat yang telah lama hidup berdampingan dengan alam dan bergantung pada sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb), yang secara administratif mencakup wilayah Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Magelang, merupakan kawasan konservasi yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati serta menjaga sistem penyangga kehidupan. Salah satu wilayah yang menjadi bagian dari kawasan ini adalah Desa Batur, Masyarakat Batur memiliki hubungan yang erat dan historis dengan sumber daya alam yang tersedia di kawasan tersebut. Sumber daya seperti lahan pertanian, air, dan hasil hutan menjadi penopang kehidupan mereka. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di kawasan Gunung merbabu seperti air, hutan, hasil hutan, dan pemanfaatan wisata alam memberikan penghidupan kepada masyarakat. Kehidupan masyarakat Desa Batur secara homogen bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Sehingga masih membutuhkan air untuk kebutuhan pengairan dan hasil hutan seperti rumput untuk pakan ternak. Masyarakat juga sebagian masih ada yang menggunakan kayu bakar untuk memasak (Ajizah & Handoyo, 2018).

Namun sejak penetapan kawasan hutan Gunung Merbabu sebagai taman nasional, telah terjadi pembatasan akses masyarakat terhadap lahan dan sumber daya yang sebelumnya digunakan secara tradisional oleh masyarakat (Balai TNGMb, 2024). Zonasi taman nasional yang membagi wilayah ke dalam zona inti, rimba, pemanfaatan, dan rehabilitasi, turut mengubah pola relasi masyarakat dengan hutan. Kegiatan yang sebelumnya dianggap wajar kini dikategorikan sebagai pelanggaran, menimbulkan ketegangan antara kepentingan konservasi dan kebutuhan dasar masyarakat (Fitriana, 2015). Oleh karena itu, masyarakat di Desa Batur dihadapi dengan tantangan dalam menyesuaikan diri dengan regulasi Taman Nasional.. Fakta yang ditemukan di masyarakat muncul kompleksitas permasalahan karena praktik pengelolaan Taman Nasional sering kali menimbulkan dinamika sosial di kalangan masyarakat lokal yang tinggal di wilayah tersebut. Misalnya, seperti yang dikatakan salah satu masyarakat Desa Batur mengenai praktik pengelolaan Taman Nasional tentang pembatasan akses masyarakat setempat terhadap sumber daya alam. Masyarakat di lereng Gunung Merbabu pada saat sebelum Taman Nasional mengelola hutan dengan leluasa melakukan aktivitas di sekitar hutan, seperti mencari rumput untuk hewan ternak, mengambil kayu bakar, bercocok tanam di hutan serta aktivitas - aktivitas yang lainnya. Setelah penetapan pengelolaan kawasan hutan oleh Taman Nasional, masyarakat setempat merasa terbatas dalam melakukan aktivitas di hutan karena adanya aturan zonasi yang mengatur penggunaan kawasan tersebut.

Penuturan lain dari salah satu warga menggambarkan bahwa masyarakat juga merasa dirugikan dengan aturan perlindungan satwa oleh pengelola Taman Nasional. Pada praktiknya satwa - satwa yang dilindungi pihak Taman Nasional di hutan seperti Monyet Ekor Panjang turun ke wilayah pertanian warga untuk merusak dan mengambil hasil tanam petani dan masyarakat tidak mampu melakukan apapun karena Monyet Ekor Panjang tersebut termasuk dalam jenis satwa yang hidup dalam hutan kawasan konservasi. Bagi pengelola taman nasional yang berpedoman pada regulasi konservasi alam, mengatakan jika semua yang ada di dalam kawasan konservasi itu di lindungi. Apabila melakukan perusakan atau pemusnahan terhadap apa yang ada dalam hutan konservasi maka akan berhadapan dengan hukum formal. Oleh karena itu, masyarakat menilai jika aturan

konservasi fauna belum diimbangi dengan ketersediaan pangan fauna di hutan sehingga menimbulkan kekacauan dengan turunnya satwa ke ladang pertanian masyarakat.

Hasil prariset yang telah dilakukan dari situasi yang sedang dihadapi Masyarakat Batur ini, terungkap jika masyarakat Batur merespon dengan tidak bersikap pasif, melainkan aktif menjalin komunikasi dengan pihak luar, termasuk pemerintahan, LSM lingkungan, dan civitas akademika dari perguruan tinggi. Salah satu bentuk nyata banyak Masyarakat Desa Batur yang aktif dalam diskusi organisasi masyarakat berdiskusi mengenai solusi alternatif seperti konservasi berbasis kolaborasi bersama, merencanakan aksi protes, pengumpulan dan penguatan massa, serta mendistribusikan wacana ke masyarakat lainnya. Realitas ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Batur memiliki kapasitas untuk bertindak rasional secara sosial, sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan individualisme metodologis James S. Coleman. Mereka mempertimbangkan nilai jangka panjang dari pelestarian hutan, sekaligus mencari jalan agar tetap memperoleh manfaat ekonomi yang sah dan berkelanjutan.

Berdasarkan penuturan warga Desa Batur lainnya mengungkapkan jika pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu memang telah membawa manfaat seperti pelestarian lingkungan, namun juga menciptakan tantangan bagi masyarakat desa sekitar kawasan. Masyarakat lokal yang sebelumnya mengandalkan kawasan hutan untuk menyokong kehidupan Masyarakat, kini masyarakat menghadapi kesulitan karena aturan batasan yang diterapkan oleh pihak Taman Nasional Kawasan Gunung Merbabu. Hal ini berdampak pada penghasilan dan keberlanjutan hidup mereka. Pemanfaatan hasil hutan seperti kayu bakar, rumput, atau sumber daya lainnya menjadi terbatas. Selain itu masyarakat juga merasakan minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Terdapat anggapan Masyarakat bahwa aturan konservasi juga terlalu membatasi aktivitas tradisional masyarakat tanpa memberikan solusi yang cukup untuk mengimbangi kehilangan tersebut.

Penelitian yang akan dilakukan ini berfokus pada respon masyarakat terhadap praktik pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu di wilayah Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Respon masyarakat Desa Batur terhadap praktik pengelolaan Taman Nasional kawasan Gunung Merbabu dapat diuraikan dengan menggunakan kerangka teori pilihan rasional dari James S. Coleman dimana setiap individu bertindak menurut sumber daya yang terbatas atau berbeda - beda tetapi mereka

tetap rasional dalam mengambil tindakan baik dengan berbagai pilihan menerima, menolak, maupun menyesuaikan diri melalui praktik alternatif yang sesuai dengan aturan konservasi. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktik dari pengelolaan Taman Nasional di kawasan Gunung Merbabu, serta untuk memahami bagaimana respon masyarakat Desa Batur menanggapi praktik pengelolaan Taman Nasional kawasan Gunung Merbabu. Secara pilihan rasional mereka juga mengupayakan langkah - langkah yang harus diambil berdasarkan kebermanfaatan masyarakat. Respon masyarakat Desa Batur terhadap praktik pengelolaan Taman Nasional kawasan Gunung Merbabu terlihat melalui beberapa bentuk respon masyarakat seperti, upaya planning advokasi, dialog dengan pengelola, hingga perlawanan terhadap aturan pengelolaan tertentu.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka penelitian ini akan membahas dua rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Berikut adalah rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu di kawasan Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang ?
2. Bagaimana respon masyarakat yang tinggal di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang terhadap praktik pengelolaan Taman Nasional kawasan Gunung Merbabu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka tujuan penulisan yang disusun oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami praktik pengelolaan Taman Nasional kawasan Gunung Merbabu khususnya di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat yang tinggal di Desa Batur, Getasan, Kabupaten Semarang terhadap praktik pengelolaan Taman Nasional kawasan Gunung Merbabu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian dapat dipahami dari dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut yang penulis uraikan dalam skripsi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

- a. Secara teoritik pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk studi-studi sejenis serta berkontribusi dalam memperluas pengetahuan bagi para pembaca mengenai respon masyarakat terhadap praktik pengelolaan Taman Nasional Kawasan Gunung Merbabu khususnya di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keilmuan di bidang sosial serta keahlian dalam berpikir dan bertindak.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, diharapkan melalui penelitian ini dapat mengajak pembaca dalam pengambilan keputusan yang baik sebagai masyarakat yang rasional.
- b. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sesama melalui proses respon masyarakat.
- a. Penelitian ini dapat dijadikan pedoman tentang bagaimana respon masyarakat yang berkembang pada aspek sosial sehingga dapat bermanfaat sebagai partisipasi masyarakat terhadap makhluk sosial yang baik.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan untuk memperkaya bahan rujukan dalam penelitian, dengan cara peneliti melakukan *literature review* yang telah ditulis oleh peneliti terdahulu. Studi literatur masih berkaitan dan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Berikut di bawah ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dikaji.

1. Respon Masyarakat

Kajian respon masyarakat dikaji oleh beberapa peneliti, diantaranya yaitu penelitian tentang respon masyarakat terhadap taman nasional di Indonesia mengungkap hubungan yang kompleks antara populasi lokal dan kawasan lindung. Studi yang dilakukan oleh Nurrani & Tabba (2013) di Taman Nasional Aketajawe Lolobata menunjukkan berbagai tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan, dengan kesadaran terbatas tentang keberadaan taman nasional. Selanjutnya penelitian oleh Fitriana (2015) menunjukkan bahwa masyarakat yang telah lama tinggal di wilayah konservasi menunjukkan tiga pola respon utama yaitu

penerimaan dengan adaptasi, partisipasi kritis, dan resistensi pasif. Respon ini berkaitan erat dengan sejauh mana masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan serta adanya jaminan atas keberlanjutan penghidupan mereka.

Sementara itu, studi dari Suharto (2018) menemukan bahwa persepsi positif terhadap konservasi muncul ketika masyarakat mendapatkan manfaat langsung, seperti dari program ekowisata, kemitraan konservasi, atau pemberdayaan ekonomi lokal. Sebaliknya, respon negatif muncul ketika kebijakan konservasi membatasi akses terhadap sumber daya hutan yang sebelumnya menjadi tumpuan ekonomi rumah tangga. Penelitian lain oleh Wulandari & Suryawan (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa respon masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pendekatan kebijakan, tetapi juga oleh relasi sosial antar aktor lokal. Masyarakat yang memiliki jaringan kuat dengan tokoh adat atau kelompok petani hutan cenderung merespons lebih adaptif dan kooperatif. Respon ini bersifat kolektif dan sering kali didasarkan pada kearifan lokal, seperti praktik pelestarian hutan berdasarkan nilai budaya turun-temurun. Dalam konteks Jawa Tengah, studi oleh Nurhadi (2017) meneliti respon masyarakat di sekitar Taman Nasional Karimunjawa dan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program konservasi meningkat ketika terdapat jaminan kepastian hukum atas lahan dan ruang hidup, serta ketika masyarakat dilibatkan secara penuh sejak tahap perencanaan hingga implementasi.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, penelitian di atas mempunyai persamaan terkait respon masyarakat yang menjadi pondasi awal serta memiliki keterkaitan fenomena sosial dalam menanggapi sistem sosial. Letak perbedaan yang akan peneliti kaji yaitu lokasi dalam penelitiannya di Desa Batur, Getasan, Kabupaten Semarang selain itu bahasan penelitian ini juga menjelaskan bagaimana praktik pengelolaan Taman Nasional di kawasan Gunung Merbabu dan bagaimana respon masyarakat terhadap praktik pengelolaan Taman Nasional baik pengambilan keputusan masyarakat melalui pilihan – pilihan rasional maupun strategi yang akan masyarakat Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang lakukan agar menghasilkan kebermanfaatan bersama. Respon masyarakat juga bukan sekadar reaksi spontan terhadap kebijakan, melainkan bentuk tindakan rasional dan sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman, kepentingan ekonomi, dan nilai-nilai lokal. Kajian pustaka ini

menjadi landasan penting dalam memahami respon masyarakat Desa Batur terhadap praktik pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu, terutama dalam konteks enclave yang memiliki keterikatan historis dengan hutan.

2. Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu

Kajian mengenai pengelolaan Taman Nasional di kawasan Gunung Merbabu sudah dikaji oleh beberapa peneliti, diantaranya Sadono (2013); Gunawan, dkk (2013); Aissiyah, dkk (2020); dan Wijayanti & Riyanta (2020). Penelitian Sadono (2013) menjelaskan pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan konservasi dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi lokal dalam pengelolaan hutan juga dibatasi oleh tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah, sehingga bentuk berkontribusi masyarakat hanya melalui ide/saran dan tenaga kerja. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Gunawan, dkk (2013) menyebutkan jika pengelolaan Taman Nasional Kawasan Gunung Merbabu menjadi salah satu dari beberapa taman nasional di Indonesia yang mengalami tekanan dari penduduk di sekitarnya.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Aissiyah, dkk (2020) mengemukakan jika meskipun ada peraturan zonasi oleh pengelola Taman Nasional, masyarakat terus menggunakan sumber daya taman untuk subsisten, seperti pengumpulan rumput dan kayu bakar. Pemanfaatan ini dipengaruhi oleh faktor budaya (91%) dan ekonomi (17,8%). Selanjutnya penelitian oleh Wijayanti & Riyanta (2020) yang memiliki hasil penelitian bahwa pada pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi mengalami tantangan, di mana zonasi secara efektif mengatur kegiatan tetapi berjuang dengan penggembalaan liar dan perambahan. Studi-studi ini menyoroti kebutuhan yang berkelanjutan untuk pendekatan manajemen yang seimbang yang membahas tujuan konservasi dan mata pencaharian masyarakat di taman nasional Indonesia.

Kajian-kajian yang telah dijelaskan meskipun terdapat kesamaan lokus penelitian tentang pengelolaan Taman Nasional di kawasan Gunung Merbabu Merbabu, namun penelitian ini akan fokus pada bagaimana praktik pengelolaan Taman Nasional di kawasan Gunung Merbabu Desa Batur dan bagaimana rasionalitas Masyarakat Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang menanggapi praktik pengelolaan Taman Nasional di kawasan Gunung Merbabu dengan perspektif

Teori Pilihan Rasional James S. Coleman. Proses penelitian ini memerlukan kerja sama dengan salah satunya Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok tani dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan studi-studi sejenis yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga menjadi menarik untuk diteliti dan dijadikan bahan penulisan.

F. Kerangka Teori

Bagian ini peneliti menjelaskan kerangka teori untuk mempertajam analisis terhadap permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Pembahasan terkait kerangka teori dibagi menjadi dua, yaitu definisi konseptual dan landasan teori dalam penyesuaian penelitian ini, akan dijelaskan lebih detail pada pembahasan berikut di bawah ini:

1. Definisi Konseptual

a. Respon masyarakat

Respon masyarakat merupakan bentuk tanggapan kolektif maupun individual dari warga terhadap suatu kebijakan, program, atau perubahan sosial yang berdampak pada kehidupan mereka. Dalam konteks studi sosiologis, respon ini tidak hanya dipahami sebagai reaksi spontan, tetapi sebagai hasil dari proses interpretasi, penilaian, dan pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman, nilai, serta kepentingan yang dimiliki masyarakat. Respon masyarakat dapat berbentuk penerimaan, penyesuaian (adaptasi), resistensi, hingga partisipasi aktif, tergantung pada sejauh mana kebijakan atau program yang diterapkan bersinggungan dengan kepentingan dan struktur sosial yang ada (Setiawan, 2018).

Menurut Nurhadi (2017), respon masyarakat terhadap kebijakan konservasi sering kali dipengaruhi oleh pengetahuan lokal yang telah terbentuk secara turun-temurun, serta persepsi mereka terhadap manfaat langsung maupun risiko dari kebijakan tersebut. Dalam wilayah konservasi seperti taman nasional, masyarakat yang sebelumnya memiliki akses bebas terhadap sumber daya alam mengalami perubahan signifikan dalam sistem kehidupan mereka, yang kemudian memunculkan berbagai bentuk respon yang bersifat adaptif maupun reaktif. Masyarakat Batur yang tinggal di lereng Gunung Merbabu Kabupaten Semarang

memiliki pilihan dalam bertindak sebagai bentuk respon terhadap praktik pengelolaan Taman Nasional di kawasan Gunung Merbabu yang bertujuan menjaga lingkungan. Keputusan yang diambil masyarakat dalam berinteraksi dengan praktik pengelolaan taman nasional mencerminkan sejauh mana mereka memahami, menerima, atau bahkan menolak praktik pengelolaan Taman Nasional di kawasan Gunung Merbabu yang diterapkan.

Respon masyarakat juga dapat dipahami melalui pendekatan rasionalitas tindakan, seperti dijelaskan oleh Coleman (2011), yang memandang bahwa setiap individu bertindak berdasarkan pertimbangan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, masyarakat Batur merespon praktik pengelolaan taman nasional tidak secara emosional atau impulsif, tetapi berdasarkan evaluasi terhadap keuntungan, risiko, dan kemungkinan yang ditawarkan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, respon masyarakat tidak bisa dianggap seragam, melainkan merupakan cerminan dari pilihan rasional yang diambil dalam kondisi sosial dan ekonomi tertentu. Dengan demikian, memahami respon masyarakat memerlukan analisis yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga struktural, di mana perilaku masyarakat dilihat sebagai bagian dari relasi sosial dengan institusi negara, norma lokal, dan struktur ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka (Wahyudi, 2021). Dalam penelitian ini, respon masyarakat akan dikaji sebagai bentuk rasionalitas tindakan dalam menyikapi praktik pengelolaan kawasan konservasi di Desa Batur.

b. Praktik pengelolaan

Secara umum, pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki sesuatu sehingga nilainya menjadi lebih tinggi dari pada sebelumnya. Atmosudirjo (2005) mendefinisikan pengelolaan sebagai usaha untuk mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya yang diperlukan dalam suatu perencanaan guna mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, Atmosudirjo menekankan bahwa pengelolaan berfokus pada proses pengendalian dan pemanfaatan sumber daya secara optimal guna merealisasikan tujuan yang telah dirancang sebelumnya.

Praktik pengelolaan tidak hanya berbentuk aturan atau kebijakan teknokratik, tetapi juga mencakup bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan dan berinteraksi dengan dinamika sosial masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Ribot & Peluso (2003), pengelolaan sumber daya alam selalu melibatkan relasi kekuasaan dan akses, di mana aktor-aktor lokal tidak sekadar tunduk, tetapi juga merespon, menegosiasi, atau bahkan membentuk ulang kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, dalam studi ini, praktik pengelolaan tidak dilihat sebagai konsep netral, tetapi sebagai bentuk interaksi antara institusi pengelola taman nasional dan masyarakat lokal yang dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai budaya, serta relasi ekonomi - politik.

Dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi, praktik pengelolaan merujuk pada serangkaian tindakan dan kebijakan yang diterapkan oleh otoritas pengelola untuk mengatur, menjaga, dan memanfaatkan suatu wilayah berbasis prinsip keberlanjutan, konservasi, dan perlindungan terhadap ekosistem. Pengelolaan ini mencakup perencanaan zonasi kawasan, pelaksanaan patroli, penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat lokal, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti swasta, lembaga adat, dan pemerintah daerah (Satria, 2009). Dengan demikian, dalam penelitian ini, praktik pengelolaan dipahami sebagai kombinasi antara strategi institusional dan praktik lapangan yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara perlindungan ekologis dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat, termasuk bagaimana masyarakat merespon kebijakan tersebut secara rasional.

c. Taman Nasional Gunung Merbabu Kabupaten Semarang

Taman Nasional kawasan Gunung Merbabu adalah kawasan pelestarian alam yang terletak di lereng Gunung Merbabu Kabupaten Semarang, meliputi area seluas sekitar 5.725 hektar. Boyolali, Magelang, dan Kabupaten Semarang merupakan tiga kabupaten yang secara administratif menjadi bagian dari wilayah Taman Nasional di Provinsi Jawa Tengah. Penetapan kawasan ini sebagai taman nasional dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 135/Menhut-II/2004 pada tanggal 4 Mei 2004, dengan tujuan melindungi

ekosistem, flora, dan fauna yang ada serta menjaga keberlanjutan sumber mata air bagi masyarakat sekitar (Rhama, 2019).

Taman Nasional Gunung Merbabu berperan sebagai habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna yang dilindungi serta menjadi sumber air penting yang mendukung kehidupan masyarakat di sekitarnya. Wilayah ini juga menyimpan potensi wisata alam dan budaya yang menarik, menjadikannya salah satu destinasi ekowisata utama di Indonesia. Pengelolaan taman nasional ini diterapkan melalui sistem zonasi yang membagi wilayahnya menjadi beberapa area, antara lain zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona tradisional. Pembagian zona tersebut bertujuan untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Rhama, 2019)

Dari urgensi peran Taman Nasional dalam menjaga ekosistem dan mendukung keberlanjutan masyarakat, maka melalui pengelolaan yang optimal Taman Nasional Gunung Merbabu diharapkan mampu berperan tidak hanya sebagai kawasan tempat pelestarian keanekaragaman hayati, tetapi juga sebagai pengelola hutan yang memperhatikan masyarakat lokal sekitar hutan. Oleh karena itu, taman nasional memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Taman Nasional Gunung Merbabu juga bukan hanya sekadar kawasan konservasi, tetapi juga merupakan simbol upaya perlindungan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat sekitar serta pelestarian keanekaragaman hayati (Daulay, 2019).

2. Teori Pilihan Rasional James S. Coleman

a. Asumsi Dasar Teori Pilihan Rasional James S. Coleman

Teori Pilihan Rasional yang dikemukakan oleh James S. Coleman didasarkan pada asumsi bahwa individu bertindak secara sengaja dengan tujuan tertentu yang dibentuk oleh nilai-nilai atau preferensi yang dimilikinya (Coleman, 2011). Kemudian Coleman mengkonseptualisasikan aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi sebagai agen rasional yang membuat keputusan berdasarkan perhitungan keuntungan, atau pemuasan kebutuhan guna memaksimalkan

kepentingannya. Coleman mengembangkan teori ini dalam upaya menjembatani hubungan antara tindakan individu dan fenomena sosial secara lebih luas. Dalam perspektif Coleman, Masyarakat terbentuk dari kumpulan individu yang masing-masing memiliki kepentingan dan sumber daya tertentu. Keputusan yang diambil oleh individu selalu berorientasi pada pencapaian tujuan yang dianggap menguntungkan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, struktur sosial yang lebih besar merupakan hasil dari interaksi rasional antara individu yang berusaha mencapai kepentingannya masing-masing (Ritzer & Goodman 2019).

Teori pilihan rasional Coleman didasarkan pada sejumlah asumsi dasar yang membentuk kerangka analisisnya. Salah satu asumsi dasar teori pilihan rasional adalah individualisme metodologis. Asumsi ini menyatakan bahwa individu merupakan unit analisis utama dalam memahami perilaku sosial. Artinya, perilaku sosial dapat dipahami dengan menganalisis pilihan-pilihan yang dilakukan oleh individu, dan bagaimana pilihan-pilihan tersebut terhubung dengan tindakan dan interaksi mereka dengan orang lain. Asumsi kedua yang mendasari teori pilihan rasional adalah rasionalitas. Asumsi ini menyatakan bahwa individu bertindak secara rasional untuk memaksimalkan utilitas mereka. Utilitas didefinisikan sebagai nilai atau kepuasan yang diperoleh individu dari suatu tindakan. Artinya, individu akan memilih tindakan yang menurut mereka akan memberikan hasil yang paling menguntungkan bagi mereka. Asumsi ketiga yang mendasari teori pilihan rasional adalah asumsi tujuan. Asumsi ini menyatakan bahwa individu memiliki tujuan atau preferensi yang jelas. Preferensi ini memandu pilihan mereka dan menentukan tindakan mereka (Coleman 2011).

Inti dari teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh James S. Coleman adalah bahwa aktor merupakan individu yang melakukan tindakan dengan tujuan tertentu, di mana tindakan tersebut dipilih secara rasional untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya demi mencapai tujuan tersebut. Aktor dianggap memiliki kesadaran dan pertimbangan mendalam dalam menentukan pilihannya, serta mengendalikan sumber daya yang dianggap penting untuk mendukung tindakannya. Dengan demikian, tindakan aktor bersifat purposif dan

berorientasi pada pencapaian hasil yang diinginkan sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka.

b. Konsep Kunci Teori Pilihan Rasional James S. Coleman

Konsep kunci dalam teori pilihan rasional James S. Coleman adalah aktor dan sumber daya.

1. Aktor

Aktor dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau bahkan negara. Mereka merupakan entitas yang melakukan tindakan dan membuat pilihan berdasarkan preferensi dan utilitas mereka. Menurut Coleman, individu adalah aktor yang rasional dalam mengambil keputusan. Mereka mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan dan memilih yang paling menguntungkan berdasarkan preferensi dan tujuan mereka. Pilihan yang dibuat individu dipengaruhi oleh sumber daya yang mereka miliki dan kendala eksternal, seperti aturan sosial, ekonomi, dan politik (Coleman, 2011).

Setiap aktor memiliki dan memanfaatkan sumber daya yang dapat menarik perhatian pihak lain, sehingga ketika terjadi interaksi di antara mereka, muncullah hubungan satu sama lain yang membutuhkan. Namun, pencapaian tujuan bersama tidak selalu terwujud jika ketersediaan sumber daya terbatas. Kurangnya sumber daya ini dapat menjadi penghalang dan membatasi ruang gerak aktor dalam bertindak. Selain itu, akses setiap aktor terhadap sumber daya juga berbeda-beda, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, setiap aktor akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan kepentingannya (Ritzer & Goodman, 2019).

Berdasarkan orientasinya pada tindakan rasional individu, Coleman (2011) menitikberatkan pada hubungan antara tingkat mikro dan makro, yaitu bagaimana akumulasi tindakan individu dapat membentuk perilaku sistem secara keseluruhan. Meskipun fokus utamanya pada proses dari mikro ke makro, Coleman juga memperhatikan bagaimana sistem sosial yang telah terbentuk di tingkat makro dapat membatasi atau memengaruhi orientasi dan tindakan para aktor di tingkat mikro. Penjelasan mengenai teori pilihan rasional ini kemudian

dilanjutkan dengan pembahasan tentang interaksi antara aspek-aspek makro dan mikro, yang pada akhirnya melahirkan perilaku dalam sistem sosial. Dalam penerapannya, Coleman membagi unsur-unsur pada sektor makro menjadi beberapa bagian, salah satunya adalah perilaku kolektif, norma, dan aktor korporat.

a. Perilaku Kolektif

Coleman berargumen bahwa teori pilihan rasional dapat menjelaskan berbagai fenomena di tingkat makro, termasuk perilaku kolektif. Meskipun perilaku kolektif sering kali bersifat kacau dan tidak stabil, Coleman menegaskan bahwa semua fenomena makro, baik yang teratur maupun tidak, dapat dijelaskan melalui kerangka pilihan rasional. Pada awalnya, setiap individu memegang haknya sendiri, namun seiring berjalannya waktu, secara bertahap mereka tidak lagi dapat mempertahankan hak tersebut secara penuh. Sebagian hak kemudian dialihkan kepada individu lain. Proses perpindahan hak ini, yang menyebabkan terbentuknya sistem perilaku kolektif yang dinamis dan tidak terkendali, terjadi karena transfer kendali atas tindakan seorang aktor kepada aktor lain secara sepihak, tanpa melalui mekanisme pertukaran (Ritzer & Goodman, 2019).

b. Norma

Lembaga sosial memiliki fungsi dalam menciptakan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghalangi aktor dalam mencapai tujuannya. Coleman menyatakan bahwa norma-norma ini muncul, dijaga, dan diprakarsai oleh individu-individu yang menyadari manfaat dari kepatuhan masyarakat terhadap norma tersebut. Meskipun sebagian besar sosiolog melihat norma sebagai faktor yang menjelaskan perilaku individu, Coleman lebih fokus pada bagaimana norma muncul dan dipertahankan di antara kelompok aktor yang bertindak secara rasional. Ia berpendapat bahwa norma merupakan hasil inisiatif beberapa orang yang menyadari adanya manfaat dari kepatuhan terhadap norma serta kerugian yang timbul akibat pelanggaran. Dalam proses ini, individu cenderung melepaskan sebagian kendali atas perilakunya sendiri, namun di sisi lain

mereka juga memperoleh kendali atas perilaku orang lain (Ritzer & Goodman, 2019)

c. Aktor korporat

Konsep aktor korporat (*corporate actor*) merupakan salah satu elemen kunci yang membedakan antara individu sebagai agen rasional dan entitas yang lebih besar yang memiliki kapasitas bertindak seperti individu. Coleman membedakan antara aktor individu dan aktor korporat, di mana aktor korporat adalah kelompok atau institusi yang memiliki tujuan kolektif dan bertindak sebagai satu kesatuan dalam pengambilan keputusan. Konsep ini menjelaskan bahwa seorang aktor tidak bisa semata-mata bertindak berdasarkan kepentingan pribadinya saja, melainkan juga harus mempertimbangkan kepentingan kolektif. Namun, dalam perspektif teori pilihan rasional, baik aktor korporat maupun individu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Struktur korporat dalam suatu organisasi memungkinkan keberadaan individu-individu yang memiliki tujuan pribadi yang beragam dan tidak selalu sejalan dengan tujuan korporat itu sendiri (Ritzer & Goodman, 2019).

2. Sumberdaya

Sumberdaya atau *resource* merupakan segala hal yang dapat dimanfaatkan oleh aktor untuk mewujudkan tujuan mereka. Sumberdaya dapat berupa modal, informasi, kekuasaan, dan lain sebagainya. Modal dapat berupa uang, aset, atau teknologi. Informasi dapat berupa pengetahuan, data, atau wawasan. Kekuasaan dapat berupa kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan orang lain (Coleman 2011). Sumberdaya ini yang menentukan sejauh mana individu bisa bertindak secara rasional dan aktor menggunakan sumber daya mereka untuk memaksimalkan utilitas mereka dan mencapai tujuan mereka. Coleman juga menguraikan secara mendetail bagaimana interaksi antara aktor dan sumber daya berkembang hingga mencapai tingkat sistem sosial. (Ritzer & Goodman, 2019).

3. Rasionalitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Perspektif Islam

Lingkungan merupakan tempat tinggal sekaligus sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Manusia, sebagai bagian dari makhluk hidup, sering memanfaatkan

lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan alam telah diciptakan oleh Allah dengan keseimbangan dan keselarasan yang menghubungkan berbagai makhluk hidup satu sama lain (Yunita, 2020). Manusia wajib menjaga kelestarian ekosistem secara seimbang dan logis dalam memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini sekaligus menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang. Pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada logika dan akal sehat mengandung tujuan yang tegas dan mudah dimengerti dalam ajaran Islam. Sebagai agama yang komprehensif, Islam juga mengatur tata cara manusia dalam mengelola lingkungan, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ
فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku akan menciptakan seorang khalifah di bumi." Para malaikat menjawab, "Apakah Engkau bermaksud menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi, sementara kami selalu bertasbih memuji dan menyucikan nama-Mu?"*” Tuhan berfirman, *"Sesungguhnya Aku mengetahui hal-hal yang tidak kalian ketahui."*

Tafsir pandangan menurut Quraish Shihab, ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah di bumi dengan tugas untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan alam sesuai dengan kehendak serta tujuan penciptaan Allah. Allah mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan, diatur agar tercipta keseimbangan dan keharmonisan. Keseimbangan ini seharusnya dipertahankan supaya tidak terjadi kehancuran, karena setiap elemen dalam ekosistem saling berhubungan, jika satu terganggu, maka akan berdampak pada yang lain (Shihab, 1999).

Lingkungan, yang merupakan bagian integral dari eksistensi manusia, harus dianggap sebagai elemen ekosistem yang berharga, sehingga perlu dihormati, dilindungi, dan dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Integritas ini menunjukkan bahwa perilaku manusia terhadap lingkungan memiliki konsekuensi langsung,

sehingga manusia memegang kewajiban moral untuk bersikap baik dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam. Perbuatan baik akan menjaga kelestarian lingkungan, dan tindakan yang merusak akan mengakibatkan kehancuran alam. Pandangan *antroposentris* yang memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan. Perspektif ini menjadikan alam sebagai objek eksploitasi demi memenuhi kebutuhan manusia tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekosistem (Shihab, 1999).

Pengelolaan lingkungan penting dilakukan untuk menumbuhkan sikap yang lebih ramah dan menghargai alam. Manusia harus mampu memikirkan keberlanjutan lingkungan agar pemanfaatan lingkungan dirasakan oleh generasi berikutnya. Apabila manusia tidak sadar bahwa kerusakan lingkungan akan mengganggu kehidupan dan menimbulkan ketidaknyamanan, serta menyebabkan kerugian bagi dirinya. seperti datangnya berbagai bencana alam. Masyarakat yang tinggal di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang yang hidup berdampingan langsung dengan ekosistem hutan melakukan sebagaimana perintah mengelola lingkungan atas dasar sikap dari proses rasionalitas masyarakat dalam melestarikan hutan dan pemenuhan kebutuhan. Masyarakat dan Taman Nasional bersinergi untuk melakukan pengelolaan lingkungan di kawasan hutan Gunung Merbabu

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif merupakan metode yang berusaha menganalisis perspektif atau interpretasi. Metode kualitatif dalam suatu penelitian berupaya memahami bagaimana individu memandang, menginterpretasikan, atau mendeskripsikan dunia sosialnya (Sudaryono, 2017). Adapun pendekatan deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistis, aktual, dan terkini, karena penelitian ini bertujuan untuk menyajikan deskripsi, gambaran, atau representasi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, karakteristik, serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Nasution, 2023).

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya (Sugiyono, 2020). Data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumen secara langsung dalam melihat realitas di lapangan (Nugrahani, 2014). Pada penelitian ini observasi dilakukan dengan melihat secara langsung khususnya pada masyarakat yang tinggal di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang yang bertindak atas respon mengenai praktik pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu. Selain itu, wawancara dilakukan melalui informan yang dipilih berdasarkan pengalaman langsung dalam fenomena yang ada sehingga dapat memberikan data yang valid.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh bukan secara langsung dari lapangan., tetapi didapat dari sumber-sumber penelitian terdahulu, seperti jurnal, buku, skripsi, dokumen, gambar, dan data statistik (Sugiyono, 2020). Sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat digunakan dalam perannya sebagai sumber data pelengkap atau primer apabila tidak tersedia sebagai sumber data primer dari informan dari masyarakat yang tinggal di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun prosedur yang digunakan oleh peneliti dari proses pengumpulan data sebagai berikut ini :

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara menyeluruh terhadap suatu konteks tertentu tanpa mengubah apapun secara langsung pada objek penelitian dengan tujuan memandang dari dekat kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau peristiwa - peristiwa yang terjadi. Sehingga dapat dideskripsikan makna dan peran serta masyarakatnya (Nasution, 2023). Observasi dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan partisipasi aktif peneliti (*Participant observer*) yang terlibat langsung dalam menggali informasi mengenai rasionalitas masyarakat Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang terhadap praktik pengelolaan Taman Nasional

Gunung Merbabu. Peneliti akan mencatat seluruh rangkaian hasil pengamatan yang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara dalam buku yang ditulis oleh Yusuf (2014) adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian melalui interaksi langsung antara pewawancara dan narasumber melalui komunikasi tatap muka. Teknik wawancara terdiri dari tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur dilakukan ketika pewawancara merancang rencana wawancara secara rinci namun tidak mengikuti format atau urutan yang tetap. (Yusuf, 2014). Pada penelitian ini, digunakan metode wawancara yang bersifat tidak terstruktur dengan cara wawancara secara langsung kepada masyarakat yang tinggal di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball*. Teknik *snowball* merupakan cara pemilihan informan yang dimulai dari satu atau beberapa individu dan meluas dari hubungan pihak pertama yang diibaratkan sebagai bola salju yang menjadi bola besar (Nasution, 2023). Informan kunci dalam teknik *snowball* diperlukan karena mereka memiliki informasi lengkap mengenai isu yang diangkat. Adapun dalam penelitian ini informan kunci adalah bapak Sugiyono, selain beliau sebagai penduduk lokal di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang juga merupakan tokoh masyarakat yang menjadi Direktur Utama Bumdes Desa Batur, sekaligus inisiator atau aktivis perubahan. Selanjutnya informan akan dipilih berdasarkan saran/rekomendasi dari informan kunci. Target informan dalam penelitian ini sebanyak enam orang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan rekaman tentang peristiwa yang sudah berlangsung, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau foto, serta karya penting dari seseorang atau institusi (Sugiyono, 2020). Dokumen dalam bentuk tulisan yang mencakup catatan harian, cerita kehidupan, sejarah, biografi, peraturan, serta kebijakan. Sementara itu, dokumen dalam bentuk gambar meliputi foto, film, dan sketsa, dan sejenisnya. Dokumentasi yang berkaitan dengan individu atau kelompok, dan suatu peristiwa atau kejadian dalam konteks sosial yang sesuai dengan fokus penelitian, menjadi sumber informasi penting dalam penelitian

kualitatif. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan sumber data sekunder dari dokumentasi yang berupa tulisan atau peraturan terkait Taman Nasional yang telah dipublikasikan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan untuk mengolah data yang telah diperoleh peneliti dari narasumber atau hasil pengamatan di lapangan. Teknis analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis induktif. Analisis data induktif merupakan proses penarikan simpulan umum berdasarkan dari data atau informasi yang ada (Sugiyono, 2020). Analisis ini akan mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menganalisa mengenai rasionalitas masyarakat yang tinggal di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang terhadap praktik pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data terdiri dari tiga proses utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan / verifikasi kesimpulan. (Nasution, 2023). Ketiga langkah analisis data ini dapat dijelaskan lebih mendalam sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses analisis yang berfokus pada peringkasan atau pemusatan pada inti pokok, melibatkan pemilihan data yang penting (Nasution, 2023). Proses ini melibatkan pemilihan data utama yaitu pemilihan data yang relevan, serta penghapusan data yang tidak diperlukan. Sehingga hasil reduksi menyajikan penjelasan yang lebih rinci dan memudahkan pemahaman peneliti dalam mengelola informasi. Data yang direduksi meliputi hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi terkait rasionalitas masyarakat yang tinggal di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, terhadap praktik pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah tahap yang dilakukan setelah proses reduksi data. Tujuan dari penyajian data adalah merangkum dan menyusun berbagai informasi yang diperoleh dari informan serta hasil penelitian, sehingga memudahkan dalam penentuan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Dengan menyajikan data, peneliti mampu memahami situasi yang sedang berlangsung, melakukan analisis, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pemahaman tersebut

(Nasution,2023).

c. Kesimpulan/Verifikasi

Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman meliputi kegiatan menarik kesimpulan serta melakukan verifikasi. Kesimpulan awal yang dibuat bersifat sementara dan dapat diubah jika ditemukan bukti-bukti yang lebih kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika bukti yang diperoleh terbukti valid dan konsisten ketika peneliti melakukan pengumpulan data ulang di lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap dapat dipercaya atau kredibel (Nasution, 2023).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi berguna sebagai kemudahan dan pemahaman dalam acuan mengerjakan laporan skripsi serta memberikan gambaran komprehensif secara luas. Dengan demikian, berikut bagian-bagian yang terdapat dalam laporan skripsi.

BAB I Pendahuluan

Sistematika penulisan skripsi berguna sebagai kemudahan dan pemahaman dalam acuan mengerjakan laporan skripsi serta memberikan gambaran komprehensif secara luas. Dengan demikian, berikut bagian-bagian yang terdapat dalam laporan skripsi.

BAB II Rasionalitas masyarakat, Pengelolaan Taman Nasional, pengelolaan lingkungan dalam Perspektif Islam, Teori Pilihan Rasional James S. Coleman.

Bab ini memuat penjelasan terkait pernyataan istilah teori yang terbagi menjadi dua bagian yaitu, definisi konseptual yang berisi penjelasan tentang rasionalitas masyarakat, pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu, serta pengelolaan lingkungan dalam perspektif Islam, dan landasan teori pilihan rasional dari James S. Coleman.

BAB III Gambaran Umum Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dan Taman Nasional Kawasan Gunung Merbabu

Bab ini berisi uraian secara menyeluruh tentang gambaran fokus penelitian yang terdiri dari kondisi geografis, demografis, visi misi, tujuan, sejarah Desa Batur, Kecaamatan Getasan, Kabupaten Semarang dan gambaran umum mengenai Pengelola Taman Nasional Kawasan Gunung Merbabu

BAB IV Praktik Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu

Bab ini memuat penjelasan secara mendetail mengenai pelaksanaan praktik pengelolaan yang dilakukan oleh Taman Nasional kawasan Gunung Merbabu Kabupaten Semarang.

BAB V Rasionalitas masyarakat Desa Batur terhadap praktik pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu

Bab ini berisi penjelasan secara rinci mengenai rasionalitas masyarakat terhadap praktik pengelolaan Taman Nasional Kawasan Gunung Merbabu sehingga menjelaskan ada fenomena proses keputusan dari tindakan masyarakat melalui pilihan – pilihan yang ada untuk memanfaatkan ekosistem hutan.

BAB VI Penutup

Bab ini berisi rangkuman hasil dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran dan rekomendasi yang diberikan. Kesimpulan merupakan ringkasan utama yang mencakup jawaban secara empiris dan teoritis berdasarkan hasil penelitian. Sementara itu, saran atau rekomendasi adalah usulan yang disampaikan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Daftar Pustaka

Berisi daftar sumber kutipan yang digunakan dengan format penulisan sesuai dengan aturan baku.

Lampiran

Berisi daftar dokumen tambahan hasil dari suatu penelitian.

BAB II

RESPON MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL DALAM TEORI PILIHAN RASIONAL JAMES S. COLEMAN

A. Definisi Konseptual

1. Respon Masyarakat

Respon merupakan cara berpikir dan bertindak melalui proses pertimbangan. Respon mengacu pada keputusan atau perilaku seseorang yang dianggap wajar, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, serta didukung oleh bukti, fakta, dan aturan yang berlaku. Keberadaan tujuan itu sendiri dianggap sebagai sesuatu yang sudah pasti ada atau tidak dapat dihindari. Setiap individu pasti memiliki setidaknya satu tujuan. Misalnya, mempertahankan hidup adalah tujuan mendasar bagi semua individu. Selain itu, individu juga memiliki beragam tujuan lain dalam hidupnya. Semakin kompleks struktur sosial suatu individu, maka semakin beragam pula tujuan-tujuan yang dimilikinya. Dalam konteks masyarakat, rasionalitas berarti bertindak berdasarkan nalar dan norma yang diakui, serta memilih langkah yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan Bersama (Hidayat, 2016).

Rasionalitas masyarakat merupakan konsekuensi dari keputusan individu yang secara sadar dan rasional menentukan tindakan terbaik guna mencapai tujuan pribadi, dengan memperhitungkan keterbatasan sumber daya serta analisis keuntungan dan kerugian, yang pada akhirnya membentuk pola perilaku bersama dalam masyarakat (Kumalasari, 2019). James S. Coleman berpendapat jika rasionalitas dalam tindakan atau perilaku sosial terjadi ketika individu bertindak dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari pilihan yang tersedia, dengan tujuan memaksimalkan manfaat. Rasionalitas masyarakat merujuk pada cara individu atau kelompok dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan logis untuk mencapai tujuan tertentu dalam beberapa konteks kehidupan seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Coleman (2011) mengemukakan bahwa masyarakat tersusun dari individu-individu (aktor) yang bertindak dengan cara yang rasional demi mencapai tujuan masing-masing.

Menurut Coleman, rasionalitas berarti setiap individu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan secara logis, melakukan perhitungan antara keuntungan dan kerugian, serta memperhitungkan keterbatasan sumber daya yang mereka miliki (Coleman, 2011).

Masyarakat merupakan kelompok sosial yang terbentuk dari individu yang saling berinteraksi. Individu dalam bertindak memiliki pertimbangan – pertimbangan pilihan sebelum memutuskan tindakannya (Gunarti, 2017). Masyarakat Desa Batur yang tinggal di lereng Gunung Merbabu Kabupaten Semarang memiliki beberapa pilihan dalam merespon praktik pengelolaan Taman Nasional di kawasan Gunung Merbabu yang bertujuan untuk konservasi alam. Respon – respon yang masyarakat Desa Batur ditunjukkan dalam berinteraksi dengan praktik pengelolaan taman nasional yang mana itu mencerminkan bagaimana mereka memahami, menerima, atau bahkan menolak praktik pengelolaan Taman Nasional di kawasan Gunung Merbabu yang diterapkan melalui proses rasionalitas. Menurut Coleman, rasionalitas masyarakat seringkali dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, pengalaman sosial, serta pemahaman terhadap regulasi, yang pada akhirnya menentukan pola perilaku mereka terhadap lingkungan sekitarnya (Coleman, 2011).

2. Praktik pengelolaan

Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), praktik pengelolaan mengacu pada proses atau metode nyata dalam mengelola sesuatu. Hal ini meliputi pelaksanaan aktivitas tertentu, koordinasi tenaga kerja, perumusan kebijakan, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya. Lebih lanjut, praktik pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki sesuatu sehingga nilainya menjadi lebih tinggi dari pada sebelumnya. Selain itu, praktik pengelolaan juga dapat diartikan sebagai penerapan konsep atau teori dalam situasi nyata, seperti dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup. Atmosudirjo (2005) mendefinisikan praktik pengelolaan sebagai implementasi dari usaha untuk mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya yang diperlukan dalam suatu perencanaan guna mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, Atmosudirjo menekankan bahwa praktik pengelolaan berfokus pada proses

pengendalian dan pemanfaatan sumber daya secara optimal guna merealisasikan tujuan yang telah dirancang sebelumnya.

Merujuk pada tugas utama Taman Nasional Gunung Merbabu adalah konservasi alam, maka implementasi kebijakan konservasi oleh pihak pengelola Taman Nasional Gunung Merbabu tidak luput berdampak pada masyarakat Desa Batur yang tinggal disekitar lereng gunung. Praktik pengelolaan Taman nasional Gunung Merbabu kerap dikaitkan dengan usaha menyeimbangkan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Praktik ini meliputi upaya perlindungan ekosistem, pengaturan aksesibilitas sumber daya, keterlibatan masyarakat setempat, serta penerapan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan. Oleh karena itu, praktik pengelolaan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga memperhitungkan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mewujudkan tujuan jangka panjang yang berkelanjutan (Gunawati, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tugas pokok taman nasional, mencakup perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Praktik pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu selama ini didominasi oleh pendekatan konservasi alam yang menekankan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan yang berkelanjutan seringkali dengan membatasi interaksi masyarakat dengan kawasan hutan. Namun pada kenyataannya, pengelolaan belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi, serta belum terwujudnya kolaborasi yang harmonis antara pengelola dan masyarakat. Gejala sosial muncul karena masyarakat merasa hak akses mereka terhadap sumber daya alam dibatasi, sementara pengelola terikat oleh regulasi yang ketat. Upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan mulai dilakukan, namun peran masyarakat masih cenderung konsultatif dan belum sepenuhnya setara dalam pengambilan keputusan.

Tugas pokok taman nasional sebagai perlindungan satwa juga pada praktik pengelolannya mengalami dinamika sosial yang dirasakan Masyarakat Desa Batur. Sebagai contoh pada satwa Monyet Ekor Panjang (MEP) yang turun ke lahan pertanian warga untuk merusak dan memakan hasil tanam Masyarakat. Menurut salah satu Masyarakat Desa Batur di Dusun Ngelelo mengatakan jika jumlah

Monyet Ekor Panjang (MEP) yang turun tidaklah satuan namun bergelombolan hingga lima puluan, dan Monyet Ekor Panjang (MEP) turun ketika para petani ini pulang untuk beristirahat ketika ishoma. Dampak Monyet Ekor Panjang (MEP) ini cukup banyak dirasakan masyarakat Desa Batur di beberapa Dusun seperti, Ngelelo, Thekelan, Seloduwur, Gondang, Tawang, dan Batur Kidul. Masyarakat sendiri memiliki keinginan untuk membasmi Monyet Ekor Panjang (MEP) ini karena benar – benar memantik amarah masyarakat, namun karena Monyet Ekor Panjang (MEP) adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh berdasarkan regulasi pengelolaan Taman Nasional maka saat ini masyarakat merasakan kerugian hasil pertanian.

Menurut pihak pengelola Taman Nasional Gunung Merbabu Kabupaten Semarang yang peneliti temui, mengatakan jika pihaknya akan segera melakukan kajian untuk mencari tahu faktor Monyet Ekor Panjang (MEP) yang turun ke lahan pertanian masyarakat. Nantinya jika hasil kajian ini sudah ditemukan, maka selanjutnya akan ditindaklanjuti untuk menentukan langkah mencari solusi dari permasalahan ini. Pengelola Taman Nasional Gunung Merbabu Kabupaten Semarang Wilayah 1 Kopeng juga menambahkan informasi jika Monyet Ekor Panjang (MEP) ini dilarang untuk dibunuh seperti dalam kutipan percakapan di bawah ini.

" Ya nanti langkahnya seperti apa, ya kita belum tau karena masih dalam proses kajian. Yang jelas, sejatinya semua yang ada di dalam kawasan konservasi itu dilindungi" (Wawancara, Ibu Kristina Dewi, PEH Taman Nasional, 19 Mei 2025)

Apabila kondisi Monyet Ekor Panjang (MEP) yang melakukan gangguan terhadap manusia terus dibiarkan tanpa penanganan yang mampu, maka secara langsung akan meningkatkan kerugian masyarakat Desa Batur dari hasil pertanian dan muncul dampak negatif lain terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Desa Batur serta pada upaya konservasi satwa liar dan lingkungan di wilayah tersebut. Kondisi ini juga menimbulkan dilema bagi Masyarakat Desa Batur. Mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, misalnya antara menaati aturan

konservasi dengan tidak membunuh MEP atau mencari jalan lain yang berisiko demi menjaga kelangsungan hidup.

3. Pengelolaan Beberapa Taman Nasional di Indonesia

Pengelolaan taman nasional di Indonesia merupakan bagian integral dari kebijakan konservasi nasional yang bertujuan melindungi keanekaragaman hayati, menjaga fungsi ekologis, serta mengembangkan pemanfaatan berkelanjutan berbasis masyarakat dan pariwisata alam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, taman nasional dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), dengan pendekatan zonasi dan pelibatan masyarakat lokal. Salah satu contoh taman nasional dengan pengelolaan yang relatif berhasil adalah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. TNGL dikenal sebagai bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser yang merupakan habitat penting bagi spesies endemik seperti orangutan Sumatera. Pengelolaan TNGL tidak hanya fokus pada perlindungan satwa liar, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam konservasi melalui program kemitraan restorasi hutan dan peningkatan kapasitas ekonomi lokal (Laumonier, dkk 2020).

Contoh lain adalah Taman Nasional Baluran di Jawa Timur, yang dikenal sebagai “*Africa van Java*” karena savananya yang luas. Pengelolaan Baluran menekankan pada konservasi lanskap padang rumput dan hutan tropis kering, serta edukasi lingkungan dan wisata alam. Dalam beberapa tahun terakhir, pengelola Taman Nasional Baluran mengembangkan sistem pemantauan satwa liar berbasis kamera trap serta program konservasi in-situ untuk spesies seperti banteng Jawa (*Bos javanicus*), yang populasinya terancam (Sudarsono, 2019). Sementara itu, Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi Tenggara mewakili model konservasi laut yang mengintegrasikan pendekatan ekosistem dan kearifan lokal. Wilayah ini merupakan bagian dari segitiga terumbu karang dunia (*Coral Triangle*). Pengelolaan Wakatobi mencakup zonasi konservasi laut, penguatan kelembagaan komunitas nelayan, serta pembangunan pariwisata bahari berkelanjutan. Meskipun menghadapi tantangan dalam hal penegakan hukum terhadap penangkapan ikan

destruktif, partisipasi masyarakat melalui kelompok sadar konservasi telah membantu mengurangi tekanan terhadap sumber daya laut (Green, dkk 2011).

Selain itu, Taman Nasional Gunung Merbabu di Jawa Tengah memperlihatkan tantangan pengelolaan taman nasional yang wilayahnya tumpang tindih dengan permukiman masyarakat *enclave*, seperti di Desa Batur, Kabupaten Semarang. Di wilayah ini, pengelolaan berbasis zonasi konservasi ditransformasikan melalui program kemitraan, pengembangan ekowisata, serta edukasi masyarakat dalam praktik konservasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjembatani kepentingan konservasi dan kesejahteraan masyarakat (Wulandari & Suryawan, 2020). Dari berbagai contoh di atas, terlihat bahwa pengelolaan taman nasional di Indonesia sangat kontekstual, bergantung pada karakteristik ekologis, sosial, dan budaya masing-masing kawasan. Pengelolaan yang efektif cenderung bersifat adaptif dan partisipatif, dengan pelibatan masyarakat sebagai mitra strategis, bukan sekadar sebagai pihak yang dikendalikan. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dari konservasi eksklusif menuju konservasi yang berbasis keadilan sosial dan keberlanjutan ekosistem.

Berikut adalah tabel perbandingan pengelolaan beberapa Taman Nasional di Indonesia berdasarkan karakteristik ekologi, strategi pengelolaan, keterlibatan masyarakat, dan tantangan utama yang bersumber dari data sekunder.

Tabel 1 perbandingan pengelolaan Taman Nasional di Indonesia

Nama Taman Nasional	Karakteristik Ekologi	Strategi Pengelolaan	Keterlibatan Masyarakat	Tantangan Utama
Gunung Leuser (Aceh & Sumut)	Hutan hujan tropis, habitat orangutan, harimau, badak, gajah	Pengawasan intensif, zonasi ketat, kolaborasi dengan NGO	Program restorasi hutan, monitoring fauna bersama masyarakat	Perambahan hutan, konflik satwa

Baluran (Jawa Timur)	Savana tropis, padang rumput, hutan monsun	Patroli, konservasi banteng, wisata edukatif	Edukasi lingkungan, pelibatan pemuda lokal sebagai guide	Kekeringan, pembalakan liar
Wakatobi (Sulawesi Tenggara)	Terumbu karang, laut tropis, biodiversitas tinggi	Zonasi laut, larangan alat tangkap destruktif, wisata bahari	Kelompok sadar konservasi, pelatihan nelayan ramah lingkungan	Illegal fishing, rendahnya penegakan hukum
Gunung Merbabu (Jawa Tengah)	Pegunungan, hutan pegunungan bawah, <i>enclave</i> permukiman	Zonasi 4 wilayah (inti, rimba, pemanfaatan, rehabilitasi), kemitraan konservasi	Ekowisata, kemitraan, program edukasi konservasi	Konflik akses lahan, gangguan satwa liar (monyet)
Kerinci Seblat (Sumatera)	Hutan pegunungan, habitat harimau Sumatera	Pendekatan bentang alam, patroli SMART, monitoring harimau	Forum masyarakat desa penyangga, ekowisata	Fragmentasi habitat, perburuan liar

B. Teori Pilihan Rasional James S. Coleman

1. Asumsi Dasar

Teori Pilihan Rasional yang dikemukakan oleh James S. Coleman didasarkan pada asumsi bahwa individu bertindak secara sengaja dengan tujuan tertentu yang dibentuk oleh nilai-nilai atau preferensi yang dimilikinya (Coleman, 2011). Kemudian Coleman mengkonseptualisasikan aktor rasional yang berasal dari ilmu

ekonomi sebagai agen rasional yang membuat keputusan berdasarkan perhitungan keuntungan, atau pemuasan kebutuhan guna memaksimalkan kepentingannya. Coleman mengembangkan teori ini dalam upaya menjembatani hubungan antara tindakan individu dan fenomena sosial secara lebih luas. Dalam perspektif Coleman, Masyarakat terbentuk dari kumpulan individu yang masing-masing memiliki kepentingan dan sumber daya tertentu. Keputusan yang diambil oleh individu selalu berorientasi pada pencapaian tujuan yang dianggap menguntungkan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, struktur sosial yang lebih besar merupakan hasil dari interaksi rasional antara individu yang berusaha mencapai kepentingannya masing-masing (Ritzer & Goodman 2019).

Teori pilihan rasional Coleman didasarkan pada sejumlah asumsi dasar yang membentuk kerangka analisisnya. Salah satu asumsi dasar teori pilihan rasional adalah individualisme metodologis. Asumsi ini menyatakan bahwa individu merupakan unit analisis utama dalam memahami perilaku sosial. Artinya, perilaku sosial dapat dipahami dengan menganalisis pilihan-pilihan yang dilakukan oleh individu, dan bagaimana pilihan-pilihan tersebut terhubung dengan tindakan dan interaksi mereka dengan orang lain. Asumsi kedua yang mendasari teori pilihan rasional adalah rasionalitas. Asumsi ini menyatakan bahwa individu bertindak secara rasional untuk memaksimalkan utilitas mereka. Utilitas didefinisikan sebagai nilai atau kepuasan yang diperoleh individu dari suatu tindakan. Artinya, individu akan memilih tindakan yang menurut mereka akan memberikan hasil yang paling menguntungkan bagi mereka. Asumsi ketiga yang mendasari teori pilihan rasional adalah asumsi tujuan. Asumsi ini menyatakan bahwa individu memiliki tujuan atau preferensi yang jelas. Preferensi ini memandu pilihan mereka dan menentukan tindakan mereka (Coleman 2011).

Teori pilihan rasional berbeda dengan teori sosiologi lainnya terutama dari segi metodologi individualisme dan konsep pilihan sebagai proses optimasi. Metode individualisme digunakan untuk menjelaskan tindakan yang disengaja dan bertujuan. Pendekatan ini sering diterapkan dalam penelitian yang fokus pada perilaku individu, baik yang menghasilkan dampak sesuai harapan maupun yang tidak diinginkan. Tindakan rasional didasarkan pada asumsi bahwa seseorang

bertindak dengan pertimbangan logis, memiliki preferensi tertentu, dan membuat keputusan sesuai dengan preferensi tersebut. Ciri lain yang membedakan adalah bahwa pilihan dianggap sebagai proses optimasi. Menurut Heckarthon (2005), teori pilihan rasional berangkat dari konsep mikroekonomi klasik yang menyatakan bahwa individu berusaha memaksimalkan keuntungan, namun juga memperluas pemahaman tersebut dengan mempertimbangkan berbagai tujuan, baik yang egoistik maupun altruistik, yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. (Haryanto, 2016).

Inti dari teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh James S. Coleman adalah bahwa aktor merupakan individu yang melakukan tindakan dengan tujuan tertentu, di mana tindakan tersebut dipilih secara rasional untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya demi mencapai tujuan tersebut. Aktor dianggap memiliki kesadaran dan pertimbangan mendalam dalam menentukan pilihannya, serta mengendalikan sumber daya yang dianggap penting untuk mendukung tindakannya. Dengan demikian, tindakan aktor bersifat purposif dan berorientasi pada pencapaian hasil yang diinginkan sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka.

2. Konsep Kunci

Konsep utama dalam teori pilihan rasional menurut James S. Coleman adalah aktor dan sumber daya. Aktor Merujuk pada individu yang melakukan suatu tindakan, sedangkan sumber daya adalah segala sesuatu yang menarik minat dan dapat dikuasai oleh aktor tersebut. Sumber daya ini mencakup sumber daya alam, yaitu potensi atau fasilitas yang disediakan oleh lingkungan alam, serta sumber daya manusia, yaitu kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh individu. (Coleman, 2011).

a. Aktor

Aktor dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau bahkan negara. Mereka merupakan entitas yang melakukan tindakan dan membuat pilihan berdasarkan preferensi dan utilitas mereka. Menurut Coleman, individu adalah aktor yang rasional dalam mengambil keputusan. Mereka mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan dan memilih yang paling menguntungkan

berdasarkan preferensi dan tujuan mereka. Pilihan yang dibuat individu dipengaruhi oleh sumber daya yang mereka miliki dan kendala eksternal, seperti aturan sosial, ekonomi, dan politik (Coleman, 2011).

b. Sumberdaya

Sumberdaya atau *resource* merupakan segala hal yang dapat dimanfaatkan oleh aktor untuk mewujudkan tujuan mereka. Sumberdaya dapat berupa modal, informasi, kekuasaan, dan lain sebagainya. Modal dapat berupa uang, aset, atau teknologi. Informasi dapat berupa pengetahuan, data, atau wawasan. Kekuasaan dapat berupa kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan orang lain (Coleman 2011). Sumberdaya ini yang menentukan sejauh mana individu bisa bertindak secara rasional dan aktor menggunakan sumber daya mereka untuk memaksimalkan utilitas mereka dan mencapai tujuan mereka. Coleman menjelaskan secara rinci bagaimana interaksi antara aktor dan sumber daya berkembang hingga membentuk sistem sosial. (Ritzer & Goodman, 2019).

Setiap aktor memiliki dan memanfaatkan sumber daya yang dapat menarik perhatian pihak lain, sehingga ketika terjadi interaksi antara keduanya, terciptalah hubungan saling ketergantungan. Namun, keberhasilan dalam mencapai tujuan tidak selalu terjamin jika sumber daya yang tersedia tidak mencukupi. Kurangnya sumber daya ini menimbulkan hambatan dan membatasi kemampuan aktor dalam bertindak. Selain itu, akses setiap aktor terhadap sumber daya berbeda-beda, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan mereka dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, aktor akan berusaha memaksimalkan keuntungan sesuai dengan kepentingannya. (Ritzer & Goodman, 2019).

Coleman dalam bukunya Ritzer & Goodman, 2019 menjelaskan bagaimana interaksi antara aktor dan sumber daya terjadi dalam sebuah sistem sosial.

"Dasar paling sederhana dari sistem tindakan sosial yang melibatkan dua aktor, di mana masing-masing memiliki dan mengendalikan sumber daya yang menarik bagi pihak lain. Ketertarikan satu aktor

terhadap sumber daya yang dimiliki aktor lain menyebabkan terjadinya interaksi yang saling bergantung. Sebagai individu yang memiliki tujuan, keduanya berusaha memaksimalkan kepentingannya, sehingga terbentuk hubungan timbal balik atau keterkaitan sistematis dalam perilaku mereka.."

Berdasarkan orientasinya pada tindakan rasional individu, Coleman menitikberatkan pada hubungan antara tingkat mikro dan makro, yaitu bagaimana akumulasi tindakan individu dapat membentuk perilaku sistem secara keseluruhan. Meskipun fokus utamanya pada proses dari mikro ke makro, Coleman juga memperhatikan bagaimana sistem sosial yang telah terbentuk di tingkat makro dapat membatasi atau memengaruhi orientasi dan tindakan para aktor di tingkat mikro. Penjelasan mengenai teori pilihan rasional ini kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang interaksi antara aspek-aspek makro dan mikro, yang pada akhirnya melahirkan perilaku dalam sistem sosial. Dalam penerapannya, Coleman membagi unsur-unsur pada sektor makro menjadi beberapa bagian, salah satunya adalah perilaku kolektif, norma, dan aktor korporat.

1. Perilaku Kolektif

Coleman berpendapat bahwa teori pilihan rasional dapat digunakan untuk menjelaskan seluruh fenomena pada tingkat makro, seperti pada kasus perilaku kolektif. Meskipun memiliki ciri yang kacau dan tidak stabil namun Coleman menyatakan bahwa semua jenis fenomena makro dapat dijelaskan melalui pilihan rasional, tidak hanya yang teratur dan stabil saja. Awalnya individu memegang hak nya masing-masing, akan tetapi semakin lama secara terus-menerus tidak dapat memegang hak nya sendiri. Masing-masing akan mengalihkan sebagian haknya ke individu lain. Hal yang menyebabkan perpindahan hak dari aktor rasional ke berfungsinya sistem yang disebut perilaku kolektif yang liar dan bergolak adalah pemindahan sederhana pengendalian atas tindakan seorang aktor ke aktor lain, yang dilakukan secara sepihak, bukan sebagai bagian dari pertukaran (Ritzer & Goodman, 2019).

Seseorang secara sepihak akan menyerahkan kendali atas tindakannya kepada orang lain. Hal ini menurut teori pilihan rasional, dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. Biasanya, upaya tersebut akan menghasilkan keseimbangan pengendalian antara beberapa aktor dan menciptakan stabilitas dalam masyarakat. Namun, dalam situasi perilaku kolektif, karena adanya perpindahan kendali secara sepihak, upaya untuk memaksimalkan kepentingan individu tidak selalu berakhir pada terciptanya keseimbangan dalam sistem. (Ritzer & Goodman, 2019).

2. Norma

Fenomena makro lain yang menjadi fokus penelitian Coleman adalah norma. Sebagian besar sosiolog melihat norma sebagai penjelas perilaku individu, namun Coleman lebih tertarik pada proses bagaimana norma terbentuk dan dipertahankan oleh sekelompok aktor rasional. Menurutnya, norma muncul dari inisiatif beberapa orang yang menyadari keuntungan yang diperoleh dengan mematuhi norma serta kerugian yang timbul jika melanggarnya. Individu ingin melepaskan kendali atas perilakunya sendiri, tetapi pada saat yang sama mereka menerima kendali atas perilaku orang lain. Artinya, individu melepaskan sebagian hak untuk mengendalikan tindakannya sendiri dan menerima sebagian hak untuk mengatur tindakan orang lain, itulah yang membentuk norma. Akibatnya, kendali yang sebelumnya bersifat individual kemudian dioperasikan oleh kelompok aktor yang saling mengawasi. (Coleman, 2011).

Aktor berusaha untuk memaksimalkan manfaat atau kepuasan dengan menggunakan haknya untuk mengendalikan dirinya sendiri sekaligus memperoleh sebagian hak untuk mengendalikan aktor lain. Karena pengalihan pengendalian ini tidak dilakukan secara sepihak, maka terciptalah suatu keseimbangan di dalamnya. Terdapat pula norma-norma yang menguntungkan pihak tertentu namun merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, aktor menyerahkan haknya untuk mengendalikan tindakan orang lain melalui norma tersebut. Artinya, aktor tidak hanya menerima

sebagian hak, melainkan memberikan haknya kepada pihak lain untuk mengontrol orang lain. Oleh karena itu, efektivitas norma sangat bergantung pada kemampuan pihak-pihak dalam melaksanakan kesepakatan tersebut (Ritzer & Goodman, 2019).

Coleman ingin mengkaji secara mendalam masalah norma pada tingkat mikro. Keberadaan norma dipahami melalui tiga unsur utama dalam teorinya, yaitu hubungan dari mikro ke makro, tindakan bertujuan pada tingkat mikro, dan interaksi dari makro ke mikro. Norma merupakan fenomena pada tingkat makro yang muncul dari tindakan bertujuan individu di tingkat mikro. Setelah norma terbentuk, melalui penerapan sanksi atau sanksi, norma tersebut dapat mempengaruhi perilaku individu. Dengan adanya norma, sekelompok aktor berusaha mengendalikan aktor lain sekaligus menginternalisasikan norma yang berlaku. (Ritzer & Goodman, 2019).

3. Aktor korporat

Konsep aktor korporat (*corporate actor*) merupakan salah satu elemen kunci yang membedakan antara individu sebagai agen rasional dan entitas yang lebih besar yang memiliki kapasitas bertindak seperti individu. Coleman membedakan antara aktor individu dan aktor korporat, di mana aktor korporat adalah kelompok atau institusi yang memiliki tujuan kolektif dan bertindak sebagai satu kesatuan dalam pengambilan keputusan. Konsep ini menjelaskan bahwa seorang aktor tidak bisa semata-mata bertindak berdasarkan kepentingan pribadinya saja, melainkan juga harus mempertimbangkan kepentingan kolektif. Namun, dalam perspektif teori pilihan rasional, baik aktor korporat maupun individu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Struktur korporat dalam suatu organisasi memungkinkan keberadaan individu-individu yang memiliki tujuan pribadi yang beragam dan tidak selalu sejalan dengan tujuan korporat itu sendiri (Ritzer & Goodman, 2019).

Baik aktor korporat maupun aktor individu memiliki tujuan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan suatu sistem untuk menentukan

tindakan yang menguntungkan bagi keseluruhan. Sistem ini menerapkan aturan pengambilan keputusan, seperti penggunaan suara mayoritas, konteks, dan aturan lain yang menggabungkan suara individu menjadi keputusan kelompok. Proses ini mencerminkan adanya perubahan dari tingkat mikro ke tingkat makro. Apabila semua individu memiliki tujuan atau kepentingan yang sama baik kepentingan pribadi maupun kelompok maka keputusan yang dihasilkan akan seragam dan menghasilkan tindakan yang sejalan. Oleh karena itu, tindakan yang muncul bersifat kolektif (Coleman, 2011).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, keputusan tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh individu rasional dengan menggunakan kriteria rasional, yaitu menilai keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul dari suatu tindakan. Artinya, tindakan diambil dengan mempertimbangkan seberapa besar keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh. Ketika terjadi perbedaan kepentingan, agar keuntungan total bagi kelompok dapat tercapai, menurut usulan Kaldor (1939), perubahan kebijakan sebaiknya dilakukan jika pihak yang diuntungkan mampu mengimbangi kerugian pihak lain dan tetap memperoleh manfaat lebih dari sebelumnya. Jika suatu kepentingan merasa dirugikan, maka pihak tersebut berhak untuk keluar dari kelompok karena pelaksana kebijakan mengabaikan kepentingan khusus dan hanya memperhatikan kepentingan umum (Coleman, 2011).

Kesimpulannya, tindakan yang dilakukan oleh aktor dengan memanfaatkan sumber daya dan berdasarkan aturan keputusan bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan individu yang rasional. Hal ini dilakukan dengan menggunakan nilai atau preferensi yang mengukur sejauh mana keuntungan atau kerugian dari suatu tindakan, berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu (pelaku target) dan kepentingan kelompok (pelaku ahli waris).

C. Implementasi Teori Pilihan Rasional James S. Coleman dalam penelitian

Implementasi Teori Pilihan Rasional James S. Coleman dalam penelitian mengenai rasionalitas Masyarakat Desa Batur Kecamatan Getasan terhadap praktik pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu, khususnya pada masyarakat Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, dapat dijelaskan melalui dasar Teori Pilihan Rasional James S. Coleman yaitu aktor dan sumberdaya. Teori ini memiliki melihat masyarakat Desa Batur sebagai aktor individu maupun kolektif yang memiliki tujuan dan preferensi dalam memengaruhi keputusan mereka dalam menggunakan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya alam (seperti sumber air, rumput, dan kayu bakar) dan sumber daya sosial (pengetahuan, jaringan). Masyarakat menggunakan pertimbangan rasional dalam memilih tindakan yang dianggap paling menguntungkan atau memenuhi kebutuhan subsisten mereka, meskipun ada regulasi zonasi taman nasional yang membatasi pemanfaatan tersebut.

Penuturan yang disampaikan masyarakat jika terdapat norma dalam Masyarakat Desa Batur yang dipercaya dalam menjaga hutan juga melekat yang sudah lama diturunkan dari nenek moyang pendahulu agar terjadi keseimbangan ekosistem. Taman Nasional sebagai aktor yang memiliki tujuan yang sama dengan masyarakat lokal dalam menciptakan kelestarian alam dan keberlanjutan ekosistem. Namun dengan preferensi Taman Nasional yang berprinsip pada konservasi hutan maka pada praktiknya terjadi benturan antara Masyarakat lokal dan regulasi dari pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu. Aksesibilitas Masyarakat yang kini terbatas terhadap hutan memunculkan pertimbangan rasional dalam bertindak agar tetap bisa memanfaatkan sumberdaya. Beberapa aktor individu dari masyarakat tetap melakukan pengumpulan rumput dan kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan ternak dan sehari – hari.

Berdasarkan yang disampaikan pengelola Taman Nasional Gunung Merbabu tujuan dari pengelolaan taman nasional adalah perlindungan terhadap satwa, namun yang dirasakan masyarakat desa Batur sekarang justru merasa rugi karena turunnya Monyet Ekor Panjang (MEP) ke lahan pertanian. Hal ini memicu respon masyarakat untuk melakukan suatu tindakan. Coleman menjelaskan bahwa perilaku kolektif terbentuk dari tindakan rasional individu yang kemudian terakumulasi menjadi pola

sosial yang lebih besar. Tindakan yang bertujuan agar tetap tercapainya menjaga lingkungan sebagaimana prinsip konservasi yang dilakukan Pengelola Taman Nasional Gunung Merbabu Kabupaten Semarang namun, sebagai Masyarakat lokal juga menginginkan perlindungan hukum sebagai mana satwa Monyet Ekor Panjang (MEP) dilindungi secara hukum tidak boleh dibunuh. Mengenai Monyet Ekor Panjang (MEP) masih dalam kajian pihak pengelolaan Taman Nasional. Fenomena ini dapat dijelaskan dari bagaimana bentuk individualisme metodologis asumsi dari Teori Pilihan Rasional James S. Coleman dalam melihat fenomena makro.

Selain itu, dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu juga melakukan kerjasama ekowisata dengan pihak swasta. Pihak swasta yang mengelola ekowisata yang di Desa Batur seperti PT Kopeng Alam Wisata (Wisata *Treetop*) dan PT Sagameru lestari (Spekta Merbabau). Pihak swasta ini menjadi aktor korporat dalam kolaborasi antara Taman Nasional dan pihak swasta dalam memanfaatkan zona pemanfaatan dalam sistem zonasi Taman Nasional Gunung Merbabu. Interaksi antar Masyarakat, pihak swasta dan Pengelola Taman Nasional Gunung Merbabu memiliki peranan dalam Teori Pilihan Rasional James S. Coleman. Ketiga aktor memiliki tujuan yang sama namun dalam praktiknya sesuai preferensi yang dimiliki masing – masing aktor baik individu maupun korporat.

Penelitian ini mengimplementasikan Teori Pilihan Rasional Coleman dengan melihat kerangka Teori Pilihan Rasional James S. Coleman, aktor-aktor sosial dalam konteks pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu bertindak berdasarkan kalkulasi rasional untuk mencapai tujuan spesifik yang sesuai dengan posisi dan kepentingan mereka. Terdapat tiga aktor utama yang dapat dijelaskan : pengelola Taman Nasional (negara), masyarakat lokal (Desa Batur sebagai *enclave*, wilayah dalam kawasan konservasi), dan pihak swasta (korporat atau pelaku usaha wisata alam). Pertama, pengelola Taman Nasional Gunung Merbabu , yang dalam hal ini adalah Balai Taman Nasional Gunung Merbabu di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), memiliki orientasi utama pada pelestarian keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis kawasan hutan Merbabu. Dalam perspektif rasionalitas, tindakan mereka diarahkan pada pencapaian tujuan konservasi

jangka panjang. Kebijakan seperti zonasi hutan (zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona rehabilitasi), larangan pembukaan lahan baru, perlindungan satwa, serta program rehabilitasi ekosistem merupakan perwujudan dari pilihan rasional yang bersandar pada nilai ekologi dan mandat undang-undang.

Kedua, masyarakat Desa Batur, yang berada di kawasan *enclave* taman nasional, juga menunjukkan tindakan yang rasional. Masyarakat berupaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama melalui pertanian dan kebutuhan rumput untuk peternakan, serta hasil hutan sambil tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun, seperti keyakinan untuk menjaga hutan sebagai warisan leluhur (*pamomong alas*). Dalam konteks ini, rasionalitas masyarakat tidak hanya bersifat individual dan utilitarian, melainkan juga dipengaruhi oleh norma kolektif dan pertimbangan nilai lokal. Ketika akses terhadap lahan dibatasi, masyarakat tidak serta-merta melakukan perlawanan secara frontal, melainkan memilih untuk beradaptasi, misalnya dengan memanfaatkan peluang ekowisata yang ada, berdialog dengan pihak luar, dan mempertahankan bentuk perlawanan simbolik seperti protes diam melalui praktik pertanian terbatas di zona – zona tertentu, serta mengambil hasil hutan seperti kayu bakar.

Ketiga, pihak swasta atau pelaku ekowisata memegang kepentingan ekonomi yang sangat jelas. Rasionalitas mereka tampak dalam upaya memanfaatkan potensi wisata alam Gunung Merbabu seperti wisata glamping, air terjun, dan panorama alam untuk mendatangkan pendapatan. Pilihan mereka untuk berkolaborasi dengan Balai Taman Nasional Gunung Merbabu serta masyarakat lokal menunjukkan bentuk strategi adaptasi, yaitu mengelola bisnis dalam batasan hukum konservasi sekaligus merangkul legitimasi sosial. Kemunculan usaha wisata berbasis konservasi yang dikelola bersama (*co-management*) atau melalui skema kemitraan konservasi menjadi bukti bahwa tindakan korporat pun mengikuti logika rasional, mencari keuntungan dengan cara yang legal, berkelanjutan, dan memiliki dukungan sosial.

Melalui aktor ketiga ini dapat disimpulkan bahwa rasionalitas dalam konteks pengelolaan taman nasional tidak bersifat antagonistik atau saling meniadakan. Justru sebaliknya, pihak ketiga memiliki kepentingan yang saling bersinggungan namun

dapat dinegosiasikan. Model ini mendekati konsep rasionalitas sosial yang dikemukakan Elster (1989), yaitu bahwa tindakan rasional dapat dimediasi oleh nilai sosial, norma budaya, dan hubungan antarpihak. Oleh karena itu, rasionalitas masyarakat, negara, dan korporasi dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu bukan hanya representasi dari pilihan individu, melainkan merupakan hasil dari proses interaksi sosial yang kompleks dalam ruang geografis dan institusional yang sama.

D. Rasionalitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Perspektif Islam

Lingkungan merupakan tempat tinggal sekaligus sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Manusia, sebagai bagian dari makhluk hidup, sering memanfaatkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan alam telah diciptakan oleh Allah dengan keseimbangan dan keselarasan yang menghubungkan berbagai makhluk hidup satu sama lain (Yunita, 2020). Manusia wajib menjaga kelestarian ekosistem secara seimbang dan logis dalam memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini sekaligus menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang. Pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada logika dan akal sehat mengandung tujuan yang tegas dan mudah dimengerti dalam ajaran Islam. Sebagai agama yang komprehensif, Islam juga mengatur tata cara manusia dalam mengelola lingkungan, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ
فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “ Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku akan menciptakan seorang khalifah di bumi." Para malaikat menjawab, “Apakah Engkau bermaksud menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi, sementara kami selalu bertasbih memuji dan menyucikan nama-Mu?” Tuhan berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui hal-hal yang tidak kalian ketahui.”

Tafsir pandangan menurut Quraish Shihab (1999), ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah di bumi dengan tugas untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan alam sesuai dengan kehendak serta tujuan penciptaan Allah. Allah mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan, diatur agar tercipta keseimbangan dan keharmonisan. Keseimbangan ini seharusnya dipertahankan supaya tidak terjadi kehancuran, karena setiap elemen dalam ekosistem saling berhubungan, jika satu terganggu, maka akan berdampak pada yang lain (Shihab, 1999).

Lingkungan, yang merupakan bagian integral dari eksistensi manusia, harus dianggap sebagai elemen ekosistem yang berharga, sehingga perlu dihormati, dilindungi, dan dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Integritas ini menunjukkan bahwa perilaku manusia terhadap lingkungan memiliki konsekuensi langsung, sehingga manusia memegang kewajiban moral untuk bersikap baik dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam. Perbuatan baik akan menjaga kelestarian lingkungan, dan tindakan yang merusak akan mengakibatkan kehancuran alam. Pandangan *antroposentris* yang memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan. Perspektif ini menjadikan alam sebagai objek eksploitasi demi memenuhi kebutuhan manusia tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekosistem (Shihab, 1999).

Pengelolaan lingkungan penting dilakukan untuk menumbuhkan sikap yang lebih ramah dan menghargai alam. Manusia harus mampu memikirkan keberlanjutan lingkungan agar pemanfaatan lingkungan dirasakan oleh generasi berikutnya. Apabila manusia tidak sadar bahwa kerusakan lingkungan akan mengganggu kehidupan dan menimbulkan ketidaknyamanan, serta menyebabkan kerugian bagi dirinya. seperti datangnya berbagai bencana alam (Jayadi, 2020). Masyarakat yang tinggal di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang yang hidup berdampingan langsung dengan ekosistem hutan. Hasil hutan dimanfaatkan masyarakat Batur dalam mencukupi kebutuhan hidup seperti kayu bakar, rumput, dan air. Namun dalam melakukan pemanfaatan sumber daya hutan masyarakat Batur tidak luput dari sikap menjaga lingkungan sebagaimana perintah mengelola lingkungan atas dasar dari

proses rasionalitas masyarakat dalam melestarikan hutan dan pemenuhan kebutuhan hidup.

Lebih lanjut berdasarkan realitas, Taman Nasional sebagai pengelola hutan di Gunung Merbabu yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), memiliki orientasi utama pada pelestarian keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis kawasan hutan Merbabu. Hal serupa juga dilakukan oleh masyarakat Batur dalam melindungi ekosistem atas keyakinan terhadap nilai – nilai lokal yang diturunkan nenek moyang sejak dahulu . Rasa penjagaan terhadap hutan baik dari masyarakat Batur maupun pengelola taman nasional memiliki tujuan yang sama yaitu agar ekosistem terjaga dan keberlanjutan kehidupan akan terasa hingga kegenerasi berikutnya. Oleh karena itu, sinergitas antara masyarakat Batur dan pengelola Taman Nasional diperlukan dalam melakukan pengelolaan lingkungan di kawasan hutan Gunung Merbabu.

BAB III

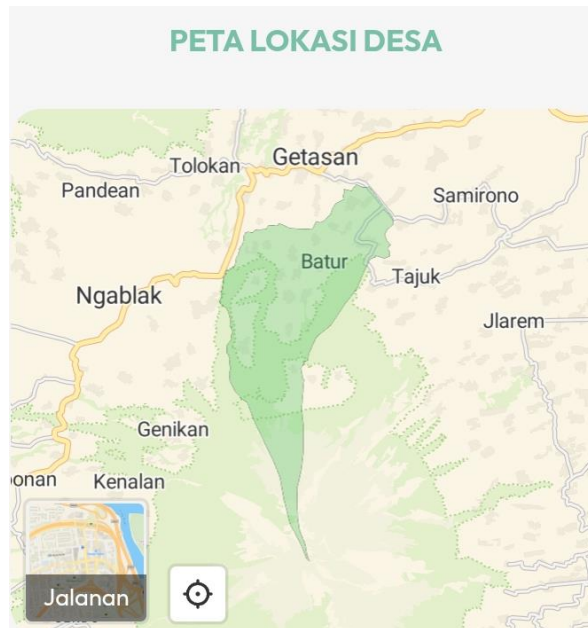
GAMBARAN UMUM DESA BATUR DAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU KABUPATEN SEMARANG

A. Gambaran Umum Desa Batur

1. Kondisi Geografis

Desa Batur terletak di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, berada di lereng Gunung Merbabu pada ketinggian 1.350-1.700 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah sekitar 1.081,75 hektar dan koordinat lintang 7,3942° dan bujur 110,4424. Gunung Merbabu memiliki lereng yang terbagi dalam beberapa wilayah administratif, meliputi Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi timur dan selatan, serta Kabupaten Semarang di lereng sebelah utara. Secara geografis Desa Batur menjadi salah satu desa di Kecamatan Getasan yang berada di sebelah utara lereng Gunung Merbabu (Pemerintah Desa Batur, 2024).

Gambar 1. Peta Desa Batur



(Sumber : <https://batur.desa.id/profil> diunduh pada 20 Mei 2025)

Berdasarkan data sekunder, Secara administrasi Desa Batur memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Somogawe
- Sebelah Selatan : Gunung Merbabu
- Sebelah Barat : Desa Kopeng
- Sebelah Timur : Desa Tajuk

Dengan luasan sekitar 1.081,75 Hektar, Desa Batur terdiri dari sarana dan prasarana seperti pada tabel.

Tabel 2. Luas Desa Batur Kecamatan Getasan

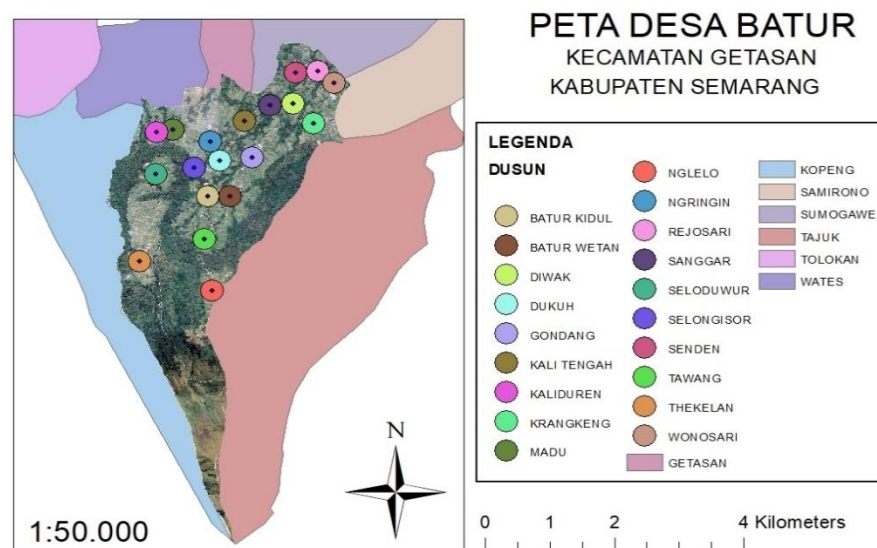
No.	Jenis sarana & prasarana	Luas
1.	Tanah Pemukiman Umum	361 Ha
2.	Perkantoran	1,5 Ha
3.	Sekolahan	7,5 Ha
4.	Tempat Ibadah	10 Ha
5.	Makam	11 Ha
6.	Jalan	162 Ha
7.	Tegalan	321 Ha
8.	Tanah Kritis	66 Ha
9.	Tanah Bengkok	36 Ha
10.	Tanah Negara / TN	105,750 Ha
Jumlah		1081,750 Ha

(Sumber : Pemerintah Desa Batur, 2024)

Dari total luas Desa Batur yang mencapai 1.081,75 hektar, sebagian besar lahan dimanfaatkan untuk pertanian non-sawah seluas 530,22 hektar, sebagian sisanya digunakan untuk permukiman, sarana pemerintahan, dan infrastruktur lainnya. Jarak Desa Batur ke pusat pemerintah Kecamatan Getasan kurang lebih 3 Km, jarak menuju ibu kota Kabupaten Semarang kurang lebih 30 Km, dan jarak menuju ibu kota provinsi Jawa Tengah kurang lebih 35 Km. Desa Batur juga memiliki 19 dusun yaitu diantaranya :

- | | |
|-----------------|----------------|
| a.) Thekelan | k.) Madu |
| b.) Selo Nduwur | l.) Ngringin |
| c.) Nglelo | m.) Kalitengah |
| d.) Tawang | n.) Sanggar |
| e.) Batur Kidul | o.) Diwak |
| f.) Batur Wetan | p.) Senden |
| g.) Gondang | q.) Rejosari |
| h.) Dukuh | r.) Wonosari |
| i.) Selo Ngisor | s.) Krangkeng. |
| j.) Kaliduren | |

Gambar 2. Peta 19 dusun di Desa Batur



(Sumber : Pemerintah Desa Batur, 2024)

Berkaitan dengan observasi lapangan, dilihat dari kondisi geografis Desa Batur yang berada di kawasan pegunungan menjadikan Desa Batur memiliki iklim sejuk dan tanah yang subur, sehingga sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Berikut beberapa potensi sumber daya alam yang beragam di Desa Batur yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain :

a. Potensi Pertanian Hortikultura

Desa Batur memiliki tanah subur dan cocok untuk budidaya tanaman hortikultura seperti kentang, wortel, kubis, cabai, dan bawang daun. Pertanian menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.

b. Potensi Ekowisata Alam dan Budaya

Desa Batur merupakan salah satu pintu masuk jalur pendakian resmi Gunung Merbabu (jalur Thekelan) di Dusun Thekelan. Selain itu, kawasan ini memiliki pemandangan alam yang indah, udara bersih, serta kekayaan flora dan fauna yang khas. Tradisi dan budaya masyarakat yang masih kental juga menjadi daya tarik tersendiri, seperti kegiatan ritual sedekah bumi dan adat istiadat petani lokal.

c. Potensi Konservasi dan Edukasi Lingkungan

Keberadaan masyarakat di dalam kawasan taman nasional membuka peluang untuk mengembangkan model konservasi partisipatif dan pendidikan berbasis lingkungan masyarakat. Program-program seperti konservasi berbasis kearifan lokal, dan edukasi wisata menjadi potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

d. Potensi Produk Lokal dan UMKM

Masyarakat juga memiliki kemampuan dalam memproduksi hasil olahan pertanian seperti keripik sayur, jamu tradisional, dan madu hutan. Produk-produk ini berpotensi dikembangkan menjadi produk unggulan desa dalam mendukung ekonomi lokal berbasis konservasi.

Gambar 3. Potensi pertanian di Desa Batur



(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)

Dengan kondisi geografis yang khas dan berbagai potensi yang dimiliki, Desa Batur memiliki peluang besar untuk mengembangkan pendekatan pembangunan yang selaras antara konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, hal ini memerlukan strategi rasional dan adaptif dari masyarakat serta dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, LSM, dan pihak swasta. Selain itu, wilayah Desa Batur berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. Sebagian besar wilayah desa berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu, menjadikannya sebagai desa *enclave*, yaitu desa yang secara fisik berada dalam kawasan taman nasional tetapi secara administratif merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Semarang. Kondisi geografis ini sangat mempengaruhi pola kehidupan dan struktur ekonomi masyarakat. Ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam yang ada, khususnya air, lahan pertanian dan hasil hutan, menjadikan interaksi Masyarakat dengan tata kelola lingkungan seperti yang diterapkan oleh Taman Nasional Gunung Merbabu menjadi menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, memahami kondisi geografis Desa Batur menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana masyarakat menyesuaikan tindakan sosial mereka secara rasional terhadap praktik pengelolaan Taman Nasional.

2. Kondisi Topografis

Topografi Desa Batur berada pada dataran tinggi dengan berbentuk lereng dan curahan hujan rata-rata adalah 2.500 mm/tahun. Curah hujan di wilayah ini termasuk tinggi, khususnya pada bulan November hingga Maret, yang berpengaruh terhadap pola tanam dan aktivitas masyarakat. Kemiringan lahan di Desa Batur umumnya berada pada kisaran 15–40%, yang secara geomorfologis masuk dalam kategori lahan miring hingga sangat curam. Struktur topografi ini berdampak pada pola pemukiman dan penggunaan lahan masyarakat. Pemukiman cenderung berada di kawasan yang lebih datar, sementara lahan pertanian banyak tersebar di lereng-lereng curam dengan teknik konservasi tanah secara tradisional seperti terasering.

Gambar 4. Kondisi topografis Desa Batur

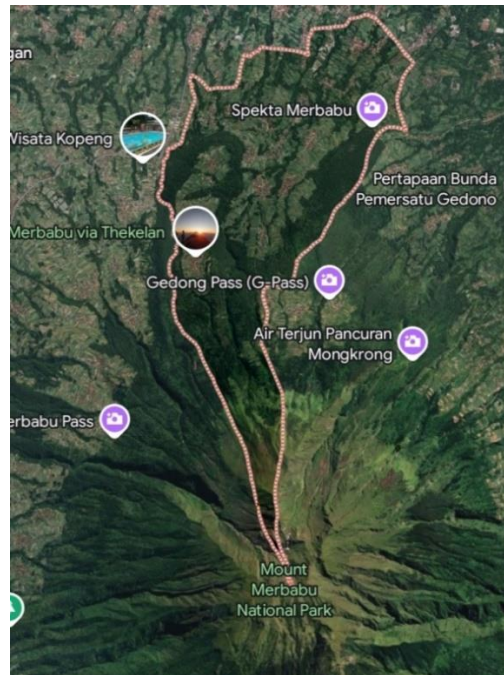


(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)

Topografi yang menanjak ini juga memberikan pengaruh terhadap suhu udara dan kelembapan. Suhu rata-rata harian berkisar antara 20–30°C , dengan kelembapan tinggi, menciptakan iklim mikro yang cocok untuk budidaya tanaman hortikultura seperti kentang, kol, wortel, dan cabai. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian lahan kering , terutama hortikultura yang bernilai ekonomis tinggi.

Kondisi topografi yang menantang juga menjadi faktor yang mendasari terbatasnya infrastruktur di beberapa dusun. Akses jalan yang curam dan sempit menyulitkan mobilitas, terutama saat musim hujan. Namun, di sisi lain, topografi ini sekaligus menjadi daya tarik bagi pengembangan ekowisata berbasis lanskap alami . Beberapa jalur pendakian Gunung Merbabu yang melewati wilayah Desa Batur, seperti jalur Thekelan, menjadikan desa ini strategis dalam mendukung aktivitas wisata petualangan dan pendidikan konservasi. Dengan demikian, kondisi topografi Desa Batur tidak hanya berpengaruh terhadap dinamika ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi juga terhadap strategi konservasi dan potensi kolaboratif dalam pengelolaan taman nasional, terutama dalam mengembangkan wisata berbasis alam yang lestari.

Gambar 5. Peta topografis di Desa Batur



(Sumber : <https://www.google.com/maps/place/Batur/> diunduh pada 20 Mei 2025)

3. Kondisi Demografis

Berdasarkan data dari pemerintah Desa Batur, total penduduk Desa Batur berjumlah 7.630 Jiwa dengan jumlah laki-laki 3.842 dan jumlah perempuan 3.788, dan jumlah KK sebanyak 2.215 serta jumlah RT sebanyak 54 dan RW sebanyak 19.

a. Jumlah penduduk Desa Batur berdasarkan dusun

Tabel 3. Jumlah penduduk Desa Batur perdusun

No.	Nama dusun	Jumlah	Presentase
1	Thekelan	723	9.15%
2	Seloduwur	408	5.36%
3	Nglelo	180	2.37%
4	Tawang	255	3.35%
5	Batur Kidul	815	10.72%

6	Batur Wetan	616	8.1%
7	Gondang	437	5.75%
8	Dukuh	316	4.16%
9	Selongisor	352	4.63%
10	Kaliduren	399	5.25%
11	Madu	313	4.12%
12	Ngringin	309	4.31%
4	Kalitengah	198	2.76%
14	Sanggar	260	3.63%
15	Diwak	192	2.68%
16	Senden	560	7.81%
17	Rejosari	233	3.25%
18	Wonosari	235	3.28%
19	Krangkeng	804	11.22%
Jumlah		7.630	100%

(Sumber : Pemerintah Desa Batur, 2024)

b. Jumlah penduduk Desa Batur berdasarkan kelompok umur

Tabel 4.

Jumlah penduduk Desa Batur berdasarkan kelompok umur

Kelompok Usia	Laki - laki	Perempuan	Total
0 - 4	91	90	181
5 - 9	223	211	434

10 - 14	298	237	535
15 - 19	294	253	547
20 - 24	266	287	553
25 - 29	266	282	548
30 - 34	311	243	554
35 - 39	256	281	537
40 - 44	325	302	627
45 - 49	306	338	644
50 - 54	275	234	509
55 - 59	234	199	433
60 - 64	204	247	451
65 - 69	191	212	403
70 - 74	133	146	279
75 - 79	76	105	181
80 - 84	53	77	130
85+	40	44	84
Total	3.842	3.788	7.630

(Sumber : Pemerintah Desa Batur, 2024)

Untuk jenis kelamin laki-laki , kelompok umur 40 - 44 adalah kelompok umur tertinggi dengan jumlah 325 orang atau 8.46 % . Sedangkan, kelompok umur 85+ adalah yang terendah dengan jumlah 40 orang atau 1.04 %. Untuk jenis kelamin perempuan , kelompok umur 45-49 adalah kelompok umur tertinggi dengan jumlah

338 orang atau 8.92 % . Sedangkan, kelompok umur 85+ adalah yang terendah dengan jumlah 44 orang atau 1.16 %.

c. Jumlah penduduk Desa Batur berdasarkan Pendidikan

Bidang pendidikan Desa Batur memiliki sarana bangunan pendidikan berjumlah 16 unit dengan rincian jumlah bangunan SD sebanyak 3 unit, MI 2 unit, TK 4 unit, dan PAUD sebanyak 7 unit bangunan. Adapun jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan sebagai berikut.

Tabel 5. Jumlah penduduk Desa Batur berdasarkan pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	Tidak/Belum Sekolah	1.791
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	539
3.	Tamat SD/Sederajat	3.577
4.	SLTP/Sederajat	1.107
5.	SLTA/Sederajat	502
6.	Diploma I/II	6
7.	Diploma III/Sarjana Muda	18
8.	Diploma IV/Strata I	84
9.	Strata II	5
10.	Strata III	0
Jumlah		7.630

(Sumber : Pemerintah Desa Batur, 2024)

- d. Jumlah penduduk Desa Batur berdasarkan pekerjaan

Tabel 6. Jumlah penduduk Desa Batur berdasarkan pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Mengurus rumah tangga	2104
3	Lainya	1053
4	Petani/pekebun	1524
5	Peternak	913
8	Buruh harian lepas	440
9	Pengusaha kecil, menengah, dan besar	228
10	Buruh tani/perkebunan	132
15	Pelajar/mahasiswa	791
18	Tukang jahit	80
19	Industri	76
20	Imam masjid	67
21	Pendeta	28
22	Guru swasta	64
22	Ustadz/mubalig	58
23	Mekanik	41
26	Tukang cukur	34
JUMLAH		7.630

(Sumber : Pemerintah Desa Batur, 2024)

- e. Jumlah penduduk Desa Batur berdasarkan agama

Desa Batur memiliki jumlah tempat ibadah sebanyak 29 bangunan tempat ibadah dengan rincian masjid sebanyak 18 unit, gereja 10 unit, dan wihara sebanyak 1 unit bangunan. Adapun jumlah penduduk berdasarkan agama sebagai berikut.

Tabel 7. Penduduk Berdasarkan Agama

NO	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	5.942
2.	Kristen	1.369
3.	Katolik	12
4.	Hindu	0
5.	Budha	307
6.	Konghucu	0
7.	Lainnya	0
Total		7.630

(Sumber : Pemerintah Desa Batur, 2024)

- f. Kondisi rumah Masyarakat Desa Batur

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rumah diartikan sebagai bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal atau bangunan secara umum, seperti gedung. Selain itu, rumah juga dapat dimaknai sebagai tempat perlindungan atau tempat berteduh. Adapun kondisi rumah Masyarakat Desa Batur berdasarkan rumah permanen, rumah semi permanen, rumah tidak permanen dan rumah tidak layak seperti pada table berikut ini :

Tabel 8. Keadaan rumah Desa Batur tahun 2018 - 2019

NO	DUSUN	RUMAH PERMANEN (Unit)	RUMAH SEMI PERMANEN (Unit)	RUMAH TIDAK PERMANEN (Unit)	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (Unit)
1	Thekelan	67	13	76	2

2	Seloduwur	60	11	33	3
3	Nglelo	12	1	42	-
4	Tawang	8	15	27	-
5	Batur Kidul	59	50	71	-
6	Batur Wetan	9	30	103	-
7	Gondang	9	12	121	-
8	Dukuh	5	14	59	-
9	Selongisor	5	6	50	1
10	Kaliduren	25	30	32	-
11	Madu	13	14	35	-
12	Ngringin	17	22	40	1
4	Kalitengah	16	14	20	-
14	Sanggar	5	12	30	-
15	Diwak	3	12	19	2
16	Senden	24	6	100	-
17	Rejosari	10	-	31	-
18	Wonosari	16	3	30	-
19	Krangkeng	18	9	151	2
JUMLAH		391	274	1070	11

(Sumber : Pemerintah Desa Batur, 2019)

B. Gambaran Umum Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) Kabupaten Semarang

1. Profil Taman Nasional Gunung Merbabu

Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) di Kabupaten Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Status ini diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam

dan Ekosistem (KSDAE). Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, Balai TNGMB di Kabupaten Semarang menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan taman nasional. Tugas tersebut meliputi perlindungan sistem kehidupan, pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem secara berkelanjutan (BTNGMb, 2025).

Gambar 6. Kantor Bali TNGMb Kab. Semarang



(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)

2. Isu strategis Taman Nasional Gunung Merbabu

Berdasarkan data sekunder pada dokumen laporan kinerja Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) tahun 2024, terdapat enam isu strategis yang menjadi fokus Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, yaitu :

1. Posisi TN Gunung Merbabu masuk dalam lingkup Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan jalur wisata SOSEBO (Solo, Selo dan Borobudur)
2. Akses masyarakat ke dalam kawasan untuk pemenuhan kebutuhan hijauan makanan ternak, pemanfaatan air dan kayu bakar/rencak masih cukup tinggi
3. Konflik satwa dan manusia yang terjadi di beberapa area perbatasan
4. Berkembangnya trend wisata alam dan cyberculture
5. Ancaman kebakaran hutan dan bencana alam

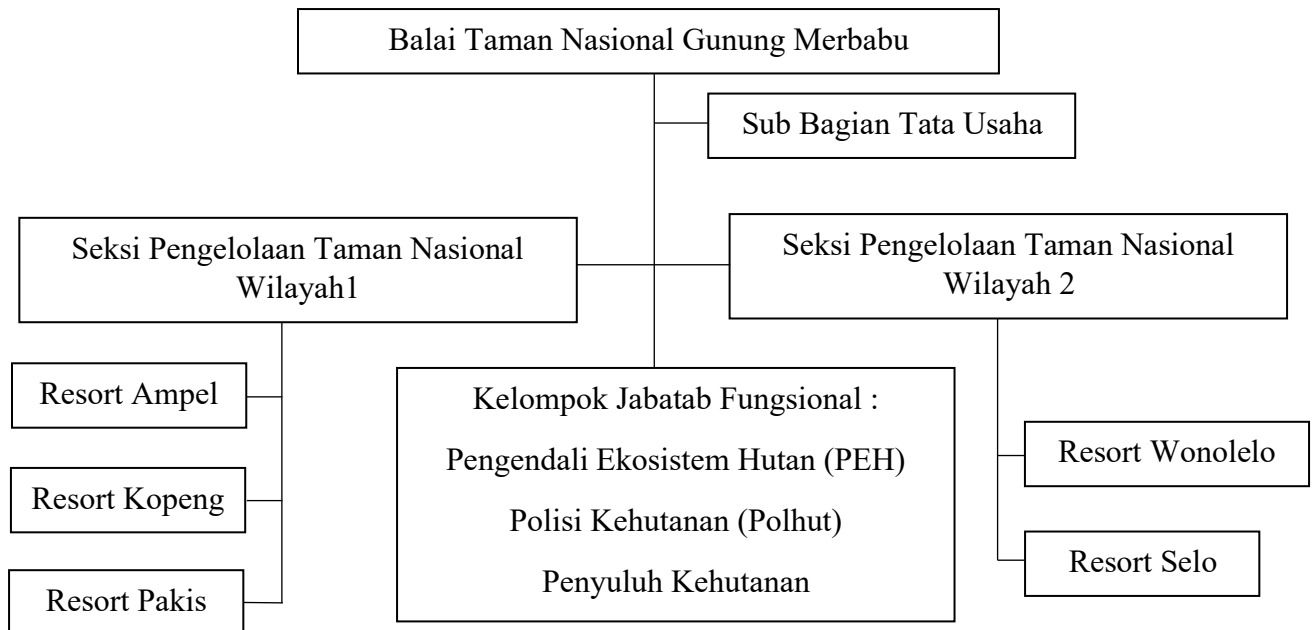
6. Keterbatasan kualitas SDM dan kuantitas SDM pengelola wisata.

Di antara isu-isu tersebut, tiga menjadi prioritas utama. Pertama, akses masyarakat ke dalam kawasan taman nasional menjadi perhatian penting karena masyarakat tingginya yang aktivitas berpotensi mengganggu ekosistem. Upaya mengatasinya dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara masyarakat dan lingkungan. Kedua, berkembangnya tren wisata menjadi tantangan sekaligus peluang, mengingat taman nasional semakin diminati sebagai destinasi ekowisata. Untuk itu, diperlukan pengelolaan yang bijak guna menjaga keseimbangan antara pemanfaatan wisata dan pelestarian lingkungan. Intervensi dilakukan melalui peningkatan layanan wisata berupa pengembangan *booking online*. Ketiga, ancaman kebakaran hutan menjadi isu kritis yang memerlukan langkah-langkah preventif, seperti peningkatan patroli, sosialisasi kepada masyarakat, dan pengembangan sistem deteksi dini, agar dampaknya dapat diminimalkan.

3. Kelembagaan Taman Nasional Gunung Merbabu

Berdasarkan sumber sekunder dari buku informasi Taman Nasional Gunung Merbabu (2018), Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) merupakan Taman Nasional Tipe B dengan struktur organisasi seperti struktur berikut ini :

Gambar 7. Struktur Organisasi Balai TNGMb



(Sumber : Buku informasi Balai TNGMb, 2018)

Balai Taman Nasional Gunung Merbabu sampai dengan akhir tahun 2024 didukung oleh 84 pegawai, yang terdiri dari : 58 orang PNS, 6 orang PPPK, dan 23 orang PPNP. Komposisi penempatan pegawai Balai Taman Nasional Gunung Merbabu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Kantor Balai terdiri dari 30 orang; 20 orang PNS, 5 PPPK, 5 orang PPNP
- b) Kantor SPTN Wilayah I terdiri dari 30 orang; 20 orang PNS, dan PPNP 10 orang
- c) Kantor SPTN Wilayah II terdiri dari 17 orang PNS dan 8 orang PPNP dan 1 PPPK.

4. Pembagian wilayah kerja

Berdasarkan sumber sekunder dari buku informasi Taman Nasional Gunung Merbabu (2018), untuk menjamin efektivitas pencapaian tujuan pengelolaan, kawasan konservasi dibagi ke dalam unit pengelolaan yang lebih kecil. Pembagian kawasan tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan: potensi dan permasalahan, sarana dan prasarana, ketersediaan SDM serta prioritas pengembangan.

A. SPTN Wilayah I

Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I di berada di Jl. Salatiga – Kopeng KM 10,6 Kec. Getasan, Kab. Semarang. SPTN Wilayah I merupakan kawasan bagian utara dari Taman Nasional Gunung Merbabu dengan pelaksanaan tugasnya meliputi : Pengamanan dan perlindungan; Monitoring keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; pengembangan dan pemanfaatan Jasa lingkungan dan wisata alam; Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat. Secara administratif pengelolaan kawasan meliputi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Dalam menjalankan operasional pengelolaannya SPTN wilayah I dalam pengelolaan kawasan Kepala Seksi dibantu oleh beberapa staf urusan pemanfaatan, perencanaan, perlindungan serta pengawetan. Untuk menjamin efektivitas pencapaian tujuan pengelolaan, kawasan konservasi dibagi ke dalam unit pengelolaan yang lebih kecil. Pembagian kawasan tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan, sarana dan prasarana, ketersediaan SDM serta prioritas pengembangan.

1) Resort Ampel

Secara administrasi Resort Ampel berada di Dusun Kalitengen Desa Kaligentong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali dengan luas wilayah 1.240,15 Ha. Kawasan desa penyangga yang termasuk dalam Resort Ampel yaitu Desa Ngagrong, Desa Candisari, Desa Ngargoloko, Desa Sampetan, Desa Ngadirojo dan Desa Jlarem. Beberapa aspek pengelolaan yang menjadi prioritas antara lain: perlindungan dan pengamanan hutan dan pengawetan keanekaragaman hayati. Sebagian besar wilayah Resort Ampel memiliki Topografi dengan tingkat kelerengan relatif terjal. Potensi keanekaragaman hayati yaitu Elang Jawa (*Nizaetus bartelsi*), Rek-rekan (*Presbytis fredericae*) dan Saninten (*Castanopsis argentea*), sedangkan potensi non hayati yaitu ketersediaan air bagi masyarakat desa penyangga. Masyarakat Ampel mempunyai tradisi/ budaya yang masih ada sampai sekarang yakni, Merti Tuk (sumber air), Saparan, Kirab Budaya setiap Bulan Suro dan Tari Anggu'an.

Batas wilayah :

Sebelah Utara	: Resort Kopeng
Sebelah Timur	: Sambu
Sebelah Selatan	: Resort Selo
Sebelah Barat	: Resort Kopeng

2) Resort Kopeng

Resort Kopeng mempunyai wilayah pemangkuan seluas 1.357,21 Ha yang meliputi Desa Kopeng, Desa Batur dan Desa Tajuk. Kantor Resort Kopeng secara administrasi berada di Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Pada wilayah resort ini terdapat pemukiman masyarakat (*enclave*) yang berbatasan dengan zona tradisional. Resort Kopeng termasuk kawasan yang menjadi kunjungan para wisatawan karena mempunyai potensi obyek daya tarik wisata seperti : Jalur Pendakian Cuntel, Jalur Pendakian Thekelan, Wisata Alam Kalipasang dan Umbul Songo. Potensi wisata yang dikelola oleh Pengusaha Pariwisata Alam PT. Kopeng Alam Wisata adalah Kopeng *Treetop* Adventure Park dan PT Sagameru lestari mengelola wisata Spekta Merbabu. Aspek pengelolaan yang menjadi prioritas antara lain : perlindungan dan

pengamanan hutan; pengawetan keanekaragaman hayati; dan pelayanan wisata. Tradisi masyarakat Kopeng yang masih dilakukan adalah kegiatan Merti Dusun dan Potong Gombak (rambut gimbal) ketika anak tersebut belum berusia lima tahun.

Batas wilayah :

Sebelah Utara : Salatiga

Sebelah Timur : Resort Ampel

Sebelah Selatan : Resort Selo

Sebelah Barat : Resort Pakis

3) Resort Pakis

Resort pengelolaan pakis merupakan resort terkecil karena memiliki luasan 844, 63 Ha termasuk wilayah menjari. Secara administrasi Resort Pakis berada di Desa Kenalan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Desa penyangga yang berada di Resort Pakis meliputi : Desa Munengwarangan, Ketundan, Gondangsari, Jambewangi, Kragilan, Kenalan, Genikan, Jagonayan, Kaponan, Tejosari, muneng, Pakis dan Surodadi. Aspek pengelolaan yang menjadi prioritas antara lain : perlindungan dan pengamanan hutan, pengawetan keanekaragaman hayati dan pelayanan wisata. Potensi keanekaragaman hayati adalah Rek-rekan rekan (*Presbytis fredericae*) yang menjadi prioritas kegiatan monitoring di Blok Sikendil. Obyek daya tarik wisata pada Resort pakis meliputi: Jalur pendakian Wekas, Granjangan Kembar dan Gua Slandak. Masyarakat di sekitar lereng Merbabu memiliki beragam tradisi diantaranya Tradisi Gombakan, Sadranan dan tradisi Sungkem Tomplak yang digelar pada hari kelima Lebaran setiap tahunnya untuk mengirim doa untuk para leluhur serta memohon keselamatan, kesejahteraan dan kesuksesan kepada Tuhan. Kesenian di wilayah Pakis antara lain Jathilan, Topeng ireng dan Soreng.

Batas wilayah :

Sebelah Utara : Grabag

Sebelah Timur : Resort Kopeng

Sebelah Selatan : Resort Wonolelo

Sebelah Barat : Tegalrejo

B. SPTN Wilayah II

Wilayah kerja Seksi Pengelolaan Taman Nasional wilayah II secara administratif meliputi Kabupaten Magelang dan Boyolali. Kantor SPTN wilayah II berada di Jl. Tembus Blabak – Boyolali Km.11, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Di SPTN wilayah II meliputi Pengamanan dan perlindungan, Monitoring keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka efektivitas pengelolaan wilayah SPTN II dibagi menjadi menjadi 2 Resort:

1) Resort Wonolelo

Resort pengelolaan Wonolelo mempunyai luas 1.353,88 Ha termasuk adanya kawasan menjari. Secara administrasi Resort Wonolelo berada di Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. Desa penyangga yang berada di Resort Wonolelo meliputi : Desa Wonolelo, Banyuroto, Banyusidi, Pogalan, Wulunggunung, Daleman Kidul dan Petung. Aspek pengelolaan yang menjadi prioritas antara lain: perlindungan dan pengamanan hutan, pengawetan keanekaragaman hayati dan pelayanan wisata. Potensi keanekaragaman hayati adalah Elang hitam (*Ictinaetus malaiensis*) dan anggrek (*Orchidaceae*). Obyek daya tarik wisata pada Resort Wonolelo meliputi : Jalur pendakian Suwanting, Bumi Perkemahan Sobleman, Grenden, *Top Selfie* dan Lempong Sikendi. Masyarakat di sekitar Resort Wonolelo masih menjaga kelestarian tradisi seperti Rajaban, Sadaranan, Lebaran, dan Suronan, serta didukung oleh kesenian seperti Tayub, Campur sari, Topeng Ireng, Jatilan dan Cakalele (mirip Soreng).

Batas wilayah :

Sebelah Utara	: Resort Pakis
Sebelah Timur	: Resort Selo
Sebelah Selatan	: Dukun
Sebelah Barat	: Tegalrejo

2) Resort Selo

Resort Selo identik dengan wisata pendakian Gunung Merbabu yang mempunyai luas 1.024,63 Ha. Secara administrasi Resort Pakis berada di Desa

Tarubatang Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Desa penyangga yang berada di Resort Pakis meliputi : Desa Selo, Jeruk, Samiran, Tarubatang, Lencoh, Irakah dan Senden. Aspek pengelolaan yang menjadi prioritas antara lain : Pelayanan wisata, perlindungan dan pengamanan hutan dan pengawetan keanekaragaman hayati. Potensi keanekaragaman hayati adalah Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*), Rek rekan (*Presbytis fredericae*) dan edelweiss (*Anaphalis javanica*). Potensi obyek daya tarik wisata di wilayah Resort Selo selain jalur pendakian adalah bumi perkemahan di Blok Tuk Pakis dan Blok Pasah Desa Senden. Masyarakat di wilayah Selo juga menggelar ritual seperti Merti Tuk Babon dan Tuk pakis dan dilanjutkan dengan pentas kesenian.

Batas wilayah :

Sebelah Utara : Resort Ampel

Sebelah Timur : Cepogo

Sebelah Selatan : Selo

Sebelah Barat : Resort Wonolelo

Gambar 8. Peta Situasi Kawasan TNGMb



(Sumber : Buku informasi Balai TNGMb, 2018)

BAB IV

PRAKTIK PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU

KABUPATEN SEMARANG

Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu secara hukum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE). Berdasarkan pasal 5 dalam UU No. 5 Tahun 1990 menjelaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan *pertama*, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. *Kedua*, perlindungan sistem penyangga kehidupan. *Ketiga*, pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya. Guna mencapai tujuan tersebut pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) Kabupaten Semarang melakukan upaya penerapan sistem zonasi, perlindungan keutuhan kawasan, pemanfaatan, pelibatan masyarakat, dan kewenangan pemerintah dalam mencapai tujuan menjaga kelestarian ekosistem. Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) Kabupaten Semarang sebagai pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan konservasi, pengamanan, dan pemberdayaan sekitar masyarakat sesuai ketentuan peraturan undang - undangan. Atas dasar tujuan atau preferensi untuk kelestarian ekosistem ini, pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) Kabupaten Semarang memiliki regulasi dalam praktik pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu untuk mencapai tujuan konservasi alam tersebut diantaranya :

A. Pengawetan ekosistem melalui sistem zonasi Taman Nasional

Praktik pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu Kabupaten Semarang dilakukan dengan sistem zonasi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.76/Menlhk Setjen/2015. Zona pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu Kabupaten Semarang telah mengalami perubahan (revisi zona) sebanyak tiga kali, perubahan zona terakhir pada tahun 2021 ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : SK. 55/KSDAE/PIKA/KSA.0/3/2021 tentang Zonasi Taman Nasional Gunung Merbabu, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan zona pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu Kabupaten Semarang dilakukan dengan pendekatan *scientific based* melalui perencanaan

bottom up dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekosistem dan memperhatikan dinamika eksternal.

Adapun praktik pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu Kabupaten Semarang melalui sistem zonasi sebagaimana yang disampaikan Ibu Kristina Dewi, S.Si, M.Sc, M.Eng. selaku seksi pengelola Taman Nasional Gunung Merbabu wilayah 1 Kopeng Kabupaten Semarang, sebagai berikut :

“Jadi definisi Taman Nasional itu kawasan konservasi yang dikelola dengan sistem zonasi. (Penjelasan zonasi dengan menunjukkan peta zonasi) Zona - zona itu warna - warna ini. Masing - masing warna itu menunjukkan peruntukan yang berbeda. Jadi kalo merah itu zona inti, kuning zona rimba, hijau itu zona pemanfaatan. Lebih lengkap bisa baca undang - undang no.5 tahun 1990 tentang KSDAE. Jadi kalo masyarakat kan ada di luar warna ini karena di luar kawasan jadi diatas sana. Dan yang paling berbatasan dengan langsung masyarakat itu warna coklat. Warna coklat adalah zona tradisional. Zona tradisional itu adalah, kalo merah itu adalah inti yang mutlak dilindungi kemudian kuning itu rimba hijau itu pemanfaatan, itu yang bisa dimanfaatkan bisa air, bisa wisata, seperti Kopeng Treetop itu hijau sebelah kiri kalo Kalipasang itu hijau sebelah kanan. Dan hijau itu yang bisa dimanfaatkan sebagai wisata. Kemudian ada hijau titik titik kecil di dalam itu adalah sumber - sumber air. Dan yang coklat yang berbatasan dengan masyarakat itu adalah zona tradisional, masyarakat bisa memanfaatkan untuk kepentingan mereka tapi ada batasannya diruang yang itu tidak boleh merambah yang lain. Nah peruntukan untuk saat ini adalah untuk rumput.” (Wawancara, Ibu Kristina Dewi, PEH Taman Nasional, 19 Mei 2025)

Gambar 9. Peta Zonasi TNGMb



(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ibu Kristina Dewi (2025), bahwa sistem zonasi ini dibuat dengan pembagian ruang – ruang wilayah dan pembatasan aktivitas didalamnya yang bertujuan agar kawasan konservasi dapat terjaga ekosistemnya. Masyarakat masih bisa beraktivitas di zona pemanfaatan dan zona tradisional. Zona pemanfaatan diperuntukan untuk pemanfaatan non hasil hutan seperti air dan pariwisata. Kemudian untuk zona tradisional masyarakat masih diperbolehkan memanfaatkan hasil rumput untuk pakan ternak. Adapun dari sumber sekunder buku zona pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu (2022) dijelaskan lebih rinci mengenai praktik pengelolaan taman nasional melalui sistem zonasi dan bagaimana masing - masing ruang zona memiliki peruntukannya seperti berikut ini :

1. Zona Inti

kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan berupa mengurangi, menghilangkan fungsi dan menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Zona ini merupakan kawasan yang mempunyai kondisi alam baik biota ataupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas. Peruntukan kegiatan yang dilakukan di zona inti kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu, meliputi :

- a) Memberikan ruang ekologis untuk perkembangan secara alami ekosistem dan spesies khas TNGMb sesuai dengan daya dukung alamnya;
- b) Mempertahankan keaslian dari ekosistem, spesies dan gejala alam yang ada;
- c) Sumber plasma nutfah jenis tumbuhan dan satwa liar;
- d) Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penguatan religi dan budaya serta penunjang budidaya.

2. Zona Rimba

Zona Rimba merupakan bagian kawasan konservasi daratan yang berfungsi sebagai *buffer* zona inti serta di dalamnya hanya dapat dilakukan kegiatan sebagaimana pada zona inti. Fungsi zona rimba adalah untuk kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas dan menunjang budidaya serta mendukung fungsi dan pelestarian zona inti

dan zona pemanfaatan.. Peruntukan kegiatan yang dilakukan di zona rimba kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu, meliputi :

- a.) Sebagai *buffer* untuk perlindungan dan menjaga kestabilan ekosistem dan keanekaragaman flora fauna yang ada di zona inti;
- b.) Untuk pengawetan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya;
- c.) Sebagai areal habitat cadangan sumber genetik / plasma nutfah penting;
- d.) Untuk melindungi dan menjaga wilayah jelajah satwa prioritas dan satwa lainnya yang berbatasan langsung dengan zona rimba;
- e.) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian dasar dan terapan.

3. Zona Pemanfaatan

Zona Pemanfaatan merupakan bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensi alamnya, terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pemanfaatan jasa lingkungan air dan wisata. Gunung Merbabu dan juga dimanfaatkan sebagai jalur pendakian bagi para pengunjung terutama para pecinta alam. Jalur pendakian yang terdapat di Desa Batur terletak di Dusun Thekelan. Dusun Thekelan sendiri merupakan daerah *enclave* berbatasan sekali dengan kawasan konservasi Taman Nasional. Peruntukan kegiatan yang dilakukan di zona pemanfaatan kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu, meliputi :

- a) Pengembangan aktifitas jasa lingkungan kepariwisataan alam;
- b) Pemanfaatan potensi jasa lingkungan air/hidrologi;
- c) Pengembangan pusat Pendidikan konservasi dan pusat penelitian;
- d) Pengembangan kegiatan-kegiatan yang menunjang budidaya potensi kawasan taman nasional;
- e) Pengembangan fasilitas dan sarana prasarana pengelolaan dan pemanfaatan kepariwisataan alam dan hidrologi, serta penunjang budidaya;
- f) Pengembangan perekonomian masyarakat lokal dalam bidang bisnis konservasi.

Gambar 10. Zona pemanfaatan untuk pendakian, wisata alam, dan sumber air.



(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)

4. Zona Tradisional

Zona Tradisional merupakan ruang di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu yang dimanfaatkan oleh masyarakat akan hasil hutan bukan kayu (HHBK) secara terbatas untuk mendukung kebutuhan masyarakat sehari-hari. Berdasarkan kesejarahan kondisi masyarakat sangat tergantung pada sumberdaya alam di dalam kawasan hutan (secara turun temurun sejak nenek moyang). Peruntukan kegiatan yang dilakukan di zona tradisional kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu, meliputi:

- a) Pengembangan eduwisata dan wisata alam terbatas;
- b) Pemanfaatan potensi jasa lingkungan air/hidrologi;
- c) Pengembangan pusat Pendidikan konservasi dan pusat penelitian;
- d) Pengembangan kegiatan-kegiatan yang menunjang budidaya potensi kawasan taman nasional;
- e) Pengembangan fasilitas dan sarana prasarana pengelolaan wisata alam terbatas dan hidrologi, serta penunjang budidaya tradisional;
- f) Pengembangan pemanfaatan HHBK untuk peningkatan ekonomi produktif masyarakat.

Gambar 11. Zona tradisional untuk rumput



(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)

5. Zona Rehabilitasi

Zona Rehabilitasi merupakan zona Taman Nasional Gunung Merbabu yang berfungsi sebagai areal untuk pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan akibat faktor alam (faktor topografi, bencana alam) maupun faktor manusia (kebakaran dll). Peruntukan kegiatan yang dilakukan di zona rehabilitasi kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu, meliputi :

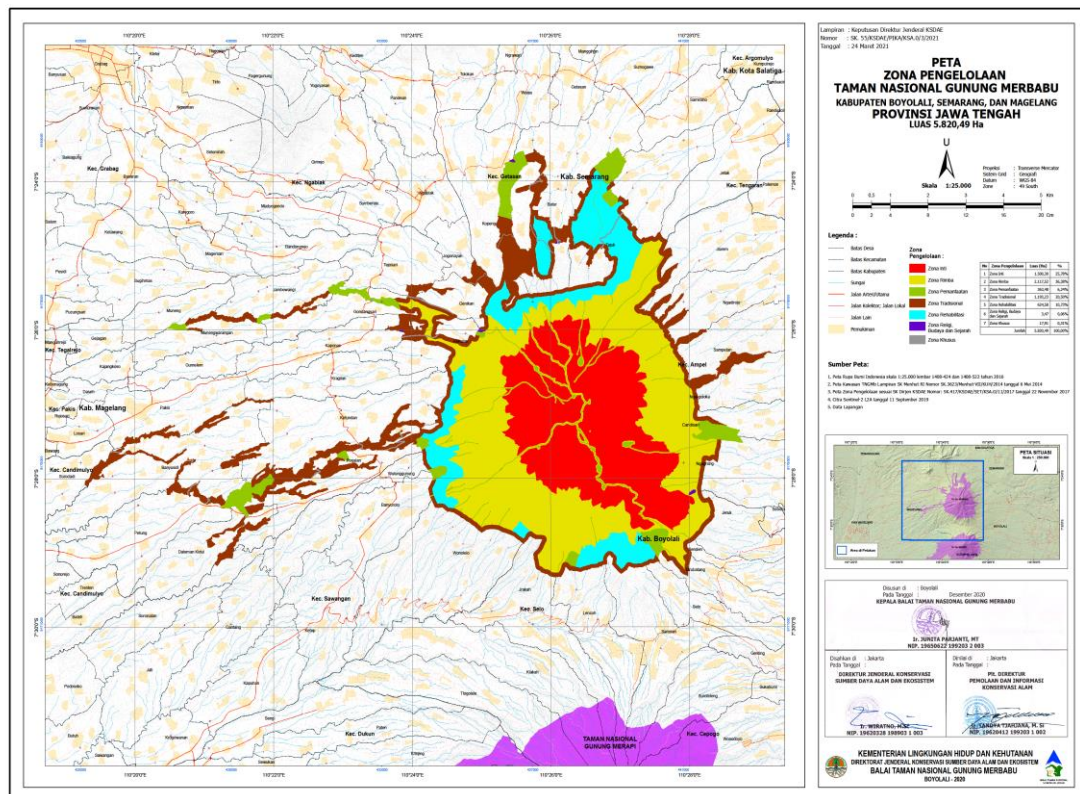
- a) Untuk mengembalikan ekosistem kawasan yang rusak menjadi atau mendekati kondisi ekosistem alamiahnya; Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
- b) Pemulihan habitat dan populasi asli dalam rangka meningkatkan keberadaan populasi kehidupan liar;
- c) Untuk meningkatkan fungsi ekologis kawasan sebagai recharge area;
- d) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan konservasi;
- e) Sarana pemberdayaan masyarakat dan juga membangun kemitraan kolaboratif untuk kegiatan pemulihan ekosistem.

6. Zona Khusus

Zona Khusus merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu yang ditetapkan sebagai areal untuk pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupannya dan/ atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas, transportasi, dan lain-lain yang bersifat strategis. Peruntukan kegiatan yang dilakukan di zona khusus kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu, meliputi :

- a) Untuk aksesibilitas masyarakat enclave area;
- b) Untuk mendukung kepentingan strategis masyarakat sekitar kawasan dan para pihak (Dinas PU/TNI) sebagai sarana transportasi dan telekomunikasi;
- c) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi, pertahanan dan keamanan dan lain-lain yang bersifat strategis dan tidak dapat terelakkan.

Gambar 12. Peta Zonasi Kawasan TNGMb



(Sumber : Website BTNGb, diunduh pada 1 Juni 2025)

Berdasarkan sumber data primer dari wawancara ibu Kristina Dewi (2025) dan data sekunder buku zona pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu (2022) mengenai praktik pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu melalui aturan zonasi diatas, ditemukan bahwa tidak semua zona terbuka untuk aktivitas masyarakat. Akses masyarakat terhadap kawasan konservasi diatur secara ketat berdasarkan fungsi ekologis dan peruntukan masing-masing zona. Masyarakat masih dapat melakukan aktivitas legal dan produktif di dua zona utama yaitu di zona tradisional dan pemanfaatan. Masyarakat memiliki akses yang lebih luas pada zona pemanfaatan dan zona tradisional. Zona pemanfaatan memungkinkan aktivitas ekowisata, pendidikan lingkungan, dan kegiatan rekreasi alam. Melalui mekanisme kerja sama antara masyarakat dan pihak pengelola taman nasional, warga lokal dapat terlibat sebagai pengelola jalur pendakian, penyedia jasa wisata, dan fasilitator kegiatan edukatif. Hal ini menjadi bentuk legalisasi partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan kawasan tanpa mengganggu fungsi ekologisnya. Sementara itu, zona tradisional memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan pemanfaatan lahan secara terbatas dan lestari dari hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk mendukung kebutuhan masyarakat sehari-hari. Akses ini diberikan yang memungkinkan masyarakat untuk mengambil rumput untuk pakan ternak.

Gambar 13. Papan peringatan di zona inti dan rimba



(Sumber : Instagram BTNGMb diunduh pada 20 Mei 2025)

Berdasarkan sumber data primer melalui wawancara ibu Kristina Dewi (2025) juga ditemukan bahwa secara aturan praktik regulasi Taman Nasional aktivitas masyarakat tidak boleh memasuki zona inti dan rimba karena untuk pengawetan flora dan fauna. Zona inti merupakan kawasan konservasi paling ketat, di mana aktivitas manusia dilarang sepenuhnya kecuali untuk kepentingan penelitian ilmiah dan dengan izin khusus dari Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. Zona ini dimaksudkan sebagai habitat alami yang tidak terganggu guna menjaga kelestarian spesies dan ekosistem. Berbeda dengan zona inti, zona rimba berfungsi sebagai kawasan penyangga dan cadangan ekosistem, yang juga memiliki tingkat ekosistem tinggi. Akses masyarakat di zona ini sangat terbatas dan umumnya hanya diperkenankan dalam konteks kegiatan monitoring, patroli bersama, atau edukasi konservasi yang difasilitasi oleh Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. Adapun wawancara dengan Ibu Kristina Dewi selaku seksi pengelola Taman Nasional wilayah 1 Kopeng juga sebagai berikut ini:

“Batas wilayah masyarakat itu di luar peta itu. Dan aktivitas Masyarakat masih bisa sampai pada zona tradisional dan pemanfaatan. Jadi dia boleh kalopun beraktivitas dalam kawasan untuk perumpukan misalnya itu dicoklat itu untuk zona tradisional, hijau itu untuk pemanfaatan kalo wisata ya masuk pariwisata masih boleh dan kena tiket seperti itu. Untuk zona rimba dan zona inti itu tidak untuk aktivitas masyarakat karena untuk perlindungan flora fauna” (Wawancara, Ibu Kristina Dewi, PEH Taman Nasional, 19 Mei 2025)

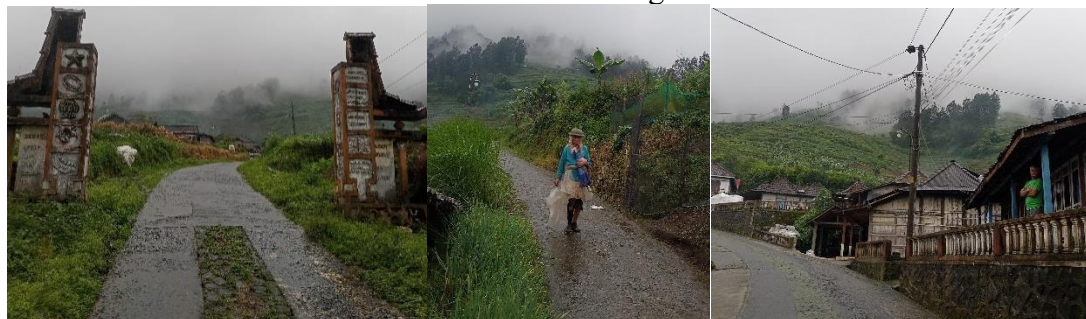
Lebih lanjut berdasarkan lokasi administrasi Desa Batur, terdapat tiga dusun yaitu Dusun Seloduwur, Thekelan dan Ngelelo wilayahnya merupakan masuk dalam kategori *enclave* (daerah di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu). Menurut Bapak Sugiyono (2025) warga Dusun Kaliduren, *Enclave* diartikan sebagai wilayah permukiman dan aktivitas masyarakat yang secara geografis berada di dalam atau dikelilingi oleh kawasan konservasi, namun tetap memiliki status administratif sebagai desa. Posisi ini menempatkan Desa Batur dalam situasi yang unik sekaligus kompleks, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan hubungan dengan otoritas taman nasional. Keberadaan *enclave* ini menyebabkan batas spasial antara kawasan konservasi dan ruang hidup masyarakat menjadi sangat dekat dan tumpang tindih. Sebagian lahan yang sebelumnya dimanfaatkan masyarakat untuk bertani, kini termasuk ke dalam kawasan konservasi taman nasional. Hal ini berimplikasi pada pembatasan akses yang berdampak langsung terhadap penghidupan warga. Meskipun demikian, status *enclave* juga menjadi alasan utama bagi pihak Balai Taman

Nasional Gunung Merbabu untuk menerapkan pendekatan pengelolaan partisipatif, seperti program kemitraan konservasi, penyuluhan hukum lingkungan, dan kolaborasi dalam pengembangan ekowisata. Desa Batur menjadi contoh penting dalam penerapan konservasi berbasis masyarakat, di mana terdapat upaya harmonisasi antara perlindungan keanekaragaman hayati dan kebutuhan ekonomi warga.

Dalam praktiknya pengelola Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) Kabupaten Semarang memberikan perhatian khusus di Kawasan *enclave* tersebut. Terlihat dari apa yang disampaikan oleh seksi pengelola Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) wilayah 1 Kopeng ibu Kristina Dewi (2025) berikut ini :

“Jadi *enclave* itu adalah kawasan diluar Taman Nasional. Meskipun ada di dalam tapi statusnya bukan miliknya Taman Nasional. Saat ini yang ada enclave kita memang ada di atas situ yang warna kuning gitu. Masyarakat bisa tetap melaksanakan aktivitas disitu karena secara status bukan kawasan milik Taman Nasional begitu. Tapi karena berbatasan jadi ya itu apa namanya perlu perhatian khususnya disitu. Batasnya kan tetep coklat itu mba di dalam putih itu kan batas keluarnya pasti coklat jadi mereka bisa beraktivitas di zona tradisional itu.”
(Wawancara, Ibu Kristina Dewi, PEH Taman Nasional, 19 Mei 2025)

Gambar 14. Daerah *Enclave* Dusun Ngelelo Desa Batur



(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)

Gambar 15. Gambar Daerah Enclave Dusun Seloduwur dan Thekelan



(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)

Coleman (2011) aktor dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau bahkan negara. Mereka merupakan entitas yang melakukan tindakan dan membuat pilihan berdasarkan preferensi dan utilitas mereka. Dalam konteks praktik pengelolaan hutan oleh taman nasional yang dalam hal ini adalah Balai Taman Nasional Gunung Merbabu di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah aktor negara yang memiliki orientasi utama pada pelestarian keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis kawasan hutan Merbabu. Dalam perspektif rasionalitas Coleman (2011), tindakan mereka diarahkan pada pencapaian tujuan konservasi jangka panjang. Kebijakan seperti zonasi hutan (zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona tradisional, dan zona rehabilitasi) merupakan perwujudan dari pilihan rasional yang bersandar pada nilai ekologi dan mandat undang-undang. Zonasi ini ditetapkan dalam rangka mengatur dan mengendalikan aktivitas manusia terhadap ruang alam berdasarkan tingkat sensitivitas ekologisnya. Regulasi ini dirancang untuk mencapai tujuan konservasi secara berkelanjutan dengan tetap membuka peluang partisipasi masyarakat dalam batas-batas tertentu seperti di zona pemanfaatan dan zona tradisional. Namun, bagi masyarakat lokal seperti warga Desa Batur yang wilayahnya termasuk dalam *enclave* dan historisnya memiliki hubungan utilitarian dengan hutan. Zonasi tidak hanya menjadi kebijakan spasial, melainkan juga realitas sosial yang mengubah struktur pilihan mereka.

B. Perlindungan sistem penyangga kehidupan

Selain sistem zonasi, praktik pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) Kabupaten Semarang juga melakukan patroli perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) Kabupaten Semarang. Upaya perlindungan dan pengamanan ini ditempuh untuk tujuan kelestarian ekosistem dari ancaman kerusakan lingkungan, perambahan, perburuan pembongkaran, dan aktivitas ilegal lainnya. Prakteknya kegiatan ini melibatkan petugas lapangan, mitra konservasi, serta masyarakat lokal dalam upaya kolektif untuk menegakkan hukum dan menjaga kelestarian kawasan.

1. Penyuluhan pentingnya konservasi ekosistem

Penyuluhan ekosistem konservasi yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) merupakan bagian integral dari praktik pengelolaan kawasan konservasi yang bersifat edukatif dan partisipatif. Desa Batur, yang berada di wilayah *enclave* dan memiliki sejarah panjang ketergantungan terhadap sumber daya hutan,

penyuluhan ini menjadi sarana penting untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat lokal dengan pihak pengelola taman nasional. Tujuan utama dari penyuluhan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem hutan Gunung Merbabu, serta membentuk pemahaman kolektif bahwa konservasi lingkungan bukan semata-mata kepentingan negara, melainkan kebutuhan bersama demi kelangsungan hidup generasi mendatang. (Buku informasi TNGMb, 2018)

Berdasarkan LKJ Taman Nasional Gunung Merbabu (2024) penyuluhan konservasi dilakukan melalui program Pembinaan Kader konservasi sejumlah yang berjumlah 21 orang. Tujuannya untuk membangun kelompok konservasi lokal, menyebarkan informasi tentang pentingnya konservasi melalui media sosial atau forum komunitas, dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proyek penghijauan atau perlindungan satwa. Pembinaan kader konservasi melalui upaya Bina Cinta Alam merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. Program ini bertujuan untuk membentuk generasi muda atau kader yang tidak hanya paham tentang pentingnya konservasi alam, tetapi juga memiliki komitmen dan keterampilan untuk melaksanakan tindakan nyata dalam menjaga dan melestarikan ekosistem alam. Pada tahun 2024 ini telah tercapai sebanyak 21 orang yang menjadi sasaran kegiatan Pembinaan Kader Konservasi tahun 2024 dari 3 target yang ditentukan. Kader konservasi yang dibentuk menjadi agen perubahan dalam komunitasnya. Mereka ikut serta dalam program pemberdayaan masyarakat sekitar dengan mengajak dalam kegiatan konservasi. Tidak hanya itu, kader konservasi juga berperan aktif dalam kegiatan penanaman baik di dalam Kawasan taman nasional maupun di lingkungan masing masing (LKJ BTNGMb, 2024).

Lebih lanjut melalui program pembinaan kader konservasi mereka juga melaksanakan sosialisasi/ kampanye secara langsung tentang upaya-upaya konservasi di masyarakat maupun melalui media sosial dan bersih sampah di beberapa lokasi di lingkungan masyarakat. Balai TN Gunung Merbabu melaksanakan pembinaan dan evaluasi rutin kader konservasi untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan keterampilan kader, serta dampak yang dihasilkan terhadap konservasi alam. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan program ke depannya. Dengan

pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan kader-kader konservasi yang terbentuk melalui Bina Cinta Alam dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga kelestarian alam serta menginspirasi masyarakat lainnya untuk ikut berperan aktif dalam konservasi lingkungan (LKJ BTNGMb, 2024).

Berdasarkan wawancara ibu Ktistina Dewi (2025) mengatakan pihak pengelola taman nasional juga mensosialisasikan mengenai kawasan konservasi kepada masyarakat Batur dalam setiap kesempatan ditambah kondisi masyarakat Batur yang secara historis masih dalam proses adaptasi mengikuti regulasi taman nasional yang kini mengelola hutan. Dulu memang Masyarakat bersama perum perhutani yang mengelola hutan sebelum pengelolaan hutan berpindah ke taman nasional. Pengelolaan perum perhutani yang mengelola hutan sebagai hutan produksi memperbolehkan masyarakat menanam pohon untuk ditebang dan menanam rumput tanpa batasan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan lai seperti getah karet. Namun sekarang, pelan – pelan pengelola Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) Kabupaten Semarang wilayah 1 Kopeng terus melakukan sosialisasi mengenai konservasi hutan kepada masyarakat Batur. Hal ini tersampaikan dari kutipan wawancara berikut ini dengan seksi pengelola Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) wilayah 1 Kopeng :

“Cara mensosialisasikannya kita ada kegiatan sosialisasi itu sendiri, kemudian di dalam setiap kesempatan itu selalu disampaikan, kita juga punya yang namanya MPA (masyarakat peduli api), masyarakat mitra polisi hutan (MMP), melalui mereka juga sosialisasi bisa disampaikan kepada masyarakat. Walaupun memang tidak serta merta stop ya pak jadi pelan - pelan. Sekarang ya masih terus berproses tapi kita tidak bisa menyebutkan bahwa secara khusus di batur ini lebih secara umum taman nasional masih ada beberapa yang aktivitasnya itu melebihi zona tradisional untuk perumputannya tapi itu untuk secara general di Taman Nasional.” (Wawancara, Ibu Kristina Dewi, PEH Taman Nasional, 19 Mei 2025)

Adapun Coleman (2011) menjelaskan konsep kunci aktor dan sumber daya. Aktor dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau bahkan negara. Aktor adalah individu yang melakukan suatu tindakan, sedangkan sumber daya merupakan hal yang menarik perhatian dan dapat dikuasai oleh aktor. Coleman (2011), sumber daya merupakan hal yang menarik perhatian dan dapat dikuasai oleh aktor. Sumber daya tidak hanya berupa benda fisik atau materi, tetapi juga dapat berupa pengetahuan, informasi, jaringan sosial, atau

nilai-nilai yang memiliki daya guna. Dalam konteks praktik pengelolaan Taman Nasional, institusi pengelola Taman Nasional Gunung Merbabu dapat diposisikan sebagai aktor yang memiliki dan mengelola sumber daya, salah satunya adalah pengetahuan tentang konservasi alam dan nilai-nilai ekologis. Melalui kegiatan penyuluhan, taman nasional mentransfer pengetahuan ini kepada masyarakat sekitar, dengan harapan masyarakat dapat memahami, menerima, dan menerapkan prinsip-prinsip konservasi dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, ketika pengelola taman nasional melakukan penyuluhan nilai – nilai ekologi, mereka sedang mendistribusikan sumber daya berupa pengetahuan ekologis kepada masyarakat. Jika masyarakat menerima dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut, maka terjadi perubahan perilaku yang mendukung tujuan konservasi. Sebaliknya, jika pengetahuan ini tidak dianggap bernilai oleh masyarakat, maka upaya konservasi menjadi kurang efektif. Pengetahuan konservasi dan nilai-nilai ekologis adalah sumber daya strategis yang dapat dikuasai, dimanfaatkan, dan didistribusikan oleh aktor (taman nasional) kepada masyarakat. Keberhasilan pengelolaan taman nasional sangat bergantung pada sejauh mana pengetahuan ini diterima dan diadopsi oleh masyarakat sebagai bagian dari modal sosial mereka dalam mendukung kelestarian lingkungan. Terkait Bagaimana nilai-nilai ekologis sebagai sumber daya mempengaruhi perilaku aktor dalam konservasi alam Mengapa taman nasional dianggap sebagai aktor utama dalam penyuluhan konservasi kepada masyarakat Bagaimana pengetahuan konservasi alam dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat Apa saja tantangan dalam mengintegrasikan nilai ekologis ke dalam pengelolaan sumber daya di taman nasional Bagaimana konsep sumber daya menurut Coleman (2011) peran memperkuat taman nasional sebagai agen perubahan lingkungan.

2. Kegiatan patroli rutin

Berdasarkan data sekunder dari dokumen LKJ Taman Nasional Gunung Merbabu (2024) , kegiatan patroli dilakukan oleh petugas Polisi Kehutanan (Polhut) yang berada di bawah koordinasi masing - masing Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN). Di wilayah Kabupaten Semarang, termasuk Desa Batur, kegiatan ini berada dalam cakupan SPTN Wilayah I Kopeng. Selain Polhut, patroli juga melibatkan masyarakat mitra polhut (MMP)

dan Masyarakat peduli api (MPA), yaitu warga lokal yang telah dilatih dan diberdayakan untuk turut serta dalam pengawasan kawasan. Pelibatan MMP bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis partisipasi lokal, sekaligus memperkuat rasa kepemilikan terhadap kawasan konservasi. Dalam pelaksanaan di lapangan, patroli mencakup kegiatan seperti:

- a) Pemetaan dan penandaan batas kawasan.
- b) Pengecekan kondisi jalur pendakian dan kawasan wisata alam.
- c) Pemeriksaan aktivitas masyarakat atau pengunjung di zona konservasi.
- d) Edukasi langsung kepada warga tentang aturan perlindungan hutan.

Berdasarkan wawancara dari salah satu anggota masyarakat mitra polhut (MMP), Mas Santoso (2025) yang ditemui saat sedang melakukan patroli perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di wisata Kalipasang. Patroli ini dilakukan dengan tujuan untuk pelestarian ekosistem dari ancaman – ancaman kerusakan oknum. Balai Taman Nasional Gunung Merbabu secara rutin melaksanakan patroli perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi. Patroli ini merupakan langkah strategis untuk mengawasi, mendeteksi, dan menanggulangi berbagai potensi pelanggaran, seperti perambahan hutan, perburuan liar, kebakaran hutan, dan aktivitas ilegal lainnya di dalam kawasan taman nasional. Disampaikan oleh bapak Santoso melalui wawancara berikut ini

“Saya salah satu anggota dari masyarakat mitra polhut (MMP) yang sedang patroli wisata sore ini. Patroli dilakukan untuk perlindungan dan pengamanan kawasan. Yang sedang saya lakukan adalah patroli wisata dilakukan setiap sabtu minggu. Dan kalo musim kemarau patroli kawasan dilakukan hampir tiap hari untuk mencegah kebakaran hutan. Ada pembagian patroli juga di berapa resort. Kaya resort kopengan, umbul songo, pendakian thekelan, ke sana lagi sudah wilayah sendiri lagi resort pakis, ke sana lagi resort ampel, resort selo, ke sana lagi Magelang resort wonolelo”(Wawancara, Mas Santoso, MMP Taman Nasional, 17 Mei 2025)

Gambar 3 16. MMP yang sedang patroli sore di wisata alam



(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)

Dari hasil patroli perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di Taman Nasional Gunung Merbabu diperoleh data dari Laporan Kinerja Balai Taman Nasional Gunung Merbabu tahun 2024 secara general seluruh kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu terdapat pelanggaran sebanyak 5 kali operasi, yaitu :

1. Pencurian kayu untuk kayu bakar di Blok Kedakan, Desa Kenalan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang.
2. Pencurian kayu untuk membuat arang di Blok Tepus Wetan, Desa Surodadi, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang.
3. Perambahan kawasan untuk lahan pertanian di Blok Tepus Wetan, Desa Surodadi, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang.
4. Pencurian kayu untuk inventaris Dusun Gatran di Blok Jegur, Dusun Sembungan, Desa Gondangsari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang.
5. Perburuan di Jalur Pendakian Wekas, Dusun Kedakan, Desa Kenalan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang.

Menurut Coleman (2011) setiap aktor sosial bertindak secara sadar dan terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dimiliki dan konsekuensi dari setiap tindakan. Substansi dalam praktik pengelola taman nasional melalui patroli rutin adalah patroli rutin dilakukan sebagai strategi rasional untuk perlindungan kawasan konservasi dari kerusakan hutan, perburuan pembohong, dan aktivitas ilegal lainnya yang dapat mengancam kelestarian kawasan konservasi. Tujuannya melindungi keutuhan dan kelestarian kawasan taman nasional, menjaga habitat satwa liar, serta menjamin kelangsungan fungsi ekologis hutan. Sumber Daya berupa tenaga Polisi hutan (Polhut), masyarakat mitra polhut (MMP), Masyarakat peduli api (MPA), dan mitra teknologi pemantauan (seperti *smart* Patrol), serta dukungan logistik dan operasional.

Pengelola taman nasional dapat memilih untuk tidak melakukan patroli, namun risiko kerusakan dan kehilangan sumber daya alam akan meningkat. Dengan dilakukannya patroli rutin, peluang deteksi dan pencegahan aktivitas ilegal menjadi lebih besar, sehingga manfaat jangka panjang bagi kawasan konservasi dapat dioptimalkan. Coleman (2011) menekankan bahwa tindakan sosial bersifat teleologis, artinya setiap tindakan mempunyai tujuan yang jelas dan didasarkan pada pertimbangan manfaat serta nilai yang dipegang aktor. Dalam konteks ini, patroli rutin tidak hanya bertujuan mencegah kerusakan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga sumber daya alam untuk generasi mendatang. Patroli rutin juga memiliki efek kolektif, yakni meningkatkan akuntabilitas pengelolaan kawasan dan memperkuat norma perlindungan hutan di sekitar masyarakat. Dengan demikian, keputusan melakukan patroli rutin merupakan hasil kalkulasi rasional yang mempertimbangkan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi, serta risiko yang mungkin timbul jika tindakan tersebut tidak dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan taman nasional melalui patroli rutin adalah tindakan rasional aktor pengelola yang bertujuan memaksimalkan perlindungan kawasan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, berdasarkan pertimbangan manfaat, risiko, dan nilai-nilai konservasi yang dipegang.

C. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Wisata Alam

Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) Kabupaten Semarang dimungkinkan untuk dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penyediaan sarana dan jasa wisata alam sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.4/Menhhut-II/2012 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya

dan Taman Wisata Alam. Untuk pemanfaatan jasa lingkungan untuk penyediaan sarana wisata alam dapat dilakukan di Ruang Usaha Zona Pemanfaatan sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan untuk penyediaan jasa wisata alam dapat dilakukan di Ruang Publik Zona Pemanfaatan (BTNGMb, 2018).

1. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air

Berdasarkan buku informasi Taman Nasional Gunung Merbabu (2018) pemanfaatan jasa lingkungan air di Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) Kabupaten Semarang harus mengikuti kaidah- kaidah pemanfaatan secara lestari tanpa mengganggu kelestarian fungsi. Pemanfaatan jasa lingkungan air secara berkesinambungan di Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) Kabupaten Semarang harus dapat menjamin ketersediaan sumber air secara kuantitas dan kualitas untuk kepentingan pada masa kini maupun yang akan datang. Jasa lingkungan air di Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) Kabupaten Semarang yang dapat dimanfaatkan bersumber dari mata air yang berada di dalam kawasan dengan persyaratan :

- a) Sumber air yang dapat dimanfaatkan adalah sumber air yang tersedia sepanjang tahun
- b) Debit air mencukupi
- c) Lokasi sumber air berada dalam peta areal pemanfaatan air sesuai surat keputusan dirjen phka nomor sk.124/iv/set/2015 tanggal 27 november 2015
- d) Pengambilan air dilakukan dengan sistim pipanisasi melalui pembuatan bak penampungan yang terletak diluar zona inti dan zona rimba taman nasional gunung merbabu.
- e) Diameter pipa yang dipakai disesuaikan dengan kemampuan debit air yang tersedia.
- f) Teknik pembuatan bak penampungan dan pemasangan pipa tidak diperkenankan rnerubah bentang alam.

Pemanfaatan Air Non komersial adalah pemanfaatan air dari dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk kepentingan rumah tangga adan sosial (misalnya tempat ibadah). Pemohon yang akan

memanfaatkan jasa lingkungan air di Taman Nasional Gunung Merbabu diwajibkan mengajukan permohonan ijin. Ijin yang diberikan bertujuan untuk :

- a) Mewujudkan tertib administrasi
- b) Bentuk legalitas/keabsahan sebagai pihak yang pemanfaatan jasa lingkungan air di taman nasional gunung merbabu
- c) Untuk memudahkan mengontrol dan memonitor aktifitas pemanfaat (jasa lingkungan air).

2. Pemanfaatan Wisata Alam oleh Pihak Swasta

Praktik pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) Kabupaten Semarang juga memberikan iklim usaha yang kondusif bagi mitra/swasta melalui mekanisme Ijin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA). IUPSWA di Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) Kabupaten Semarang diselenggarakan oleh PT Kopeng Alam Wisata (Wisata Treetop) dan PT Sagameru lestari (Spekta Merbabu). Menurut Ibu Kristina Dewi (2025) selaku PEH taman nasional jika tidak membatasi siapa saja boleh bekerja sama yang penting memenuhi persyaratan mengajukan izin usaha. Berikut kutipan wawancaranya :

“jadi sebenarnya tidak dibatasi siapa saja boleh yang penting memenuhi persyaratan mengajukan izin usaha. Karena itu kan banyak ya syaratnya termasuk permodolan dan sebagainya. Kemudian ada nilainya perhaktarenya sekian” (Wawancara, Ibu Kristina Dewi, PEH Taman Nasional, 19 Mei 2025)

Saat ini ada dua wisata alam dari pihak swasta atau luar yang sedang yang bekerja sama membangun ekowisata dengan taman nasional yaitu :

a. Kopeng Treetop

Pariwisata Alam yang dilakukan PT Kopeng Alam Wisata terletak di Ruang Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Merbabu. Lokasinya berada di Wilayah Resort Kopeng pada SPTN Wilayah I yang secara administratif berada di Desa Batur dan Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Pengusahaan pariwisata alam oleh PT. Kopeng Alam Wisata yang populer disebut treetop beroperasi sejak tahun 2016. Bentuk wisata berupa *outbound* (dengan 6

sirkuit, 65 tantangan, dan 20 *flying fox*), dan menjelajahi hutan/ Jungle tracking. Akses ke lokasi ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan darat roda 2 dan roda 4 melalui rute, yaitu arah timur (dari Kota Salatiga) sejauh 14 km dan arah barat (dari Kota Magelang) sejauh 26 km (BTNGMb, 2018).

b. Spekta Merbabu

Wisata Spekta Merbabu terletak dekat dengan Wisata Alam Kalipasang, tepatnya di Dusun Krangkeng, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Tempat wisata ini menawarkan pengalaman berlibur di alam dengan udara sejuk khas Gunung Merbabu. Pengunjung dapat bermalam dengan pilihan camping ceria bersama keluarga atau rekan kerja, serta menikmati fasilitas glamping dan campervan. Di lokasi juga tersedia restoran dan kafe semi terbuka yang menyuguhkan pemandangan taman air. Selain itu, pengunjung dapat mencoba wahana menantang seperti jembatan kayu (jembatan kayu) dan *Flying Fox*. Akses menuju tempat ini cukup mudah dengan kendaraan roda dua maupun roda empat, dengan dua pilihan rute, yaitu dari arah timur melalui Kota Salatiga sejauh 16 km, dan dari arah barat melalui Kota Magelang sejauh 30 km (BTNGMb, 2018).

Gambar 3 17. Wisata Alam Kopeng *Treetop*



(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2024)

Gambar 3 18. Wisata Alam Spekta Merbabu



(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)

Dalam praktik pengelolaannya, pihak taman nasional memberikan ketentuan kepada pihak swasta untuk melibatkan masyarakat setempat dalam upaya pemberdayaan masyarakat lokal. Lebih jelasnya seperti yang di sampaikan Ibu Kristina Dewi selaku PEH Taman Nasional :

“Ada beberapa ketentuan dalam mengelola wisata alam oleh pihak ketiga misalnya harus melibatkan masyarakat sekitar gitu. Untuk Spekta Merbabu sendiri itu lebih dari 75% kayanya memperkerjakan masyarakat lokal Kopeng Treetop pun demikian kecuali ahli - ahli itu dari luar. Misalkan untuk tenaga - tenaga hariannya pakai masyarakat sekitar. Kemudian ada kewajiban untuk semacam pemberdayaan masyarakat, bentuknya si tidak ada ketentuan tapi intinya pelibatan masyarakat. Kalo kami lihat kopeng treetop dan spekta merbabu saat ini pelibatan masyarakatnya adalah memperkerjakan masyarakat untuk bersama mereka ada juga kontribusi ke desa kalo ngga salah” (Wawancara, Ibu Kristina Dewi, PEH Taman Nasional, 19 Mei 2025)

Dari wawancara dengan Ibu Kristina Dewi (2025) praktik pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu dalam memanfaatkan potensi alam melakukan kerjasama ekowisata dengan pihak swasta. Pihak swasta yang mengelola ekowisata yang di Desa Batur adalah PT Kopeng Alam Wisata (Wisata *Treetop*) dan PT Sagameru lestari (Spekta Merbabu). Pemanfaatan wisata alam di Gunung Merbabu yang melibatkan kerjasama antara pihak swasta, Taman Nasional sebagai pengelola, dan masyarakat lokal dapat dilihat dari kerangka Coleman (2011), setiap pihak dipandang sebagai aktor yang memiliki tujuan dan sumber daya berbeda, serta membuat keputusan secara rasional untuk memaksimalkan manfaat masing-masing.

Taman Nasional Gunung Merbabu sebagai pengelola kawasan bertindak untuk menjaga kelestarian ekosistem, memastikan pemanfaatan wisata tidak merusak lingkungan, dan menerapkan peraturan terkait konservasi. Pihak swasta sebagai investor atau operator wisata ikut serta dalam menyediakan modal, layanan inovasi, dan promosi, dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari fasilitas wisata, seperti wisata *glamping*, *outbond*, dan panorama alam atau jasa pendukung lainnya. Masyarakat lokal memanfaatkan peluang ekonomi dari aktivitas wisata, seperti bekerja sebagai pengelola harian wisata, membuka jasa pemandu, menjual oleh – oleh hasil pertanian sayuran, penyedia homestay, atau warung. Dalam praktiknya, kerjasama ini berlangsung melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, negosiasi hak dan kewajiban, serta adaptasi terhadap kebijakan pengelola taman nasional, misalnya ketika terjadi penutupan jalur pendakian untuk pemulihan ekosistem atau penyesuaian peraturan pemerintah . Setiap aktor menyeimbangkan manfaat dan risiko dari keterlibatan mereka. Taman Nasional menyeimbangkan konservasi dan penerimaan negara, swasta mengejar keuntungan dengan tetap mematuhi aturan, dan masyarakat lokal berupaya memperoleh pendapatan tanpa kehilangan akses terhadap sumber daya.

Menurut Coleman (2011), tindakan kolaboratif ini merupakan hasil kalkulasi rasional dari masing-masing aktor untuk memaksimalkan kepentingan mereka dalam kerangka aturan dan sumber daya yang tersedia. Jika kerjasama berjalan baik, semua pihak memperoleh manfaat konservasi tetap terjaga, ekonomi lokal tumbuh, dan keberlanjutan wisata dapat terwujud. Namun, jika kepentingan salah satu pihak terkait, misalnya masyarakat lokal kehilangan akses atau terjadi kerusakan lingkungan, maka konflik atau strategi penyesuaian akan muncul pada bagian dari pilihan rasional berikutnya.

BAB V

RESPON MASYARAKAT DESA BATUR TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU

A. Pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat Batur

Berdasarkan observasi dilapangan, peneliti melihat jika hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu, khususnya yang berada di wilayah administratif Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, menyimpan potensi ekologi dan sosial yang saling berkaitan. Kekayaan ekologis ini dimanfaatkan masyarakat lokal sebagai penopang kehidupan sejak dulu sebelum pengelolaan hutan dilakukan oleh pengelola Taman Nasional Gunung Merbabu. Menurut Bapak Sugiyono (2025) warga Dusun Kaliduren menyampaikan bagaimana hubungan antara masyarakat Desa Batur dengan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu berikut ini :

“Masyarakat di kawasan Merbabu terutama Desa Batur ini kan kehidupannya tidak bisa lepas dari sumber daya alam di wilayah hutan. Satu, berkaitan dengan sumber daya air itu jelas mutlak menjadi kehidupannya masyarakat. Yang kedua, sebagian besar petani kita masih petani peternak semua ya petani juga peternak artinya kan hutan ini sebelum jadi belantara kayak gitu kan dulu kan rumput memang sangat dimanfaatkan masyarakat sangat dibutuhkan untuk makan ternak. Yang ketiga berkaitan dengan kayu bakar sebagai penunjang kehidupan juga” (Wawancara, Bapak Sugiyono, warga Dusun Kaliduren, 17 Mei 2025).

Dari wawancara tersebut menunjukkan bagaimana keterkaitan masyarakat Desa Batur dengan sumber daya alam hutan. Terlebih lagi secara administrasi masyarakat Desa Batur juga berada di kawasan *enclave* taman nasional, Kawasan *enclave* sendiri merupakan definisi dari perkampung yang berada di dalam hutan sehingga antara masyarakat dan hutan sudah menjadi integrasi yang tidak bisa dipisahkan. Dalam konteks hutan di kawasan Gunung Merbabu, hutan ini dikelola oleh Taman Nasional maka sejak pindah alih pengelolaan hutan dari perum perhutani ke Taman Nasional kehidupan masyarakat Desa Batur pun beradaptasi dengan aturan yang diberlakukan oleh pengelola Taman Nasional. Terdapat 3 dusun di Desa Batur yang wilayahnya *enclave* yaitu, Dusun Seloduwur, Dusun Thekelan, dan Dusun Ngelelo. Kemudian terdapat 8 dusun yang berbatasan dengan kawasan taman nasional yaitu, Dusun Kaliduren, Madu, Ringin, Selongisor, Batur Kidul, Batur Wetan, Gondang, Kerangkan.

Adapun jenis – jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan masyarakat Desa Batur sebagai berikut ini :

1. Rumput untuk pakan ternak

Berdasarkan kondisi demografis Desa Batur, peternak adalah jenis pekerjaan paling mendominasi setelah bertani. Selain menggarap ladang masyarakat Desa Batur mayoritas beternak juga untuk mencukupi kebutuhan hidup. Seperti halnya yang dilakukan oleh bu Bkti warga Dusun Thekelan yang secara rutin setiap hari mengambil rumput untuk pakan ternak miliknya. Berdasarkan aturan zona perumputan oleh pengelola Taman Nasional Gunung Merbabu rumput dapat dimanfaatkan masyarakat diambil dari zona tradisional.

Gambar 19. Masyarakat memanfaatkan rumput untuk ternak



(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)

Rumput yang diambil oleh masyarakat Desa Batur digunakan sebagai pakan ternak, seperti halnya yang dilakukan Ibu Bkti warga Dusun Thekelan yang memanfaatkan rumput di lahannya sendiri yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. Ibu Bkti biasanya mengambil rumput setiap hari dengan untuk 2 – 3 makan sapi – sapi ternaknya. Selain memiliki hewan ternak Ibu Bkti ini juga menggarap ladang pertanian sayuran seperti wortel dan kentang.

2. Kayu bakar

Dari pengamatan di lapangan, memanfaatkan kayu bakar menjadi alternatif lain dalam pemenuhan kebutuhan memasak ataupun sekedar membuat api – apian penghangat badan ditungku dapur masyarakat Desa Batur. Pada dasarnya menurut aturan pengelola Taman Nasional Gunung Merbabu kayu bakar menjadi hal yang dilarang untuk diambil dari kawasan hutan Taman Nasional ini. Penjelasan ini disampaikan oleh Ibu Kristina Dewi, selaku seksi pengelola Taman Nasional Gunung Merbabu wilayah 1 Kopeng Kabupaten Semarang, beliau menjelaskan :

“Untuk Kawasan konservasi sejatinya semua hal yang ada di dalam itu dilindungi. Kalo kawasan konservasi itu semua yang ada didalam itu tidak boleh diambil kecuali di ruang tertentu misalnya di zona tradisional kita memperbolehkan untuk menanam rumput ya rumput boleh diambil yang lain itu engga. Sebagai contoh ada pohon tumbang di dalam itu ngga boleh diambil terus oo dijadiin kursi atau dibawa pulang untuk kayu bakar, itu tidak boleh yudah biar disitu terkubur di situ. Nanti mungkin masyarakat akan bilang sayang ya. Sebenarnya semuanya itu adalah satu siklus yang nanti akan berguna. Ketika pohon tumbang itu jika membusuk akan ada mikrobial dan sebagainya nanti akan terjadi rantai makanan, jadi suatu ekosistem itu akan terus berputar nah kalo kawasan konservasi itu seperti itu. Tetap dilindungi semua yang ada di dalamnya” (Wawancara, Ibu Kristina Dewi, PEH Taman Nasional, 19 Mei 2025)

Namun, realitasnya masyarakat Desa Batur masih memerlukan kayu bakar yang digunakan sebagai sumber energi pendukung selain gas LPG dalam rumah tangga, terutama untuk memasak dan menghangatkan diri pada musim dingin. Pengambilan kayu bakar ini biasanya dilakukan masyarakat Desa Batur dari ranting pohon yang telah kering atau pohon tumbang alami. Ketika peneliti sedang observasi lapangan peneliti tidak sengaja bertemu dengan dua warga yang sedang berjalan ke hutan dan ketika ditanya mereka menjawab berencana akan mencari kayu bakar di hutan. Selaras dengan hal ini tersebut Bapak Wagimin juga menyampaikan :

“Tetap ada masyarakat yang mengambil kayu untuk kebutuhan kayu bakar. Kalo kayu itu tuh biasanya untuk kayu bakar dan yang ngambil biasanya diam - diam dengan ngambil ranting – rantingnya” (Wawancara, Bapak Wagimin, warga Dusun Thekelan, 17 Mei 2025)

Gambar 20. Masyarakat akan memanfaatkan kayu bakar



(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)

Merujuk pada studi Aissiyah, dkk tahun (2019) yang menyatakan juga masih masifnya pelanggaran masyarakat terhadap aturan konservasi alam oleh pengelolaan Taman Nasional terhadap kayu bakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan rumput dan kayu bakar di Taman Nasional Gunung Merbabu pada lokasi sampel termasuk tinggi, dengan frekuensi penggunaan rumput mencapai 63 kali per hari dan kayu bakar sebanyak 41 kali per minggu. Dalam penataan lahan dengan pengelolaan lahan, faktor budaya memberikan pengaruh sebesar 91%, sedangkan faktor ekonomi memberikan pengaruh sebesar 17,8%. Selain itu, terdapat faktor mediasi yang menghubungkan antara faktor budaya dan pengelolaan lahan, yang secara bersama-sama mempengaruhi aspek ekonomi dalam pengelolaan lahan sebesar 49,2%. Akses sekitar masyarakat dalam pemanfaatan rumput dan kayu bakar masih didasarkan pada mekanisme yang sederhana atau konvensional. (Aissiyah dkk, 2019).

Pelanggaran yang dilakukan masyarakat Desa Batur dalam manfaat kayu bakar dari hutan kawasan Taman tergolong penggunaan sumber daya yang masih

minor karena digunakan untuk kebutuhan pribadi tidak dikomersikan. Pohon yang digunakan untuk kayu bakar pun pohon yang sudah tumbang secara alami baru masyarakat Desa Batur mengambilnya untuk kayu bakar. Hal ini disampaikan oleh Ibu Bakti warga Dusun Thekelan seperti berikut ini :

“Masyarakat biasanya ambil pohon yang sudah jatuh sendiri, biasanya masyarakat ambil untuk dijadikan kayu bakar. Tidak untuk apa – apa selain kayu bakar kaya dijual itu tidak” (Wawancara Ibu Bakti, Warga Dusun Thekelan, 18 Mei 2025)

Pemanfaatan hutan untuk kayu bakar di Desa Batur ini tentunya berbenturan dengan sistem pengelolaan Taman Nasional. Pengelolaan Taman Nasional yang berprinsip pada UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, melakukan pembatasan akses sumber terhadap daya alam secara ketat. Salah satu nya adalah larangan pengambilan kayu, termasuk kayu tumbang. Pihak pengelola Taman Nasional Gunung Merbabu menegaskan bahwa kayu tumbang tidak boleh diambil oleh masyarakat , karena bagian dari prinsip konservasi ekosistem adalah menjaga siklus alami hutan, termasuk keberadaan pohon tumbang yang memiliki peran penting ekologis.

Menurut penjelasan dari Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Taman Nasional Gunung Merbabu Ibu Kristina Dewi (2025) menjelaskan bahwa dalam perspektif ekologi pohon tumbang merupakan substrat bagi pertumbuhan jamur, lumut, dan mikroorganisme yang menjadi bagian dari rantai makanan. Ia juga berfungsi sebagai tempat hidup berbagai fauna kecil serta membantu menjaga kelembapan dan struktur tanah. Oleh karena itu, intervensi dalam bentuk pengambilan kayu tumbang dinilai dapat mengganggu regenerasi alami dan keseimbangan ekosistem hutan.yang mana semua ekosistem yang ada dalam kawasan Taman Nasional itu dilindungi tidak boleh diambil kecuali rumput pada zona tradisional dan ini akan berguna dalam membentuk siklus alami ketika pohon tumbang akan membusuk dengan sendirinya dan terjadi rantai makanan yang alami.

Dari sisi masyarakat, kondisi ini menjadi dilematis karena interaksi masyarakat dengan sumber daya alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tindakan masyarakat Desa Batur didasarkan pada utilitas atau kepentingan

tujuan dalam memenuhi kebutuhan akan kayu bakar. Tujuan yang dimiliki seorang individu atau aktor menjadi pendorong masyarakat Batur memanfaatkan kayu bakar tersebut meskipun ada pilihan bahwa masyarakat bisa menggunakan gas LPG tapi secara rasionalitas Coleman (2011) pilihan masih memanfaatkan kayu bakar akan lebih menghemat dan bertujuan pada keuntungan masyarakat (Coleman, 2011).

3. Pemanfaatan air

Air menjadi sumber utama dalam menopang kehidupan manusia. Pemanfaatan air yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batur bersumber dari hutan. Sumber air untuk kehidupan masyarakat Desa Batur dari hutan dilaksanakan sejak dahulu oleh nenek moyang mereka sebelum masuknya pengelolaan hutan oleh taman nasional. Hal ini disampaikan oleh bapak Isman selaku Kepala Dusun Seloduwur berikut ini :

“ Sebelum taman nasional mengelola air itu sudah lebih dulu masuk ke kampung” (Wawancara, Bapak Isman, Kepala Dusun Seloduwur, 18 Mei 2025).

Masyarakat Desa Batur memanfaatkan air dari sumber mata air pegunungan di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian. Sistem distribusi air dilakukan melalui pipa, dan inovasi teknologi irigasi hemat air mulai diterapkan untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Kelompok masyarakat juga aktif dalam pengelolaan air, dengan dukungan dari pengelola taman nasional untuk menjaga keinginan dan produktivitas sumber daya air.

Gambar 21. Pemanfaatan sumber air dari hutan



(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)

Dari realitas sosial masyarakat Batur seperti yang di atas, Coleman (2011), bahwa individu bertindak secara sengaja dengan tujuan tertentu yang dibentuk oleh nilai-nilai atau preferensi yang dimilikinya. Menggambarkan tindakan masyarakat dalam memanfaatkan potensi hutan seperti air, kayu bakar, dan rumput adalah refleksi dari tindakan rasional aktor sosial yang mempertimbangkan keuntungan ekonomi. Dalam konteks ini, Coleman, (2011) mendeskripsikan rasionalitas masyarakat tidak hanya bersifat individual dan utilitarian, melainkan juga dipengaruhi oleh norma kolektif. Ketika akses terhadap lahan dibatasi, masyarakat tidak serta-merta melakukan perjanjian secara frontal, melainkan memilih untuk beradaptasi, misalnya dengan mempertahankan bentuk perlawanan simbolik seperti tetap melakukan praktik perumputan melebihi aturan zona tradisional dari taman nasional, kemudian tetap mengambil hasil hutan seperti kayu bakar (Coleman, 2011).

B. Perasaan mengancam bagi kesejahteraan masyarakat

Dalam praktiknya, regulasi taman nasional yang membatasi akses terhadap sumber daya hutan dan perlindungan terhadap keanekaragaman di dalamnya sering kali menimbulkan kerugian bagi masyarakat Desa Batur. Masyarakat merasa praktik pengelolaan taman nasional lebih mengutamakan keberlangsungan hidup satwa dibandingkan masyarakat lokal.

1. Gangguan Monyet Ekor Panjang (MEP)

Salah satu realitas ekologis yang paling terasa bagi masyarakat Batur dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu adalah meningkatnya intensitas gangguan satwa liar, terutama Monyet Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*), yang sering turun ke lahan pertanian dan merusak tanaman. Fenomena ini berkaitan erat dengan kebijakan konservasi yang menjadikan semua ekosistem yang ada dalam kawasan konservasi dilindungi termasuk satwa. Akibatnya, monyet turun ke lahan tapi masyarakat tidak mampu berbuat apa – apa. Apabila ada usaha untuk membunuh atau menembak masyarakat berhadapan langsung dengan sanksi hukum. Masyarakat dalam hal ini menjadi korban yang terbelenggu oleh aturan perlindungan satwa. Ketika melakukan protes dan laporan terhadap pengelola taman nasional pun harus disertai

bukti foto dan video ketika Monyet Ekor Panjang (MEP) turun ke lahan dan merusak tanaman. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Suroso petani Dusun Batur Kidul sebagai berikut ini :

“Monyet ekor panjang (MEP) banyak tanaman dimakan monyet ekor panjang (MEP) ini kalo lapor taman nasional disuruh harus ada videonya harus ada buktinya. Lha mau ambil bukti gimana wong pas ditinggal ke rumah baru di makan emangnya masyarakat ini kaya terus di ladang harus dipasang cctv nah ngga mungkin toh salah satu aturan - aturanya atau perjalanannya yang menurut saya kurang pasnya gitu. jadi misalnya ada hama kami ini manusia mungkin lebih berharga dari pada binatang bagi unat manusia ya tapi kalo binatangnya di lindungi tapi kesejahteraan manusianya kok biasa - biasa aja gito lho. Itu salah satu contoh gitu. Ini lho sebelah barat rumah saya ini kadang (MEP) banyak bahkan kadang panen misal nya nandur nanam punya tanaman kentang dibedoli oleh (MEP) ya yang rugi kan warga. Lha terus dari taman nasional yang mengelola yang menjadi PTnya menjadi cvnya yang bertanggung jawab pertanggung jawabannya seperti apa oke silahkan dilindungi oke silahkan dikelola ning tapi pihak lain dipikir dong kan gitu nah sebetulnya gitu. Nah kalo sekarang kan tidak ada waktu yang namanya tolak atau terima wong namanya sudah dikelola kan masyarakat juga menerima” (Wawancara Bapak Suroso, petani Dusun Batur Kidul, 18 Mei 2025)

Terlebih lagi masyarakat petani harus menambah biaya produksi untuk memasang jaring di sekitar lahan agar Monyet Ekor Panjang (MEP) tidak bisa menjangkau ke tanaman petani. Menambah produksi menjadi satu alternatif meminimalisir gangguan Monyet Ekor Panjang (MEP). Pihak pengelola taman nasional sendiri belum merespon mengenai permasalahan ini. Sebetulnya ada keinginan dari masyarakat untuk menangkap atau menembak Monyet Ekor Panjang (MEP) yang dipandang sebagai hama petani, tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan karena Monyet Ekor Panjang (MEP) merupakan satwa endemik yang harus dilindungi apabila melakukan penangkapan atau penembakan terhadap Monyet Ekor Panjang (MEP) resiko sanksi hukuman akan dijatuhkan. Bu Darti selaku petani di Dusun Ngelelo menyampaikan keresahannya terhadap Monyet Ekor Panjang (MEP) seperti berikut ini :

“Monyet suka ngabisin tanaman kaya wortel, onclang atau bawang teropong, lahan sering dirusak. Monyet ini mengganggu dan merugikan sekali karena kalo daun brokoli sudah disentuh sama monyet ngga bisa tumbuh jadi kaya beracun gitu. Kalkulasi kerugian petani bisa sampai gagal

panen karena satu kotak lahan bisa dirusak monyet. Sekarang petani juga jadi beli jaring yang membuat sekeliling ladang agar monyet tidak masuk tapi monyet itu pintar soalnya kan ada pohon jadi pohonnya ditarik agar melengkung dan monyet bisa lompat dari pohon itu ke ladang meski dipasang jaring - jaring disekitarnya” (Wawancara Ibu Darti, petani Dusun Ngelelo, 18 Mei 2025)

Gambar 22. Jaring agar monyet tidak masuk lahan



(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)

Respons petani terhadap situasi ini tidak dapat dipahami sebagai reaksi emosional semata, melainkan sebagai tindakan rasional yang berangkat dari pertimbangan logistik atas tujuan dan sarana yang tersedia (Ritzer & Godman, 2019). Tujuan utama petani adalah mempertahankan hasil pertaniannya demi keberlangsungan perekonomian rumah tangga. Ketika gangguan satwa meningkat dan menyebabkan kerugian yang signifikan seperti gagal panen. Petani mempertimbangkan perlindungan alternatif - alternatif yang dapat diambil. Salah satu bentuk adaptasi yang paling banyak dilakukan adalah membeli jaring-jaring untuk menghalau monyet agar tidak masuk ke lahan pertanian.

Menanggapi gangguan dari satwa petani melakukan upaya agar mengurangi gangguan satwa merusak tanamannya dengan memasang jaring – jaring di sekitar lahan. Pilihan petani ini tentu tidak datang tanpa pertimbangan. Biaya pembelian jaring

yang harus ditanggung petani merupakan tambahan beban produksi yang tidak sedikit, terutama bagi petani kecil yang menambah pendapatan musiman. Namun dalam Coleman (2011), tindakan tersebut tetap dipilih karena dianggap sebagai solusi paling mungkin dan relatif cepat dalam menanggapi gangguan satwa. Dibandingkan dengan menunggu kompensasi dari pemerintah yang tidak pasti atau melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti memburu satwa, membeli jaring dianggap sebagai tindakan preventif yang masih dalam batas hukum dan etis. Dengan demikian, penambahan biaya produksi hasil pembelian jaring merupakan bentuk rasionalitas instrumental petani memilih sarana terbaik yang tersedia demi mencapai tujuan mempertahankan hasil panen. Namun pilihan ini juga menunjukkan batasan struktur kebijakan konservasi yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan atau kompensasi bagi masyarakat terdampak. Rasionalitas masyarakat terlihat dalam kemampuannya menyesuaikan strategi bertahan hidup dengan aturan yang ada, meski dalam posisi struktural yang lemah (Ritzer & Godman, 2019).

2. Resistensi dan berdaptasi

Respon yang ditunjukkan masyarakat Desa Batur terhadap praktik pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) menunjukkan dinamika yang kompleks dan rasional, sebagaimana menurut Coleman (2011). Pada dasarnya, masyarakat tidak serta-merta menolak keberadaan taman nasional, tetapi cenderung merespon praktik pengelolaan dengan mempertimbangkan pilihan – pilihan seperti kepentingan ekonomi, nilai budaya, dan keterikatan historis mereka terhadap lahan dan hutan yang kini masuk dalam kawasan konservasi. Ketika kawasan hutan tempat mereka beraktivitas secara turun-temurun ditetapkan sebagai bagian dari taman nasional, masyarakat sempat menunjukkan resistensi, terutama karena adanya pembatasan akses terhadap lahan garapan. Banyak warga merasa kehilangan hak historis atas tanah yang mereka anggap sebagai bagian dari warisan nenek moyang. Namun, respons ini tidak bersifat destruktif. Justru, masyarakat Desa Batur justru berupaya beradaptasi dengan mencari bentuk strategi pengelolaan baru, berdiskusi, dan pembentukan kesadaran masyarakat Desa Batur secara kolektif.

Proses ini terlihat dari bagaimana masyarakat secara sadar membangun forum komunikasi antar warga, menyampaikan aspirasi mereka melalui pertemuan desa (musyawarah), bahkan mengorganisir aksi kolektif berupa protes atau negosiasi dengan pihak taman nasional untuk menuntut kejelasan akses dan peran mereka dalam pengelolaan kawasan konservasi. Tindakan-tindakan ini bukanlah bentuk resistensi buta, melainkan ekspresi rasionalitas sosial yang mempertimbangkan keterikatan terhadap tanah leluhur, kebutuhan ekonomi sehari-hari, dan kepentingan jangka panjang pelestarian alam.

Gambar 23 Diskusi antar masyarakat



(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)

Coleman menjelaskan bahwa tindakan sosial lahir dari pilihan aktor-aktor yang rasional dalam konteks struktur sosial tertentu (Coleman, 2011). Dalam kasus Desa Batur, masyarakat sebagai aktor sosial mengambil keputusan kolektif untuk mengumpulkan massa dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka secara legal dan moral. Ini dilakukan bukan dengan membangkang total terhadap kebijakan taman nasional, melainkan dengan mendorong ruang dialog dan kemitraan yang lebih adil. Kesadaran kolektif ini juga dipicu oleh pengalaman bersama atas kerugian ekonomi dan ekologis, seperti pembatasan lahan pertanian, gangguan satwa liar seperti monyet ekor panjang (MEP), dan kesenjangan informasi mengenai zonasi taman nasional. Situasi ini memperkuat kohesi sosial dan membentuk solidaritas

antar warga yang pada akhirnya dimobilisasi ke dalam bentuk gerakan sosial berbasis komunitas.

3. Keberlanjutan ekosistem dan masyarakat

Masyarakat menilai jika keberlanjutan dari praktik pengelolaan Taman Nasional selama ini berfokus pada ekosistem saja. Lebih lengkap pembahasan di bab 4 bagaimana ekosistem alam dilindungi sebegitunya melalui praktik pengelolan dan perlindungan hukum yang jelas, namun unsur biotik lainnya dalam konteks ini masyarakat juga perlu diperhatikan sebagaimana pengelola Taman Nasional memperhatikan ekosistem alam. Keberlanjutan tidak lagi hanya dipahami sebagai upaya menjaga ekosistem dari kerusakan atau degradasi, melainkan sebagai suatu pendekatan integral yang menggabungkan kelestarian lingkungan dengan keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat lokal. Taman Nasional Gunung Merbabu, sebagai kawasan konservasi yang berada dalam interaksi langsung dengan pemukiman seperti Desa Batur yang berstatus *enclave*, merupakan contoh nyata dari kebutuhan untuk menyeimbangkan dua kutub keberlanjutan tersebut.

Merujuk pada UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE keberlanjutan ekosistem, dalam konteks Taman Nasional, berfokus pada upaya menjaga keanekaragaman hayati, melindungi spesies endemik, mempertahankan fungsi ekologis, serta menghindari eksploitasi yang melebihi daya dukung alam. Langkah-langkah ini diwujudkan melalui praktik – praktik pengelolaan oleh Taman Nasional seperti sistem zonasi, perlindungan dan pengawasan kawasan dengan patroli rutin, rehabilitasi atau suksesi hutan, serta penegakan hukum terhadap aktivitas perambahan atau perburuan ilegal. Namun, keberhasilan konservasi ekologis tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan dimensi sosial, terutama dalam kawasan yang dihuni oleh masyarakat adat atau komunitas lokal yang telah lama menggantungkan hidup pada sumber daya hutan.

Masyarakat Desa Batur telah menjalin hubungan kultural dan material yang erat dengan hutan Merbabu jauh sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai taman nasional. Oleh karena itu, strategi keberlanjutan yang hanya berpusat pada perlindungan ekologis tanpa memperhitungkan keberlanjutan kehidupan masyarakat

justru berisiko menimbulkan konflik, marginalisasi, bahkan perusakan tidak langsung akibat dislokasi sosial. Dalam perspektif sosial - ekologi, keberlanjutan masyarakat mencakup jaminan akses terhadap sumber daya secara adil, pemberdayaan ekonomi melalui ekowisata atau pertanian konservatif, serta pengakuan terhadap nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari sistem ekologis yang lebih luas. Upaya harmonisasi antara keberlanjutan ekologis dan sosial harus dari implementasi program seperti kemitraan konservasi, yang membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam rehabilitasi lahan, pengawasan kawasan, serta pemanfaatan terbatas secara lestari. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekowisata yang berkelanjutan memungkinkan mereka memperoleh pendapatan baru tanpa harus mengeksploitasi hutan secara langsung, sambil tetap menjaga nilai-nilai leluhur dalam merawat alam (Gunawati, 2017).

Coleman (2011), menjelaskan bahwa masyarakat akan memilih tindakan yang memberikan keuntungan dengan demikian aktor akan mengupayakan pemaksimalan keuntungan dalam kepentingannya. Dalam konteks masyarakat Desa Batur yang rasional akan cenderung mendukung konservasi apabila mereka melihat adanya keuntungan nyata baik berupa manfaat ekonomi, keamanan akses, maupun legitimasi sosial. Oleh karena itu, strategi keberlanjutan yang berhasil adalah strategi yang mampu membangun insentif dan kepercayaan di antara semua aktor, dari pengelola taman nasional hingga masyarakat lokal. Dengan demikian, keberlanjutan yang ideal dalam konteks pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu harus dipahami sebagai keberlanjutan ganda, yakni melestarikan ekosistem sambil menjamin keberlangsungan sosial dan ekonomi masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan. Pendekatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan keberpihakan pada keadilan ekologis maupun sosial demi menjaga keharmonisan antara manusia dan alam dalam jangka panjang (Ritzer & Goodman, 2019).

Hal senada disampaikan oleh bapak Romadi petani kentang di Dusun Ngelelo berikut ini :

“ Sekarang kalo ditanya keberlanjutan masyarakat sudah diperhatikan belum oleh Taman Nasional tidak bisa menjawab karena memenag selama ini praktik pengelolaan Taman Nasional berfokus pada ekosistem dan keberlanjutan masyarakat justru terkesampingkan. Keinginan dari masyarakat hanya ingin hutan tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat juga berjalan, silahkan hutan dikelola Taman Nasional tapi kesejahteraan masyarakat ya diperhatikan” (Wawancara bapak Romadi, petani kentang di Dusun Ngelelo, 18 Mei 2025)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Batur ingin adanya integrasi antara konservasi dan kesejahteraan masyarakat. Karena sejatinya masyarakat ingin dilibatkan dalam peran aktif penelolaann hutan seperti melalui program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Jika merujuk pada penelitian Gunawati, (2017) dimana hasil studi menjelaskan ada dua faktor utama yang menyebabkan ketidakefektifan pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu. Pertama, praktik pengelolaan yang selama ini dijalankan masih berlandaskan pada “sistem nilai” konservasi alam yang menekankan pada “pengawetan dan perlindungan” dengan cara membatasi interaksi antara hutan dan aktivitas masyarakat di sekitarnya. Kedua, belum terwujudnya sinergi atau titik temu antara pengelola dan masyarakat, karena masyarakat menghadapi kendala dalam hal hak akses terhadap sumber daya alam, sementara pengelola taman nasional dibatasi oleh regulasi yang ada. Oleh karena itu, terciptanya keharmonisan antara kelangsungan kehidupan masyarakat dan kelestarian ekosistem menjadi hal yang sangat penting. (Gunawati, 2017).

C. Mempertahankan nilai lokal dengan regulasi taman nasional masyarakat

1. Nilai lokal masyarakat Batur dan Regulasi Taman Nasional

Berdasarkan penuturan dari Kepala Dusun Seloduwur, masyarakat Desa Batur secara historis memiliki kedekatan kultural dan spiritual dengan kawasan hutan, ini yang menjadi landasan masyarakat dalam memanfaatkan potensi hutan. Mereka memiliki nilai – nilai yang diturunkan dari nenek moyang dalam penjagaan hutan. Wujud dari praktik tradisional seperti yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Seloduwur sedekah bumi , dan ritual memberi sesaji ke Umbul Songo. Nilai-nilai ini mencerminkan bahwa masyarakat lokal tidak hanya memandang hutan sebagai sumber ekonomi, tetapi juga

sebagai bagian dari *kosmologi* kehidupan mereka. Berikut wawawancara dengan tokoh masyarakat Dusun Seloduwur Pak Isman :

“Dusun Selo Duwur ada hubungan erat dengan Umbul Songo. Ini setiap tahun kamipun harus pasang sesaji ke sana ini memang dari nenek moyang itu seperti itu. Waktu saya jadi kadus ini pernah tidak melakukan karena wah nanti musrik kalo secara islam seperti itu ya. Pernah nyoba tidak melakukan dan memang tidak enak betul, di bulan sapar kan ada nyadran namanya di situ memang tirakatan sesajen itu dibawa ke sumber air kebetulan di Umbul Songo itu udah dari nenek moyang dulu itu ke sana walaupun airnya tidak bisa diambil di sini tapi dulu warga itu mandi, makan minum itu ke sana nah terus memang udah dari dulu itu setiap setahun sekali harus pasang sesajen ke sana. Itu dalam perjalanan saya sebagai kadus pernah satu kali itu saya coba untuk tidak melakukan wah itu banyak kebetulan aja ya banyak penyakit mba. Tradisi ke Umbul Songo masih sampai sekarang setiap bulan sapar itu pasti memberi sesajen ke sana. Walaupun sebenarnya saya sendiri kurang ngerti ya tapi pokoknya apa yang dulu diwujudkan sekarang masih mewujudkan bawa ke sana karena sudah turun-temurun dari nenek moyang.” (Wawancara Bapak Isman, Kadus Seloduwur, 18 Mei 2025)

Gambar 24. Lokal tradisi Masyarakat Desa Batur



(Sumber : Lenterajateng.com , diunduh 7Juni 2025)

Bagi masyarakat ini dimaknai sebagai penghormatan terhadap hutan atas sumber daya yang sudah dihasilkan hutan. Coleman, (2011) mendeskripsikan rasionalitas masyarakat tidak hanya bersifat individual dan utilitarian, melainkan juga dipengaruhi oleh norma kolektif. Interaksi masyarakat Desa Batur dalam memanfaatkan potensi hutan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun, seperti keyakinan untuk menjaga hutan sebagai warisan leluhur (*pamomong alas*) yang di sampaikan oleh bapak Sugiyono masyarakat Dusun Kaliduren (2025). Ketika adanya regulasi akses terhadap lahan dibatasi, masyarakat merasa bahwa

selama ini sebelum atau tanpa regulasi taman nasional pun masyarakat Batur meampu menjaga hutan dan memanfaatkannya dengan seperlunya saja tanpa sifat rakus atau tamak hingga menimbulkan kerusakan hutan (Ritzer & Godman, 2019).

2. Regulasi taman nasional

Seperti yang sudah dijelaskan di bab IV taman nasional megatur aktivitas masyarakat Batur dalam memanfaatkan sumber daya hutan dalam tujuan konservasi ekosistem. Konservasi ekosistem taman nasional berprinsip pada UU pasal 5 dalam UU No. 5 Tahun 1990 menjelaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan *pertama*, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. *Kedua*, perlindungan sistem penyangga kehidupan. *Ketiga*, pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya.. Guna mencapai tujuan tersebut pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) Kabupaten Semarang melakukan upaya penerapan sistem zonasi, perlindungan keutuhan kawasan, pemanfaatan, pelibatan masyarakat, dan kewenangan pemerintah dalam mencapai tujuan menjaga kelestarian ekosistem. Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) Kabupaten Semarang sebagai pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan konservasi, pengamanan, dan pemberdayaan sekitar masyarakat sesuai ketentuan peraturan-undangan.

3. Strategi pengelolaan hutan kolaborasi dengan masyarakat

Pengelolaan hutan yang diinginkan masyarakat Desa Batur adalah Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam konteks kawasan konservasi seperti Taman Nasional Gunung Merbabu tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial dan sejarah masyarakat yang telah lama bergantung pada keberadaan hutan sebagai ruang hidup. Oleh karena itu, salah satu pendekatan strategi yang berkembang adalah Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) , sebuah model kolaboratif yang memosisikan masyarakat bukan sebagai ancaman terhadap konservasi, tetapi sebagai mitra strategis dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.

Merujuk pada studi Hidayat, dkk (2018) Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) telah menunjukkan perkembangan yang positif. Masyarakat pun telah merasakan berbagai manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung,

meskipun distribusi manfaat tersebut belum merata ke seluruh anggota masyarakat. Berdasarkan hasil analisis nya menunjukkan bahwa program PHBM ini secara finansial dan ekonomi layak untuk dijalankan. PHBM merupakan bentuk implementasi dari semangat desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang tertuang dalam kebijakan kehutanan nasional, sekaligus jawaban atas konflik tenurial dan eksklusif masyarakat dari kawasan hutan. Dalam kerangka ini, pengelola taman nasional membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk melakukan kegiatan yang bersifat lestari di zona-zona tertentu, seperti zona rehabilitasi, zona tradisional, atau zona pemanfaatan terbatas. Tujuannya adalah untuk menciptakan keselarasan antara kepentingan ekologis dan kebutuhan ekonomi lokal (Hidayat dkk, 2018).

Di Desa Batur, apabila konsep PHBM diwujudkan dalam sejumlah praktik kolaboratif yang difasilitasi oleh pengelola Taman Nasional Gunung Merbabu. Masyarakat diperbolehkan melakukan kegiatan rehabilitasi lahan dengan menanam komoditas bernilai ekonomi namun tetap ramah lingkungan, seperti kopi, alpukat, dan konservasi tanaman lainnya. Kegiatan ini disertai dengan pelatihan teknis, penyuluhan hukum lingkungan, serta pendampingan kelembagaan masyarakat agar mampu menjalankan praktik konservasi yang berpusat pada kematian. Strategi PHBM juga mencakup pembentukan kelompok tani hutan, forum komunikasi warga, serta sistem pemantauan partisipatif. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan, tetapi juga ikut serta dalam pengambilan keputusan, pemetaan partisipatif, serta evaluasi program. Model ini mendorong tumbuhnya rasa kepemilikan (*sense of dimiliki*) terhadap hutan dan mengubah paradigma masyarakat dari eksploitasi menuju konservasi berbasis kesadaran.

PHBM menjadi strategi pengelolaan yang diinginkan masyarakat Desa Batur seperti yang disampaikan oleh Bapak Sugiyono warga Dusun Kaliduren berikut ini :

“ Pengelolaan hutan kolaborasi dengan masyarakat yang programnya PHBM itu bagus. Contoh pengelolaan PHBM yang dampaknya bisa membantu kaitannya dengan ekonomi masyarakat itu Telomoyo, Gunung Andong. Karena sejatinya masyarakat dan hutan tidak bisa dipisahkan maka potensi hutan dengan kehidupan masyarakat itu tidak bisa dipisahkan. Pengelolaan kolaborasi Telomoyo bersama

masyarakat melalui strategi PHBM berjalan baik dan menjadi sumber ekonomi kehidupan masyarakat.” (Wawancara bapak Sugiyono, warga Dusun Kaliduren, 17 Mei 2025)

Keterlibatan masyarakat dalam program strategi PHBM dalam asumsi Coleman, (2011) sebagai bentuk kalkulasi rasional terhadap manfaat jangka panjang. Masyarakat dapat memperoleh insentif ekonomi, rasa aman hukum, serta pengakuan sosial dari partisipasi mereka dalam pengelolaan kawasan. PHBM dengan demikian dapat menjadi medan negosiasi kepentingan antara negara (melalui balai taman nasional) dan warga desa, di mana tercipta kesepahaman dan kerja sama yang saling menguntungkan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal seperti gotong royong , tanggap lingkungan , serta warisan budaya konservasi ke dalam kerangka program formal, PHBM tidak hanya berhasil menciptakan model tata kelola hutan yang adaptif, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial masyarakat dalam menghadapi dinamika perubahan kebijakan lingkungan. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lahan, dan konflik sumber daya ekologi, PHBM menjadi jalan tengah menuju pengelolaan hutan yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan (Ritzer & Godman, 2019).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu di wilayah Kabupaten Semarang, khususnya di Desa Batur sebagai kawasan *enclave*, merepresentasikan penerapan prinsip-prinsip konservasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE. Undang-undang ini menegaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi harus mencakup tiga pilar utama, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari. Dari aspek perlindungan, pengelola Taman Nasional Gunung Merbabu telah menjalankan upaya perlindungan melalui kegiatan patroli kawasan, dan perlindungan flora fauna. Dari sisi pengawetan, dilakukan dengan menjaga ekosistem alami melalui sistem zonasi (zona inti, rimba, pemanfaatan, dan tradisional), dan rehabilitasi atau suksesi alam. Sementara itu, prinsip pemanfaatan diwujudkan dalam bentuk pengelolaan jasa lingkungan dan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, praktik pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu telah menunjukkan sinergi antara regulasi negara, Melalui integrasi antara perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan, pengelolaan taman nasional tidak hanya menjadi instrumen pelestarian lingkungan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan yang berbasis keadilan ekologis.
2. Respon masyarakat Desa Batur terhadap praktik pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu tercermin dalam upaya mereka mencari jalan tengah antara kebutuhan ekonomi, dan tuntutan konservasi ekologis. Dengan kata lain, tindakan masyarakat merupakan hasil kalkulasi terhadap manfaat dan risiko, yang dilandasi oleh konteks sosial dan budaya setempat, bukan sekadar pilihan yang didasarkan pada logika ekonomi semata. Adanya pembatasan akses di zona inti dan rimba, serta konflik dengan satwa liar seperti monyet ekor panjang (MEP), menjadi tantangan yang dihadapi masyarakat. Namun, alih-alih melakukan resistensi terbuka, masyarakat memilih untuk beradaptasi secara strategis melalui jalur-jalur formal, seperti menyampaikan secara langsung ke pihak pengelola taman nasional, berdiskusi antar

masyarakat. Dengan demikian, kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat Desa Batur merupakan aktor rasional yang mampu mengelola dilema antara konservasi dan pemanfaatan secara baik. Mereka tidak hanya bereaksi terhadap kebijakan konservasi secara pasif, melainkan juga membentuk praktik-praktik baru yang mengakomodasi kepentingan ekologis dan sosial-ekonomi secara simultan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dan partisipatif dalam kebijakan pengelolaan taman nasional, khususnya dalam konteks wilayah *enclave* seperti Desa Batur, di mana interaksi antara manusia dan alam tidak dapat dipisahkan secara mutlak.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dari penelitian mengenai rasionalitas masyarakat Desa Batur terhadap praktik pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai kontribusi praktis dan akademis:

1. Bagi Pengelola Taman Nasional, Diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat, terutama dalam menyosialisasikan sistem zonasi serta regulasi konservasi lainnya. Pengelola taman nasional perlu mengakui bahwa masyarakat lokal memiliki pengetahuan ekologis dan kearifan lokal yang berharga, yang jika dimobilisasi secara tepat dapat menjadi modal sosial untuk memperkuat tujuan konservasi. Oleh karena itu, skema kolaboratif seperti pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) dan pengembangan ekowisata partisipatif perlu diperluas cakupannya serta dikembangkan dengan prinsip keadilan dan transparansi.
2. Bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui perangkat desa dan kecamatan sebaiknya berperan aktif sebagai jembatan antara masyarakat dan pengelola taman nasional, terutama dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program konservasi. Bantuan teknis, pelatihan, serta dukungan regulasi lokal yang responsif terhadap karakteristik masyarakat desa *enclave* seperti Batur sangat dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi warga dalam menghadapi transformasi ekologis dan kebijakan kehutanan.

3. Bagi Masyarakat Desa Batur, Masyarakat diharapkan terus mempertahankan nilai-nilai lokal, kelestarian sumber daya alam, dan penguatan kapasitas dalam pengelolaan wisata alam semangat adaptif dalam menghadapi tantangan pengelolaan kawasan konservasi.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik ini, studi ini dapat menjadi landasan awal untuk kajian lebih lanjut mengenai interaksi antara masyarakat *enclave* dan kebijakan konservasi di taman nasional lain di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup yang belum dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aissiyah, A. K., Faida, L. R. W., & Hermawan, M. T. T. (2020). Pemanfaatan Rumput Dan Kayu Bakar Untuk Kebutuhan Subsisten Masyarakat Di Taman Nasional Gunung Merbabu. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 26(1), 20-27.
- Ajizah, R. U., & Handoyo, P. (2018). Rasionalitas Masyarakat Sidoarjo dalam Menggunakan Bus Rapid Transit Sidoarjo. *Paradigma*, 6(1).
- Ali, M. S. S., Yunus, A., Salman, D., & Demmallino, E. B. (2018). Rasionalitas petani dalam merespons perubahan kelembagaan penguasaan lahan dan sistem panen pada usahatani padi. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(1), 1-14.
- Alkaf, M., Munibah, K., & Rusdiana, O. (2014). Model spasial perubahan penggunaan lahan di Taman Nasional Gunung Merbabu dan daerah penyangganya. *Majalah Ilmiah Globe*, 16(1).
- Anandita, P. A. (2019). Persepsi Masyarakat Di Wilayah Taman Nasional Gunung Merbabu Terhadap Konservasi Hutan (*Doctoral dissertation*, Universitas Gadjah Mada).
- Coleman, James S. 2011. *Dasar-dasar Teori Sosial (Foundation of Social Theory)*. Bandung: Nusa Media.
- Dewi, M. M., Sukpti, S., & Abdullah, Z. (2022). Mempertahankan Karet, Menolak Sawit: Rasionalitas Tindakan Masyarakat Kampung Linggang Melapeh Menolak Adopsi Tanaman Komoditas Baru. *Learning Society: Jurnal CSR, Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 106-115.
- Daulay, D. N. O., & Hidayat, J. W. (2019). Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. *Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning* (Vol. 14, No. 1, pp. 233-240).
- Darmanto, D. (2011). Konservasi Global, Taman Nasional dan Praktek Lokal di Pulau Siberut, Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 5(1), 51-65.

- Ekayani, M., & Shaffitri, L. R. (2014). Taman nasional untuk siapa? Tantangan membangun wisata alam berbasis masyarakat di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*, 1(1), 46-52.
- Fauziah, N., Jati, Y. I., Assidiq, H. F., Adji, B. K., & Astin, M. (2023). Strategi kebijakan penanganan konflik manusia dan monyet ekor panjang (Studi Kasus: MEP Lereng Gunung Merapi di Kabupaten Boyolali). *Jurnal Inovasi Daerah*, 2(2), 219-236
- Fitriana, N. (2015). Respon masyarakat terhadap penetapan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Jurnal Konservasi Alam Indonesia*, 8(1), 45–55.
- Green, A. L., Lokani, P., Sheppard, S., Almany, G., & Hamilton, R. (2011). Scientific design of marine protected area networks in Fiji, Papua New Guinea, Solomon Islands, and Vanuatu: Achieving fisheries, biodiversity, and climate change objectives. *The Nature Conservancy Pacific Island Countries Report*.
- Gunawan, H., Bismark, M., & Krisnawati, H. (2013). Kajian sosial ekonomi masyarakat sekitar sebagai dasar penetapan tipe penyangga Taman Nasional Gunung Merbabu, Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10(2), 103-119.
- Gunawati, D. (2017). Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu Dalam Dialektika Norma Dan Realita. *Pkn Progresif*, 12(2), 675-688.
- Hartanto, B. A., Hidayat, J. W., & Prasetyono, B. W. H. E. (2019). Strategi Konservasi Kolaboratif Antar Kelembagaan Dalam Mendukung Pelestarian Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu di Kabupaten Boyolali. In *Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning* (Vol. 16, No. 1, pp. 200-209).
- Handayani, K. P. (2016). Distribusi dan konservasi rekrekan (*Presbytis comata fredericae*) di Taman Nasional Gunung Merbabu (*Doctoral dissertation*, Universitas Gadjah Mada).
- Harnowo, T. (2020). Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(1), 55-72.
- Haryanto, S. (2016). *Spektrum Teori Sosial (Dari Klasik Hingga Postmodern)*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

- Hidayat, A., Dharmawan, AH, & Pramudita, D. (2018). Kelayakan Usaha Budidaya Kopi Cibulao Dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*
- Hidayat, S., Budiastuti, S., & Setyono, P. (2016). Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu sebagai Upaya Konservasi Rekrekan (*Presbytis fredericae*). *Ekosains*, 8(03).
- Jayadi, Edi (2020). *Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Kearifan Lokal*. Mataram : Sanabil
- Komaryandi, N., dkk. (2012). Gagasan Baru Zonasi Taman Nasional: Sintesis Kepentingan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Kehidupan Masyarakat Adat. *International System for Agricultural Science and Technology*, 18 (2), 69–77.
- Kosmaryandi, N., Basuni, S., Prasetyo, L. B., & Adiwibowo, S. (2014). Pentingnya pendekatan konservasi keanekaragaman hayati dan penghidupan masyarakat adat dalam pengelolaan taman nasional di Indonesia. *Lokakarya Internasional tentang Sumber Daya Hayati Tropis untuk Pembangunan Berkelanjutan*
- Kumalasari, I. (2019). Pilihan Rasional Pengguna Dalam Memanfaatkan Layanan Co-Working Space Di Perpustakaan C2O Surabaya (*Doctoral dissertation*, Universitas Airlangga).
- Laumonier, Y., Uryu, Y., Stüwe, M., Budiman, A., Setiabudi, B., & Hadian, O. (2020). Eco-floristic sectors and deforestation threats in Sumatra: Identifying new conservation area network. *Biodiversity and Conservation*, 29(4), 1031–1052
- Mawlana, A., & Fauzi, A. M. (2021). Rasionalitas Masyarakat Desa Lalangon Memilih Kepala Desa Perempuan. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 5(1), 1-15.
- Miftakhurrohmad, F. (2017). Partisipasi Warga Dusun Cuntel Kecamatan Getasan dalam Menjaga Kelestarian Hutan di Gunung Merbabu. *Skripsi*. Program Studi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Harfa Creative.
- Nurhadi, M. (2017). Respon masyarakat terhadap kawasan konservasi di Karimunjawa. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Cakra Books, 1(1), 3-4, Solo

- Nurrani, L., & Tabbu, S. (2013). Persepsi dan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya alam Taman Nasional Aketajawe Lolobata di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10(1), 29099.
- Pujileksono, S., & Siregar, M. (2022). Pemahaman korupsi dalam teori pilihan rasional dan hubungan prinsipal-agen. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 139-151.
- Putri, I. (2019). Perspektif Pilihan Rasional (Lansia Pekerja Sektor Informal Sebagai Tukang Becak Di Kota Surabaya) (*Doctoral dissertation*, Universitas Airlangga).
- Putri, M. A. (2021). Perubahan Sikap Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sambirembe Kecamatan Karangrejo Magetan Tinjauan: Teori Pilihan Rasional James S. Coleman. *Skripsi*. Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Pramastuty, K. (2019). Pilihan Rasional Pengajar Dalam Mengajar Di Komunitas Save Street Child Surabaya (*Doctoral dissertation*, Universitas Airlangga).
- Randy, D. I. (2015). Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Hutan Taman Nasional Gunung Merbabu Kabupaten Boyolali. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Raho, B. (2007). *Teori sosiologi modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Rejeki, S. (2016). Strategi Bertahan Hidup Pada Musim Paceklik (Studi Deskriptif Kehidupan Petani Miskin Di Desa Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban). *Skripsi*. Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Rhama, B. 2019. *Taman Nasional dan Ekowisata*. Yogyakarta : PT Kanisius.
- Ritzer, G., dan Goodman D.J. 2019: *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Rouf, A., Hakim, M. L., & Utaminingsih, A. (2018). Perubahan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Enclave Pasca Penetapan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru:

- Studi Kasus di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. *Journal of Governance and Policy*, 4(1), 1-17.
- Satria, A. (2009). *Pengantar sosiologi sumber daya alam dan lingkungan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sadono, Y. (2013). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan taman nasional gunung merbabu di desa jeruk Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 9(1), 53-64.
- Sastrawati, N. (2019). Partisipasi politik dalam konsepsi teori pilihan rasional James S Coleman. *Al-Risalah*, 19(2), 187-197.
- Satyatama, T., Muntasib, E. H., & Prasetyo, L. B. (2010). Perencanaan jalur interpretasi alam menggunakan Sistem Informasi Geografis. *Jurnal manajemen hutan tropika*, 16(3), 126-136.
- Setiawan, Johan. dkk. 2018. *Buku Informasi Taman Nasional Gunung Merbabu*. Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. Boyolali
- Setiawan, D. (2018). Respon sosial terhadap perubahan tata guna lahan di daerah konservasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(2), 135–148.
- Shihab, Q. (1999). *Membumikan Al-Quran*, Bandung: Mizan.
- Suawa, P. J., Pioh, N. R., & Waworundeng, W. (2021). Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi). *Governance*, 1(2).
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Sudarsono, H. (2019). Pengelolaan satwa liar di Taman Nasional Baluran: Antara konservasi dan tantangan ekowisata. *Jurnal Konservasi Hayati*, 2(1), 45–59.
- Sugiharto, B., Nurkholis, M., & Prasetyo, D. (2023). Kolaborasi Konservasi antara Masyarakat Desa dan Akademisi: Studi Kasus di Lereng Merbabu. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 6(2), 115–126.

- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alabeta, cv. Bandung.
- Suharto, R. (2018). Persepsi dan respon masyarakat terhadap konservasi di Taman Nasional Lore Lindu. *Jurnal Sosial Ekologi*, 5(2), 122–136.
- Sulistiyono, N., Ahda, M., Zahira, A., & Pasha, SD (2025). Analisis persepsi dan perilaku masyarakat terhadap jasa lingkungan hutan dalam mitigasi konflik manusia-satwa liar. Dalam IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1445, No. 1, p. 012049). *IOP Publishing*.
- Sutopo, H. (2019). Relasi masyarakat dan kawasan konservasi: Studi kasus Desa Batur di lereng Gunung Merbabu. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Suyanto, B. 2018. *Memahami Teori Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Taddi, I. L., Tampi, G., & Kolondam, H. (2020). Pengawasan Dinas Pendidikan Pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Wahyudi, A. (2021). Dinamika respon masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis partisipatif. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(1), 56–70.
- Wibowo, A. S. (2024). Kajian Yuridis Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Merbabu:(Studi Kasus Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Balai Taman Nasional Gunung Merbabu). *Dinamika Hukum*, 15(1).
- Wibowo, P. H., & Fauzi, A. M. (2021). Rasionalitas Masyarakat Memilih Calon Bupati Milenial di Kalangan Sesebuah Desa Sumberbening Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 7(1), 65-80.

- Wijayati, D., & Riyanta, R. (2020). Evaluasi Zonasi Taman Nasional Gunung Merapi. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 3(2), 15-15.
- Winarsih, C. (2023). Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah di Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. (*Doctoral dissertation*, Universitas Gadjah Mada).
- Wulandari, S., Saptorianoro, P., Setyowati, K., & Marlina, M. (2023). Pilihan Rasional Nelayan Desa Bendar, Pati, Jawa Tengah: Studi Etnografi Permasalahan Kenelayanan. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 18(1), 25-34.
- Wulandari, C., & Suryawan, A. (2020). Respon sosial terhadap pengelolaan hutan konservasi di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Kehutanan*, 14(2), 112–130.
- Yarman, Y., Basuni, S., & Soekmadi, R. (2013). Implikasi kearifan lokal bagi pengelolaan Taman Nasional Wasur. *Media Konservasi*, 18(3), 231-296.
- Yunita, Y., & Idami, Z. (2020). Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 210-222.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.

LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara
Bapak Romadi Dusun Ngelelo



Dokumentasi wawancara
Bapak Karsidi Dusun Krangken



Dokumentasi wawancara
Bapak Isman Dusun Seloduwur



Dokumentasi wawancara
Bapak Wagimin Dusun Thekelan



Dokumentasi wawancara
Ibu Bakti Dusun Thekelan

Dokumentasi wawancara
Bapak Kasmin Dusun Gondang



Dokumentasi wawancara
Bapak Suroso Dusun Batur Kidul



Dokumentasi wawancara
Bapak Sugiyono Dusun Kaliduren



Dokumentasi wawancara dengan
pengelola Taman Nasional



Dokumentasi observasi di Kantor
Balai Desa Batur



Dokumentasi Desa Batur



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Ummu Khoer Salma
NIM : 2106026146
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 03 Februari 2002
Alamat : Desa Sokawangi Rt/Rw 07/04
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : ummukhoirsalma@gmail.com
Instagram : @ummukhoirr
No. Hp : 085961943472

B. Riwayat Pendidikan

SDN 03 Sokawangi : 2008-2014
SMPN 5 Taman : 2014-2017
SMAN 2 Pemalang : 2017-2020
UIN Walisongo Semarang : 2021-2025

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Osis SMPN 5 Taman
2. Anggota Pramuka SMPN 5 Taman
3. Wakil Ketua MPK SMAN 2 Pemalang
4. Anggota Pramuka
5. Anggota PKS
6. Anggota Rohis
7. Anggota Saka Bhayangkara
8. Anggota Jaringan Peduli Masyarakat 2021

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagai mestinya.

Semarang, 11 Juni 2025

Ummu Khoer Salma
NIM: 2106026146

